

# **PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN**

## **BERKELANJUTAN DI KABUPATEN GOWA**

**(Studi Kasus : Lahan Pertanian Kecamatan Pallangga,  
Kabupaten Gowa)**

**SKRIPSI**

Oleh

**ANDI ALIEF MUHAMMAD  
NIM : 45 18 042 071**



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR  
2023**

**PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN  
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN GOWA  
(Studi Kasus : Lahan Pertanian Kecamatan Pallangga,  
Kabupaten Gowa)**

**SKRIPSI**

**UNIVERSITAS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Teknik (S.T)**

**Oleh :**

**ANDI ALIEF MUHAMMAD**

**NIM. 45 18 042 071**

**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR  
2023**

**SKRIPSI**

**STUDI PEGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN  
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN GOWA  
(STUDI KASUS : LAHAN PERTANIAN KECAMATAN PALLANGGA,  
KABUPATEN GOWA)**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**ANDI ALIEF MUHAMMAD**

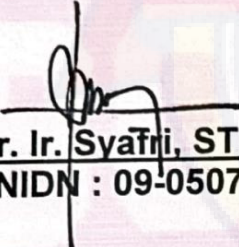
**NIM 45 18 042 071**

**Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi  
Pada Tanggal 27 Januari 2023**

**Menyetujui :**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Ir. Syafriz, ST., MSi**  
**NIDN : 09-050768-04**

  
**Muh. Idris Taming, ST., MSP**  
**NIDN 09-021075-02**

**Mengetahui :**

**Dekan  
Fakultas Teknik**

**Ketua Program Studi  
Perencanaan Wilayah dan Kota**

  
**Dr. H. Naerullah, ST., M.T**  
**NIDN : 09-090773-01**

  
**Dr. S. Kamran Aksa, ST., M.T**  
**NIDN : 09-110774-01**

## HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, Nomor: A.074a/SK/FT/UNIBOS/II/2023 Pada Tanggal 27 Januari 2023 Tentang Pengangkatan Dosen Penguji Ujian Tutup Mahasiswa Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Maka:

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 27 Februari 2023

Skripsi Atas Nama : Yoriyelsa

Nomor Pokok : 4518042060

Telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Negara dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Negara Jenjang Strata Satu (S-1), pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.

### TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ir. Fuad Azis, MT.

Sekretaris : Rimba Arief, ST., M.Sc.

Anggota : 1. Tri Budiharto, S.T., M.Sc., M.Eng

2. Muh. Idris Taling, S.T., MSP

DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR



Dr. H. Nasrullah, ST., MT.

NIDN : 0908077301

KETUA PROGRAM STUDI  
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA



Dr. S. Kamran Aksa, ST., MT.

NIDN : 0911077401

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Mahasiswa : Andi Alief Muhammad

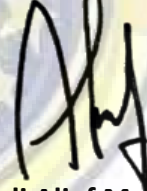
Stambuk : 45 18 042 071

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan merupakan penggandaan tulisan atau hasil pikiran orang lain. Bila di kemudian hari terjadi atau ditemukan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2023

Penulis,



Andi Alief Muhammad

## ABSTRAK

***Andi Alief Muhammad, 2022 "Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa". Dibimbing Oleh syafri dan Muh. Idris Taking***

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pola persebaran lahan pertanian, faktor penyebab terjadinya perubahan fungsi lahan pertanian berkelanjutan dan untuk pengendalian perubahan fungsi lahan pertanian, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa, perkembangan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Pallangga Tahun 2019 didominasi oleh kegiatan pertanian dan lahan kering dengan persentase masing-masing 54,49% dan 27,90%, sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan, dimana penggunaan lahan pertanian dan lahan kering berubah menjadi 41,95% dan 27,46%. Sedangkan untuk lahan permukiman mengalami peningkatan sebesar 27,73%. Sedangkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi perubahan pemanfaatan lahan pertanian meliputi: Faktor Kebutuhan Lahan, Faktor Sosial, sedangkan faktor ekonomi dan faktor kebijakan yang kurang mempengaruhi. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian dilakukan dengan strategi memperkecil peluang terjadinya alih fungsi lahan, mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan dan memberikan instrumen pengendalian alih fungsi lahan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pola perubahan dengan meningkatnya jumlah penduduk faktor penyebab perubahan fungsi lahan pertanian, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa yaitu faktor kebutuhan masyarakat soal perekonomian dan harga lahan yang tinggi serta meningkatnya jumlah penduduk. Sehingga arahan pengendalian yang dilakukan adalah Strategi pemanfaatan kebijakan terkait lahan pertanian untuk meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

**Kata Kunci: Alih Fungsi Lahan, Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan**

**KATA PENGANTAR**  
**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

***Bismillahirrahmanirrahim***

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Alhamdulillahirabbil Alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Pencipta Seluruh alam beserta isinya dan tempat berlindung bagi hamba-Nya. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman. Atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa”** Sebagai salah satu syarat kelulusan untuk meraih gelar Sarjana Teknik.

Penelitian ini berisikan tentang apa saja yang menjadi faktor penyebab adanya perubahan fungsi lahan pertanian di Kecamatan Pallangga dan bagaimana cara pengendalian alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Olehnya dengan ssegala kerendahan hati dan ketulusan penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teruntuk Kedua Orang Tuaku, salam kasih dan sayang serta hormatku dari anakmu kepada Ayahanda **Umar Congge** dan

Mamaku tersayang **Hatifah Talibin** yang telah sangat berjasa membesarkan, mendidik serta selalu memberikan dukungan, nasehat, motivasi dan materil maupun dukungan moril. Lalu doa restu yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir, semoga ALLAH SWT memberikan rahmat dan kasih sayangnya teruntuk kedua orang tuaku.

2. Kedua adik saya **Andi Arasy** dan **Adinda Dzurwah** yang sangat penulis sayang dan memberikan dukungan serta doanya selama ini.
3. Bapak **Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST., M.Si** selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak **Dr. Ridwan, ST., M.Si** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.
5. Bapak **Dr. S. Kamran Aksa, ST., MT.** selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa Makassar.
6. Bapak **Dr. Syafri, ST., M.Si** selaku Pembimbing pertama yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis demi kesempurnaan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak **Muh. Idris Taking, ST., MSP** selaku Pembimbing kedua yang selalu bersedia membimbing dan mengarahkan penulis demi kesempurnaan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak **Dr. Ir. Agus Salim, ST., M.Si** dan Bapak **Emil Salim Rasyidi, ST, M.Sc** selaku dosen penguji.



9. Bapak **Tri Budiharto, ST.,M.Sc.,M.Eng** selaku Penasehat Akademik yang bersedia memberikan arahan akademik kepada penulis.
10. Seluruh **Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota** Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar yang tidak saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama menjalani proses perkuliahan sejak awal sampai selesai.
11. Saudara **Andi Iskandar Palisuri, ST** , **Ibrahim Jabir, ST** dan **Muh.Ibnu Fauzi Akbar** terimakasih atas bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. **Ainul Fitrianisa S, S.Psi** terima kasih telah bersedia membantu menyelesaikan skripsi ini, menemani penulis dikesehariannya dan memberikan do'a dukungan serta motivasi sampai saat ini.
13. Sobat Kossi, **Irsan Ely Kibas, Ainul Fitrianisa S, Elti Eka Prasetya, Fahirah Agung, Aprilia Laxmi Pareang, Citra Medyawati, Yoriyelsa, Kezia Christin, Sry Juliansi, dan Muhammad Hilmy Khalil Ag** terima kasih telah bersedia membantu dan menemani penulis dikesehariannya serta memberikan do'a dukungan serta motivasi sampai saat ini.
14. Seluruh saudara – saudari seperjuangan **PLANOLOGI 2018 (PEACE18)** terima kasih selalu memberikan kritik, saran, dan dukungan serta memberikan cerita baru dalam kehidupan penulis.
15. Seluruh pihak yang selalu membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi sistematika penulisan dan isinya. Oleh karena itu, dengan indra dan hati yang terbuka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi menyempurnakan skripsi ini kedepannya. Besar harapan penulis penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin..

***Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Makassar, Januari 2023

Penulis,



**Andi Alief Muhammad**  
**NIM : 4518 042 071**

## DAFTAR ISI

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN PERNYATAAN**

**ABSTRAK**

**KATA PENGANTAR ..... i**

**DAFTAR ISI..... v**

**DAFTAR TABEL ..... viii**

**DAFTAR GAMBAR..... i**

**DAFTAR GRAFIK ..... i**

**BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 5

C. Tujuan Penelitian..... 6

D. Metode Penelitian..... 6

F. Ruang Lingkup Pembahasan..... 7

G. Sistematika Pembahasan ..... 7

**BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian lahan ..... 10

B. Lahan Pertanian ..... 17

C. Alih Fungsi Lahan Pertanian ..... 20

D. Konsep Pengembangan Wilayah Perkotaan ..... 22

E. Pola dan Karakteristik Alih Fungsi Lahan ..... 27

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan  
Pertanian ..... 28

G. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian ..... 30

H. Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan  
Berkelanjutan ..... 35

I. Landasan Hukum Kebijakan Alih Fungsi Lahan ..... 40

J. Kerangka Pikir ..... 44

<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	46
C. Jenis dan Sumber Data .....	47
D. Metode Penelitian .....	51
E. Populasi dan Sampel .....	51
F. Metode Analisis Data .....	54
G. Definisi Operasional .....	56
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Gambaran Umum Kabupaten Gowa</b>	
<b>B. Gambaran Umum Kawasan Penelitian</b>	
<b>C. Kondisi Fisik Wilayah</b>	
1. Topografi .....	79
2. Hidrologi .....	80
3. Klimatologi .....	81
<b>D. Penggunaan Lahan Kawasan Penelitian</b>	
<b>E. Demografi</b>	
1. Jumlah dan Perkembangan Kependudukan .....	88
2. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	89
3. Kepadatan Penduduk .....	90
<b>F. Aspek Sarana/Prasarana</b>	
<b>G. Persebaran Perubahan Pemanfaatan Lahan</b>	
1. Pola Perubahan Persebaran Pemanfaatan Lahan Pertanian Tahun 2019 dan 2022 .....	98
2. Pemanfaatan Lahan Pertanian .....	99
<b>H. Pola Perubahan Pemanfaatan Lahan</b>	
<b>I. Analisis Perubahan Penggunaan Lahan</b>	
<b>J. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perubahan         Pemanfaatan Lahan</b>	
1. Faktor Kependudukan .....	105
2. Faktor Kebutuhan Lahan .....	107

3. Faktor Ekonomi.....	111
4. Faktor Sosial.....	114
5. Faktor Kebijakan.....	118

**K. Arahana /Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Kecamatan Pallangga**

1. Memperkecil Peluang Terjadinya Alih Fungsi .....	130
2. Mengendalikan Kegiatan Alih Fungsi Lahan.....	131
3. Instrumen Pengendalian Alih Fungsi Lahan.....	131

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	134
B. Saran.....	135

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Faktor-Faktor, Variabel dan Indikator Penyebab Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian .....	51
Tabel 4.1	Luas Wilayah Kabupaten Gowa dirinci Berdasarkan Kecamatan.....	59
Tabel 4.2	Kondisi Curah Hujan di Kabupaten Gowa Setiap Bulan.....	74
Tabel 4.3	Luas Kelurahan / Desa dari Kecamatan Pallangga pada Tahun 2022.....	75
Tabel 4.4	Penggunaan Lahan di Kecamatan Palangga.....	79
Tabel 4.5	Laju Pertumbuhan dan Laju Penduduk Kecamatan Pallangga 2015 – 2020.....	85
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Pallangga Tahun 2015 – 2020.....	87
Tabel 4.7	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Palangga Tahun 2020.....	88
Tabel 4.8	Jumlah Sarana dan Prasana Perdagangan Menurut Per Kelurahan/ Desa di Kecamatan Pallangga Tahun 2020.....	90
Tabel 4.9	Jumlah Sarana dan Prasana Peribadatan Menurut Per Kelurahan/ Desa di Kecamatan Pallangga Tahun 2020.....	91
Tabel 4.10	Jumlah Sarana dan Prasana Kesehatan Menurut Per Kelurahan/ Desa di Kecamatan Pallangga Tahun 2020.....	92
Tabel 4.11	Jumlah Sarana dan Prasana Pendidikan Menurut Per Kelurahan/ Desa di Kecamatan Pallangga Tahun 2020.....	93
Tabel 4.12	Perubahan Luasan Pemanfaatan Lahan Pertanian dan Lahan Permukiman Pada Tahun 2019 – 2022.....	96
Tabel 4.13	Perkembangan Penggunaan Lahan di Kecamatan Palangga Tahun 2019-2022.....	100
Tabel 4.14	Faktor – Faktor yang Menyebabkan Perubahan Pemanfaatan lahan.....	101
Tabel 4.15	Tabel 4.15 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Pada Kawasan Penelitian 5 Tahun Terakhir.....	102
Tabel 4.16	Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Palangga.....	104

Tabel 4.17	Nilai Jual lahan Terhadap Perubahan Pemanfaatan Lahan.....	105
Tabel 4.18	Perhitungan Skor Akhir.....	106
Tabel 4.19	Lokasi Lahan Terhadap Perubahan Pemanfaatan Lahan.....	106
Tabel 4.20	Perhitungan Skor Akhir Tentang Lokasi Lahan.....	107
Tabel 4.21	Penilaian Responden Berdasarkan Mata Pencaharian di Kecamatan Pallangga.....	108
Tabel 4.22	Perhitungan Skor Akhir Menurut Mata Pencaharian.....	109
Tabel 4.23	Penilaian Tentang Tingkat Pendapatan Penduduk di Kecamatan Pallangga.....	110
Tabel 4.24	Perhitungan Skor Akhir Tingkat Pendapatan.....	111
Tabel 4.25	Penilaian Responden Tentang Pengaruh Perubahan Pemanfaatan Lahan.....	112
Tabel 4.26	Perhitungan Skor Akhir.....	113
Tabel 4.27	Penilaian Responden Tentang Karakteristik Kepemilikan Lahan.....	113
Tabel 4.28	Perhitungan Skor Akhir.....	115
Tabel 4.29	Penilaian Tentang kebijakan Pemerintah.....	115
Tabel 4.30	Penilaian Responden Tentang Kebijakan Pemerintah.....	116
Tabel 4.31	Rekapitulasi Hasil Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perubahan Lahan.....	118
Tabel 4.32	Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Pallangga.....	118

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Hubungan Antara Land Rent dengan Kapasitas Penggunaan.....	29
Gambar 2.2	Bagan Kerangka Pikir.....	42
Gambar 3.1	Rumus Pengambilan Sampel.....	49
Gambar 3.2	Alur Penelitian.....	53
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kabupaten Gowa.....	58
Gambar 4.2	Luas Daerah Menurut Kecamatan (%).....	60
Gambar 4.3	Peta Topografi.....	62
Gambar 4.4	Peta Kemiringan Lereng.....	63
Gambar 4.5	Peta Jenis Tanah.....	72
Gambar 4.6	Peta Hidrologi.....	73
Gambar 4.7	Peta Administrasi Kecamatan Pallangga.....	81
Gambar 4.8	Peta Topografi.....	82
Gambar 4.9	Peta Hidrologi .....	83
Gambar 4.10	Peta Penggunaan Lahan.....	84
Gambar 4.11	Peta Kondisi Lahan Pertanian Pada Tahun 2019.....	97
Gambar 4.12	Peta Kondisi Lahan Pertanian Pada Tahun 2022.....	98



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Pallangga pada tahun 2015-2020.....	86
Grafik 4.2	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Pallangga pada tahun 2015-2020.....	103



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lahan merupakan sumberdaya alam strategis bagi pembangunan. Hampir semua sektor pembangunan fisik memerlukan lahan, seperti sektor pertanian, kehutanan, perumahan, industri, pertambangan dan transportasi. Di bidang pertanian, lahan merupakan sumber daya yang sangat penting, baik bagi petani maupun bagi pembangunan pertanian. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa di Indonesia kegiatan pertanian masih bertumpu pada lahan pertanian (Catur, 2010).

Alih fungsi lahan ialah perubahan fungsi sebagian atau seluruh daerah lahan dari fungsinya semula (seperti yang telah direncanakan) sebagai fungsi lain yang dapat menyebabkan masalah terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri menurut Lestari (Irsalina, 2010). Maka menggunakan demikian alih fungsi lahan wajib dikendalikan, sebab dapat menyebabkan penurunan daya dukung lahan pertanian tanaman pangan pada Kabupaten Gowa tepatnya di Kecamatan Pallangga.

Alih fungsi lahan pangan di daerah Mamminasata, faktor penyebabnya menurut Lestari, dalam Irsalina (2010), adalah: *Pertama*, adanya pertumbuhan perkotaan, perkembangan penduduk serta ekonomi, *kedua*, kondisi sosial ekonomi rumah tangga

pertanian pengguna lahan *Ketiga*, faktor kebijakanyaitu kelemahan pada aspek regulasi atau peraturan itu sendiri terutama terkait menggunakan persoalan kekuatan hukum, sanksi pelang

garan, dan akurasi objek lahan yang dilarang dikonversi. *Empat*, Implementasi UU No 41/2009 serta Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan No 4/2014 perihal perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. yaitu bagaimana menekan laju pertumbuhan alih fungsi lahan persawahan ke non pertanian untuk menjaga ketahanan pangan dan dapat membangun kemandirian pangan di tempat Mamminasata Provinsi Sulawesi Selatan, dimana wilayah tersebut memiliki potensi lahan pangan berkelanjutan sebab memiliki daerah fertile serta asal air dapat mengairi wilayah persawahan yang luas yaitu 88.015 Ha menggunakan 35,74 deri luas wilayah kawasan Mamminasata (hasil analisis citra SPOT 4 2012 (Laporan Akhir. 2012. Pengadaan dan Interpretasi citra tempat Mamminasata).

Pertanian adalah sektor strategis yg memiliki peran penting pada perekonomian dan ketahanan pangan. namun demikian, dari waktu ke waktu lahan pertanian semakin tergerus akibat asal alih fungsi lahan. Data berasal Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memberikan bahwa asal tahun 2013-2019 terjadi penyusutan lahan sawah seluas 287.000 ha. pada tahun 2013

luas baku lahan sawah nasional  $\pm$  7,75 juta hektar sedangkan luas baku huma sawah nasional tahun 2019  $\pm$  7,46 juta hektar (Djalil 2020). Alih fungsi huma ini ditimbulkan sang aneka macam macam hal kebutuhan insan, yaitu kebutuhan akan tempat tinggal, pembangunan,serta berbagai macam kegiatan penunjang kehidupan lainnya. Putri (2015) pada analisisnya mengatakan faktor-faktor yang secara signifikan berpengaruh terhadap alih fungsi lahan pertanian.

Pembangunan ialah tuntunan bagi warga untuk mencapai kemajuan, karena jumlah penduduk yang semakin besar maka kebutuhan akan tanahpun bertambah seiring dengan perkembangan kemajuan peradaban manusia (Adisasmita 2010, 1). pada dasarnya, tujuan asal pembangunan itu baik, namun keterangan di lapangan menunjukkan pembangunan cenderung memberikan dampak yang merugikan terhadap keseimbangan lingkungan, salah satunya yaitu perubahan penggunaan lahan pertanian yang mengakibatkan pemanfaatan air tidak optimal serta penurunan tingkat produksi pangan (Martanto 2019, 4-5).

Pembangunan, hendaknya tidak hanya mengutamakan kepentingan sektor non-pertanian, namun tetap dengan memperhatikan sektor pertanian, agar bisa mewujudkan ketahanan serta keamanan pangan. Ketahanan pangan artinya syarat terpenuhinya pangan bagi tempat tinggal tangga yang tercermin asal tersedianya pangan yang relatif baik jumlah 2 maupun mutunya aman

merata dan terjangkau (Hardono dkk. dalam Subroto dan Susetyo 2016).

Undang-Undang nomor 41 Tahun 2009 perihal perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU No. 41/2009) ialah dasar utama pada usaha mengamankan lahan sawah buat produksi pangan yang perlu dijabarkan lebih lanjut oleh pemda sebagaimana dipengaruhi bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun usulan perencanaan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pasal 8 undang – undang ini menjelaskan bahwa dalam hal pada wilayah kota terdapat lahan pertanian pangan, lahan tadi dapat ditetapkan menjadi lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan buat dilindungi.

Kabupaten Gowa sebagai salah satu sentral produksi tanaman pangan pada Sulawesi Selatan, khususnya padi. Luas panen serta produksi padi masing-masing 40.258,85 ha dan 210.240,20 ton dengan produktivitas 52,22 ha. (BPS Sulawesi Selatan, 2022). Kabupaten Gowa mempunyai luas daerah 1.883,33 km<sup>2</sup> atau sama menggunakan 3,01 % asal luas Provinsi Sulawesi Selatan. serta terdiri dari 18 Kecamatan dan 167 Desa/Kelurahan, yang merupakan salah satu daerah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki pengusahaan pertanian yang juga strategis salah satunya berada pada Kecamatan Pallangga.

Secara administrasi daerah Kecamatan Pallangga seluas 48,24 km<sup>2</sup>, disektor pertanian yang mempunyai luas 2,738 Ha dan sebagian

besar penduduk di Kecamatan Pallangga sebagai petani menjadi mata pencaharian primer. namun, tidak terlepas dari konflik dalam menjalankan proses 3 usaha taninya. Adapun buat peralihan rencana pola ruang kabupaten Gowa, di kecamatan Pallangga yang memiliki luas 48,24 Km<sup>2</sup> yang terdiri asal kawasan permukiman perdesaan, kawasan permukiman perkotaan, kawasan peruntukan industri dan kawasan peternakan. Badan pusat Statistik Kecamatan Pallangga pada angka 2021 di sektor pertanian tercatat pada tahun 2019 lahan sawah seluas 2.874,52 Ha yang mengalami perubahan sangat dratis dari tahun 2019 sampai di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2022 tercatat lahan sawah kecamatan Pallangga seluas 2.640,69 Ha terlihat jelas bahwa lahan sawah masih tidak berubah serta berkurangnya lahan bukan sawah .Hal ini disebabkan sang banyaknya akan pertumbuhan lahan permukiman yang tinggi maka bisa mengancam lahan pertanian juga akan sebagai korban dalam alih fungsi lahan.

## **B. Rumusan Masalah**

Apa yang telah diketahui pada Latar Belakang di atas dapat dipaparkan menjadi rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana pola perubahan lahan pertanian berkelanjutan di Kecamatan Pallangga?
2. Faktor – Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya perubahan pemanfaatan lahan pertanian di Kecamatan Pallangga,

Kabupaten Gowa?

3. Bagaimana strategi pengendalian terhadap Alih Fungsi Lahan Kawasan Pertanian di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari apa yang Rumusan Masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pola persebaran huma pertanian berkelanjutan pada Kecamatan Pallangga.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mengakibatkan terjadinya perubahan di kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap pengendalian alih fungsi lahan tempat pertanian di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
3. Untuk mengetahui bagaimana arahan di tempat lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap pengendalian alih fungsi lahan kawasan pertanian pada Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

### **D. Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan penelitian melakukan pengukuran. Melakukan kajian dengan berbagai macam literatur yang terkait dengan hasil, pengamatan langsung di lapangan yang dijabarkan kedalam beberapa komponen sub variabel/indikator.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini, diharapkan sebagai berikut.

1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara ilmiah pada kajian tentang informasi mengenai kesesuaian arahan rencana kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap pengendalian alih fungsi lahan kawasan pertanian di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan juga memberikan manfaat melalui rekomendasi oleh *stakeholder* yang memperhatikan aspek – aspek dan peraturan yang berlaku.

## **F. Ruang Lingkup Pembahasan**

Penelitian ini memfokuskan pada Kecamatan Pallangga, yang penentuan batasan lokasi penelitian ini juga menentukan dengan didasari beberapa kriteria yang menjadi dasar pertimbangan pemilihan lokasi. Sebagaimana pada salah satu Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Selatan yang mengarahkan sebagian wilayah di Kecamatan Pallangga sebagai Kawasan Lahan Pangan Berkelanjutan khususnya komoditi padi dan jagung.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini pembahasan dilakukan dengan sistematika guna memudahkan dalam penganalisaan, dimana sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**



Bab ini berisi tentang pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang kajian teori yang menjadi landasan, antara lain yaitu tentang lahan, teori Lahan Pertanian, teori Alih Fungsi Lahan, teori Pola dan Karakteristik Alih Fungsi Lahan, Konsep Pengembangan Wilayah Perkotaan, Dampak dari Perubahan Pemanfaatan Kawasan Pertanian ke Non – Pertanian , Faktor – Faktor yang Menyebabkan Perubahan Pemanfaatan Lahan, Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian penggunaan lahan pertanian dan Landasan Hukum Kebijakan Alih Fungsi Lahan serta Kerangka Berfikir penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian. Secara umum menguraikan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, metode analisis data dan definisi operasional.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum Kabupaten Gowa, gambaran umum Kecamatan Pallangga, lalu tinjauan lokasi penelitian serta hasil – hasil analisis pengendalian alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian lahan

Lahan (*land*) adalah permukaan datar dengan kekayaan benda – benda padat, cair, dan bahkan benda gas. Pengertian dari lahan adalah suatu daerah di permukaan bumi dengan sifat – sifat tertentu yaitu adanya persamaan dalam hal geologi, geomorfologi, atmosfer, tanah, hidrologi dan penggunaan lahan, sifat – sifat tersebut adalah berupa iklim, batuan dan struktur, bentuk lahan, dan proses, jenis tanah, tata air, dan vegetasi/tumbuhannya.

Lahan merupakan tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya ada pemiliknya (perorangan atau lembaga) (Jayadinata, 1992). Sedangkan menurut Sugandhy (1999) lahan merupakan permukaan bumi sebagai tempat berlangsungnya aktivitas manusia. Pengertian lahan terbagi menjadi dua segi, yaitu berdasarkan segi geografi fisik dan segi ekonomi (Lichfild dan Drabkin, 1980). Berdasarkan segi geografi, lahan merupakan tanah yang tetap dalam lingkungannya dan kualitas fisik tanah sangat menentukan fungsinya. Sedangkan menurut segi ekonomi, lahan adalah sumber alamiah yang nilainya tergantung dari produksinya. Lahan merupakan suatu komoditi yang memiliki harga, nilai dan biaya.

Lahan merupakan bagian dari bentang alam (*landscape*) yang mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi/relief,

tanah, hidrologi, dan bahkan keadaan vegetasi alami (*natural vegetation*) yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Pengertian lahan yaitu tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya ada pemiliknya (perorangan atau lembaga). Misalnya dapat dikatakan : tata guna lahan di Kota. Sebagaimana disebutkan diatas dalam tata guna tanah, termasuk juga samudra dan laut serta daratan yang tidak dihuni (antartika) yang tidak ada pemilik perorangan atau lembaga, kalau pemiliknya adalah seluruh manusia (Jayadinata 1999 : 10).

Lahan adalah sebagai ruang (space) yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, pengertian memandang lahan dari sudut ekonomi regional atau dari sudut pembangunan wilayah. Lahan dan manusia merupakan sumberdaya yang paling besar, karena dari campur tangan manusialah lahan yang ada dapat berubah/dirubah fungsinya misalnya dari lahan pertanian menjadi kawasan permukiman atau kawasan industri. Dengan demikian lahan adalah ruang di permukaan bumi dapat sebagai sumberdaya yang dapat dieksploitasi, di mana dalam pemanfaatannya hendaknya dilakukan secara benar dengan mempertimbangkan kelestariannya.

Menurut Jayadinata (1999) Pengertian dari lahan adalah berarti V

1. Konsep pola pemanfaatan lahan

Penggunaan lahan adalah segala macam campur tangan manusia baik sementara maupun terus menerus terhadap

lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu penggunaan lahan untuk kehidupan sosial, termasuk di dalamnya lahan-lahan untuk perumahan, sekolah, rumah-rumah ibadah, tanah lapang untuk rekreasi dan kegiatan olahraga, sarana kesehatan (puskesmas / puskesmas pembantu) dan sebagainya yang pada umumnya menyatu dengan permukiman. Perencanaan penggunaan lahan dimaksudkan untuk mengetahui pemanfaatan yang paling sesuai terhadap daya dukung lahan agar produktifitasnya tinggi (optimal) tetapi tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dalam usaha untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai pola pemanfaatan lahan sesuatu daerah, langkah pertama yang harus ditempuh ialah mengadakan penyederhanaan sebutan dari jenis – jenis pemanfaatan lahan yang beraneka ragam itu dengan membuka klasifikasi penggunaan lahan secara sistematis. Istilah klasifikasi lahan telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang studi. Oleh karena itu istilah tersebut mempunyai beberapa perbedaan dalam pengertiannya. Kalasifikasi lahan didefenisikan sebagai pengaturan-pengaturan satuan lahan kedalam berbagai kategori berdasarkan sifat-sifat lahan atau kesesuaiannya untuk berbagai penggunaan.

Mengemukakan berbagai masalah yang dihadapi dalam penggunaan lahan di Indonesia menunjukkan bahwa masalah ini perlu di upayakan alternatif pemecahannya. Masalah penggunaan lahan di Indonesia yaitu:

- a) Terjadinya kemunduran produktifitas yang tidak disertai usaha konservasi tanah;
- b) Terjadinya produktivitas lahan sebagai akibat penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya;
- c) Terdesaknya lahan pertanian yang relatif subur oleh jenis penggunaan lahan non pertanian utamanya di daerah perkotaan; Penggunaan lahan hendaknya dilandasi pada asas – asa sebagai berikut : penggunaan optimal, pola penggunaan lahan yang seimbang, manfaat lestari dimana telah termasuk prioritas kepada jenis – jenis penggunaan lahan yang biasa dialih gunakan dan langkah – langkah pengawasan lahan. Proses perubahan pola pemanfaatan lahan dapat diikuti dengan membandingkan potret udara atau citra satelit dari berbagai tahun, dari perbandingan itu dapat dilihat bertambahnya luas daerah permukiman dan berkurangnya lahan pertanian. (Soemarwoto 1994 : 212).

## 2. Klasifikasi pemanfaatan lahan

Informasi penggunaan lahan yang diterapkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraris / Kepala Badan Pertanahan Nasional

No.1 tahun 1997. Secara garis besar klasifikasi penggunaan lahan tersebut dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar yaitu penggunaan lahan perkotaan (urban land use) dan penggunaan lahan non pertanian. Penggunaan lahan urban meliputi perumahan, jasa (perkantoran, fasilitas umum), perdagangan, dan industri. Sedangkan penggunaan lahan non urban meliputi areal persawahan, kebun campuran, tegalan, tambak, hutan, semak belukar, alang-alang, dan padang rumput.

### 3. Faktor Pembentukan Pemanfaatan Lahan

Mengemukakan bahwa ruang Kota sangat berkaitan dengan tiga sistem yaitu : sistem kegiatan, sistem pengembangan lahan, dan sistem lingkungan (alam). Ketiga sistem tersebut adalah :

- a. Sistem kegiatan berkaitan dengan cara manusia dalam kelembagaannya mengatur unsurnya sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya dan saling berinteraksi dalam waktu dan ruang.
- b. Sistem pengembangan lahan berfokus pada proses perubahan ruang dan penyesuaiannya untuk kebutuhan manusia dalam menampung kegiatan yang ada dalam susunan sistem.
- c. Sistem lingkungan berkaitan dengan kondisi biotik dan abiotik yang dibandingkan oleh proses alamiah, yang berfokus pada kehidupan tumbuhan dan hewan serta proses-proses dasar

yang berkaitan dengan air, udara dan materi. Kegiatan sistem tersebut menjadi dasar penyusunan lahan dan terbentuknya pemanfaatan lahan, tetapi yang tidak terjadi faktor esensial yaitu kepentingan umum yang mencakup pertimbangan kesehatan, keselamatan efisiensi, dan konservasi energi.

Sedangkan menurut Jayadinata, faktor penentu dalam tata guna lahan adalah:

- a. Perilaku masyarakat. Tingkah laku dan tindak manusia dalam tata guna tanah disebabkan oleh kebutuhan dan keinginan manusia dalam kehidupan social maupun ekonomi, dalam kehidupan sosial misalnya, kemudahan; atau convenience sangat penting artinya; pengaturan lokasi tempat tinggal, tempat kerja, dan tempat rekreasi adalah untuk kemudahan.
- b. Kehidupan ekonomi, dalam kehidupan ekonomi, daya guna dan biaya adalah penting, maka diadakan pengaturan tempat sekolah supaya ekonomis, program rekreasi yang ekonomis yang berhubungan dengan pendapatan perkapita dan sebagainya.
- c. Kepentingan umum. Kepentingan umum yang menjadi penentu dalam tata guna tanah yang meliputi : kesehatan, keamanan, moral, dan kesejahteraan umum (termasuk kemudahan, keindahan, dan kenikmatan) sebagainya. Dalam



kupasan tata guna lahan di mana suatu kota yang telah ada hubungan dengan pengertian itu, penggunaan tanah terdiri dari atas penggunaan bagian kelompok perumahan, industri, ruang terbuka, dan pendidikan, sehingga suatu kota dapat dianalisis.

#### 4. Karakteristik Lahan

Karakteristik lahan adalah suatu parameter lahan yang dapat diukur atau diestimasi, misalnya kemiringan lereng, curah hujan, tekstur tanah dan struktur tanah. Satuan parameter lahan dalam survey sumber daya lahan pada umumnya disertai deskripsi karakteristik lahan.

#### 5. Kualitas Lahan

Kualitas lahan mempengaruhi tingkat kesesuaian lahan untuk penggunaan tertentu. Kualitas lahan dinilai atas dasar karakteristik lahan yang berpengaruh. Suatu karakteristik lahan yang dapat berpengaruh pada suatu kualitas lahan tertentu, tetapi tidak dapat berpengaruh pada kualitas lahan lainnya.

#### 6. Pembatas Lahan

Pembatas lahan merupakan faktor pembatas jika tidak atau hampir tidak dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh produksi yang optimal dan pengelolaan dari suatu penggunaan lahan tertentu. Pembatas lahan dapat dibedakan menjadi dua yaitu : (1) Pembatas lahan permanen, pembatas lahan yang tidak dapat

diperbaiki dengan usaha – usaha perbaikan lahan (land improvement). (2) pembatas lahan semetara, pembatas lahan yang dapat diperbaiki dengan cara pengelolaan lahan.

#### 7. Persyaratan Penggunaan Lahan

Persyaratan penggunaan lahan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu pertama adalah persyaratan ekologis, contohnya ketersediaan air, ketersediaan unsur hara, ketersediaan oksigen, resiko banjir, lingkup temperatur, kelembapan udara, dan periode kering. Kedua, persyaratan pengelolaan, contohnya persiapan pembibitan dan mekanisasi selama panen. Ketiga, persyaratan konservasi, contohnya control erosi, resiko komplek tanah, resiko pembentukan kulit tanah. Keempat, persyaratan perbaikan, contohnya pengeringan lahan, tanggap terhadap pemupukan.

#### 8. Perbaikan Lahan

Perbaikan lahan adalah aktivitas yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas lahan pada sebidang lahan untuk mendapatkan keuntungan dalam meningkatkan produksi pertanian. Perbaikan lahan mutlak dilakukan agar kualitas lahan dapat terus terjaga dan bermanfaat bagi generasi yang akan datang.

### **B. Lahan Pertanian**

Menurut Rustiadi dan Reti (2008), ketersediaan sumber daya lahan pertanian berkelanjutan adalah persyaratan ketahanan pangan

nasional. Ketersediaan lahan pertanian pangan berkaitan erat dengan aspek-aspek berikut, yaitu 1) Potensi sumberdaya lahan pertanian pangan, 2) Produktivitas lahan, 3) Fragmentasi lahan pertanian, 4) Skala luasan penguasaan lahan, pertanian, 5) Sistem irigasi, 6) land rent lahan pertanian, 7) Konversi, 8) Pendapatan petani, 9) Kapasitas SDM pertanian serta 10) kebijakan di bidang pertanian.

Sebagai sumberdaya alam, lahan merupakan wadah dan faktor produksi strategis bagi kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Sumberdaya lahan merupakan salah satu sumberdaya alam yang memiliki banyak manfaat dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia, seperti sebagai tempat tinggal, tempat mencari nafkah, tempat berwisata, dan tempat bercocok tanam. Lahan mempunyai arti penting bagi masing – masing orang yang mememanfaatkannya. Fungsi lahan bagi masyarakat sebagai tempat tinggal dan sumber mata pencaharian. Bagi petani, lahan merupakan sumber memproduksi makanan dan keberlangsungan hidup. Bagi investor swasta, lahan merupakan aset untuk mengakumulasikan modal. Bagi pemerintah, lahan merupakan kedaulatan suatu negara untuk kesejahteraan rakyatnya.

Adanya banyak kepentingan yang saling terkait dalam penggunaan lahan ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kepentingan antar masyarakat, petani, investor swasta, dan pemerintah dalam memanfaatkan lahan. Lahan pertanian merupakan

lahan yang diperuntukan untuk kegiatan pertanian, seperti sawah, kebun sayuran, dll. Lahan sawah adalah suatu tipe penggunaan lahan pertanian yang untuk pengelolaannya menggunakan genangan air. Oleh karena itu sawah selalu merupakan permukaan datar atau yang didatarkan dan dibatasi oleh pematang untuk menahan genangan air. Berdasarkan jenis irigasinya sawah dibagi dalam tiga jenis, yaitu :

- 1) Sawah irigasi teknis, yaitu bentuk sawah yang pengairannya berasal dari waduk dan dialirkan melalui saluran primer dan selanjutnya dibagi-bagi kedalam saluran sekunder dan tersier melalui bangunan pintu pembagi.
- 2) Sawah irigasi semi teknis, yaitu bentuk sawah yang pengairannya berasal dari waduk, akan tetapi pemerintah hanya menguasai bangunan penyadap untuk mengatur pemasukan air.
- 3) Sawah irigasi sederhana, yaitu pengairan sawah dari mata air dan pembuatan salurannya dibuat tanpa bangunan permanen oleh masyarakat setempat (Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, 2003). Adapun pada kenyataannya di Indonesia masih terdapat sawah tadah hujan, yaitu sawah yang pengairannya tidak menggunakan irigasi. Pengairan pada sawah ini hanya berbasis pada air hujan. Menurut Sumaryo dan Tahlim (2005), manfaat lahan pertanian dapat dibagi menjadi dua kategori, use value dan non use value. Use value atau manfaat

penggunaan didapat dari hasil eksploitasi atau kegiatan usaha tani yang dilakukan pada lahan pertanian.

Sedangkan non use value atau manfaat bawaan merupakan manfaat yang tercipta sendirinya walaupun bukan merupakan tujuan dari kegiatan eksploitasi dari pemilik lahan pertanian. Yoshida dan Kenkyu (1996) dalam Sumaryanto (2005) mengutarakan pendapat lain tentang manfaat dari lahan pertanian. Menurut mereka lahan pertanian dapat berperan dari aspek lingkungan, seperti pencegah banjir, pengendali keseimbangan air, pencegah erosi, pengurangan pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah rumah tangga, dan mencegah pencemaran udara yang berasal dari gas buangan.

### **C. Alih Fungsi Lahan Pertanian**

Alih fungsi lahan atau konversi lahan adalah berubahnya satu penggunaan lahan ke penggunaan lainnya, sehingga permasalahan yang timbul banyak terkait dengan kebijakan tata guna lahan (Ruswandi, 2005). Alih fungsi lahan ini secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumberdaya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya. Hal ini umumnya terjadi di wilayah sekitar perkotaan dan dimaksudkan untuk mendukung perkembangan sektor industri dan jasa. Alih fungsi lahan pertanian sebenarnya bukan merupakan hal baru di Indonesia. Isu yang berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian marak diperdebatkan

sejak diterbitkannya hasil sensus pertanian yang mengungkapkan bahwa antara tahun 1983 hingga 1993 telah terjadi penyusutan lahan sawah sebesar 1,28 juta hektar.

Kondisi seperti ini sulit dihindari karena pemanfaatan lahan untuk kegiatan non pertanian lebih memberikan keuntungan finansial dibandingkan pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian. Hal ini tercermin pada nilai land rent untuk kegiatan pertanian yang cenderung lebih kecil dibandingkan untuk kegiatan non pertanian. Alih fungsi lahan pertanian merupakan isu yang perlu diperhatikan karena ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian, terutama pangan. Dalam kegiatan alih fungsi lahan sangat erat kaitannya dengan permintaan dan penawaran lahan, dimana penawaran atau persediaan lahan sangat terbatas sedangkan permintaan lahan yang tidak terbatas. Menurut Barlowe (1978), faktor – faktor yang mempengaruhi penawaran lahan adalah karakteristik fisik alamiah, faktor ekonomi, faktor teknologi, dan faktor kelembagaan. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan lahan adalah populasi penduduk, perkembangan teknologi, kebiasaan dan tradisi, pendidikan dan kebudayaan, selera dan tujuan, serta perubahan sikap dan nilai yang disebabkan oleh perkembangan usia. Pada umumnya permintaan komoditas pertanian terutama komoditas pangan terhadap pendapatan bersifat kurang elastis, sedangkan permintaan komoditas non pertanian pangan bersifat elastis.

Konsekuensinya adalah pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan cenderung menyebabkan naiknya permintaan lahan untuk kegiatan non pertanian dibandingkan permintaan lahan untuk kegiatan pertanian.

#### **D. Konsep Pengembangan Wilayah Perkotaan**

Kajian pengembangan wilayah perkotaan di Indonesia selama ini selalu didekati dari aspek sektoral dan aspek spasial. Pada kajian aspek sektoral lebih menyatakan ukuran dari aktifitas masyarakat suatu wilayah perkotaan dalam mengelola sumberdaya alam yang dimilikinya. Sementara itu, kajian aspek spasial (keruangan) lebih menunjukkan arah dari kegiatan sektoral atau dimana lokasi serta dimana sebaiknya lokasi kegiatan sektoral tersebut.

Pendekatan yang mengacu pada aspek sektoral dan spasial tersebut mendorong lahirnya konsep pengembangan wilayah perkotaan yang harus mampu meningkatkan efisiensi penggunaan ruang sesuai daya dukung, mampu memberi kesempatan kepada sektor untuk berkembang tanpa konflik dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara merata. Konsep tersebut digolongkan dalam konsep pengembangan wilayah perkotaan yang didasarkan pada penataan ruang.

Kaitan dengan perihal diatas, ada tiga kelompok konsep pengembangan wilayah yaitu konsep pusat pertumbuhan, konsep integrasi fungsional dan konsep pendekatan desentralisasi (Alkadri et

all, Manajemen Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah, 1999). Konsep pusat pertumbuhan menekankan pada perlunya melakukan investasi secara besar-besaran pada suatu pusat pertumbuhan atau wilayah/kota yang telah mempunyai infrastruktur yang baik. Pengembangan wilayah di sekitar pusat pertumbuhan diharapkan melalui proses tetesan ke bawah (*trickle down effect*). Penerapan konsep ini di Indonesia telah melahirkan adanya 111 kawasan andalan dalam RTRWN.

Konsep integrasi fungsional mengutamakan adanya integrasi yang diciptakan secara sengaja diantara berbagai pusat pertumbuhan karena adanya fungsi yang komplementer. Konsep ini menempatkan suatu kota atau wilayah mempunyai hirarki sebagai pusat pelayanan relatif terhadap kota atau wilayah yang lain. Sedangkan konsep desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah tidak terjadinya aliran keluar dari sumberdana dan sumberdaya manusia. Pendekatan tersebut mempunyai berbagai kelemahan. Dari kondisi ini muncullah beberapa konsep untuk menanggapi kelemahan tersebut. Konsep tersebut antara lain *people center approach* yang menekankan pada pembangunan sumberdaya manusia, *natural resources-based development* yang menekankan sumberdaya alam sebagai modal pembangunan, serta *technology based development* yang melihat teknologi sebagai kunci dari keberhasilan pembangunan wilayah.



Kenyataan menunjukkan bahwa aplikasi konsep tersebut kurang berhasil dalam membawa kesejahteraan rakyat.

Fenomena persaingan antar wilayah, tren perdagangan global yang sering memaksa penerapan sistem outsourcing, kemajuan teknologi yang telah merubah dunia menjadi lebih dinamis, perubahan mendasar dalam sistem kemasyarakatan seperti demokratisasi, otonomi, keterbukaan dan meningkatnya kreatifitas masyarakat telah mendorong perubahan paradigma dalam pengembangan wilayah. Dengan semakin kompleksnya masalah tersebut dapat dibayangkan akan sangat sulit untuk mengelola pembangunan secara terpusat, seperti pada konsep-konsep yang dijelaskan di atas. Pilihan yang tepat adalah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola pembangunan di wilayahnya sendiri.

Pembangunan ekonomi yang hanya mengejar pertumbuhan tinggi dengan mengandalkan keunggulan komparatif berupa kekayaan alam berlimpah, upah murah atau yang dikenal dengan bubble economics, sudah usang karena terbukti tak tahan terhadap gelombang krisis. Walaupun teori keunggulan komparatif tersebut telah bermetamorfose dari hanya memperhitungkan faktor produksi menjadi berkembangnya kebijaksanaan pemerintah dalam bidang fiskal dan moneter, ternyata daya saing tidak lagi terletak pada faktor tersebut (Alkadri etal, 1999).

Kenyataan menunjukkan bahwa daya saing dapat pula diperoleh dari kemampuan untuk melakukan perbaikan dan inovasi secara menerus. Menurut Porter (1990) dalam Tiga Pilar pengembangan Wilayah (1999) keunggulan komparatif telah dikalahkan oleh kemajuan teknologi. Namun demikian, setiap wilayah masih mempunyai faktor keunggulan khusus yang bukan didasarkan pada biaya produksi yang murah saja, tetapi lebih dari itu, yakni adanya inovasi untuk pembaruan. Suatu wilayah dapat meraih keunggulan daya saing melalui empat hal yaitu keunggulan faktor produksi, keunggulan inovasi, kesejahteraan masyarakat, dan besarnya investasi.

Apabila dicermati maka paradigma pengembangan wilayah telah bergeser pada upaya yang mengandalkan tiga pilar yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan teknologi. Ketiga pilar tersebut merupakan elemen internal wilayah yang saling terkait dan berinteraksi membentuk satu sistem. Hasil interaksi elemen tersebut mencerminkan kinerja dari suatu wilayah. Kinerja tersebut akan berbeda dengan kinerja wilayah lainnya, sehingga mendorong terciptanya spesialisasi spesifik wilayah. Dengan demikian akan terjadi persaingan antar wilayah untuk menjadi pusat spatial network dari wilayah-wilayah lain secara nasional.

Namun pendekatan ini mempunyai kelemahan yang antara lain apabila salah didalam mengelola spatial network tadi tidak mustahil

menjadi awal dari proses disintegrasi. Untuk itu harus diterapkan konsep pareto pertumbuhan yang bisa mengendalikan keseimbangan pertumbuhan dan dikelola oleh Pemerintah Pusat. Konsep pareto ini diharapkan mampu memberikan keserasian pertumbuhan antar wilayah perkotaan dengan penerapan insentif-insentif kepada wilayah perkotaan yang kurang berkembang.



## **E. Pola dan Karakteristik Alih Fungsi Lahan**

Sumaryo dan Tahlim (2005) mengungkapkan bahwa pola konversi lahan dapat di tinjau dalam beberapa aspek. Pertama, alih fungsi lahan yang dilakukan secara langsung oleh pemilik lahan yang bersangkutan. Motif dari pemilik lahan pertanian untuk merubah penggunaan lahannya antara lain, karena pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal dan peningkatan pendapatan melalui alih usaha. Sebagaimana diketahui para petani umumnya berpendapatan sedikit karena kebijakan pemerintah dalam pengaturan harga komoditas pertanian yang kurang bijak dibandingkan dengan harga input pertanian yang tinggi. Sehingga mereka cenderung membuat tempat tinggal untuk keturunannya atau membuat usaha lain dengan mengalihfungsikan lahan pertanian milik mereka sendiri.

Dampak dari alih fungsi ini akan baru terasa dalam jangka waktu yang lama. Kedua, alih fungsi lahan yang diawali dengan alih penguasaan lahan. Pemilik lahan menjual kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya untuk usaha non pertanian. Para petani yang cenderung berpendapatan kecil akan menjual lahannya karena tergiur akan harga lahan yang ditawarkan oleh para investor. Secara empiris, alih fungsi lahan melalui cara ini umumnya berkorelasi positif dengan proses urbanisasi (perkotaan). Dampak alih fungsi lahan terhadap eksistensi lahan pertanian dengan pola ini

berlangsung cepat dan nyata. Menurut Utomo (1992) alih fungsi lahan pertanian dapat bersifat sementara dan bersifat permanen.

Jika lahan sawah berubah menjadi perkebunan maka alih fungsi lahan tersebut bersifat sementara, karena pada tahun – tahun berikutnya dapat dijadikan sawah kembali. Sedangkan jika lahan sawah berubah menjadi pemukiman atau industri maka alih fungsi lahan tersebut bersifat permanen. Alih fungsi lahan yang bersifat permanen memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan alih fungsi lahan yang bersifat sementara.

#### **F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian**

Laju penggunaan lahan akan semakin meningkat seiring dengan pembangunan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya permintaan akan lahan mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Menurut Pakpahan et al (1993), faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor langsung dan tak langsung. Faktor langsung atau mikro yaitu faktor konversi di tingkat petani dimana faktor tersebut mempengaruhi langsung keputusan petani. Faktor tersebut antara lain kondisi sosial ekonomi petani, seperti pendidikan, pendapatan, kemampuan secara ekonomi, pajak tanah, harga tanah, dan lokasi tanah. Sedangkan faktor tak langsung atau makro yaitu faktor konversi di tingkat wilayah dimana faktor tersebut tidak secara langsung mempengaruhi keputusan petani.

Faktor ini mempengaruhi faktor – faktor lain yang nantinya berpengaruh terhadap keputusan petani. Faktor tersebut antara lain seperti pertumbuhan penduduk yang mempengaruhi pertumbuhan pembangunan pemukiman dan perubahan struktur ekonomi ke arah industri dan jasa yang akan meningkatkan kebutuhan akan sarana transportasi dan lahan untuk industri. Witjaksono (1996) turut pendapat tersebut, dimana beliau memaparkan lima faktor sosial yang mempengaruhi alih fungsi lahan, yaitu perubahan perilaku, hubungan pemilik dengan lahan, pemecahan lahan, pengambilan keputusan, dan apresiasi pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Dua faktor terakhir berhubungan dengan sistem pemerintahan.

Hal ini berkaitan dengan asumsi bahwa pemerintah sebagai pengayom dan abdi masyarakat seharusnya dapat bertindak sebagai pengendali terjadinya alih fungsi lahan. Menurut Nasoetion dan Winoto (1996), proses alih fungsi lahan secara langsung dan tidak langsung ditentukan oleh dua faktor, yaitu sistem kelembagaan yang dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah dan sistem non kelembagaan yang berkembang secara alamiah dalam masyarakat. Menurut penelitiannya, alih fungsi lahan sawah 59,08 persen ditentukan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan sistem pertanian yang ada. Sedangkan faktor industrialisasi dan perkotaan mempengaruhi 32,17 persen dan faktor demografis hanya

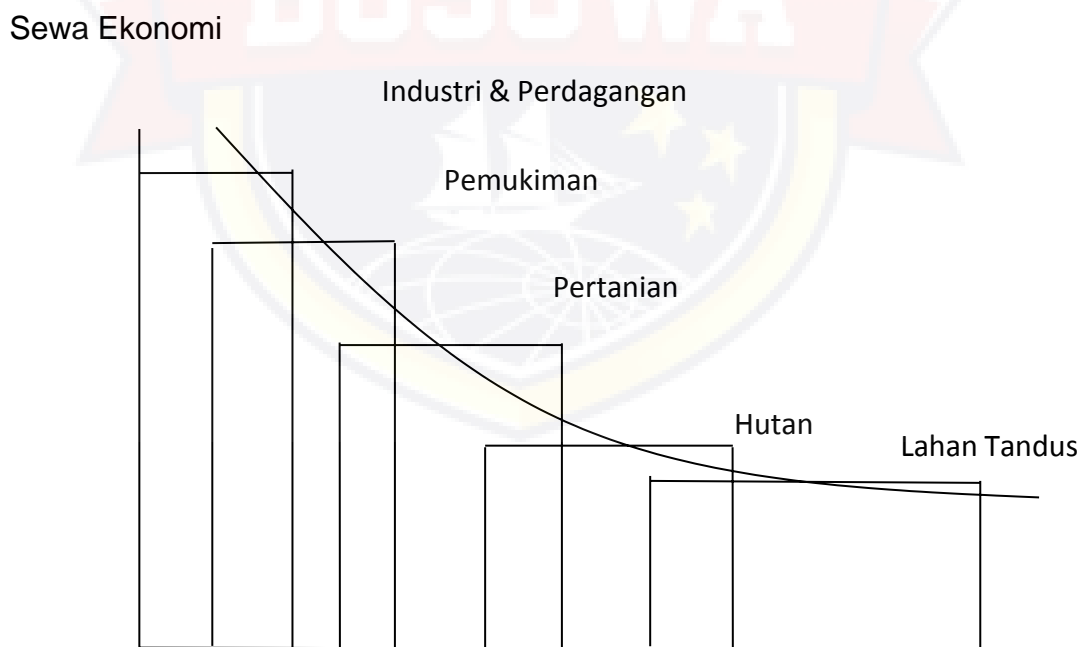
mempengaruhi 8,75 persen. Sedangkan Utomo (1992) memaparkan bahwa secara umum masalah alih fungsi dalam penggunaan lahan terjadi antara lain karena pola pemanfaatan lahan yang masih sektoral, delineasi antar kawasan yang belum jelas, kriteria kawasan yang belum jelas, koordinasi pemanfaatan ruang yang masih lemah, dan penegakan hukum seperti UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) yang masih lemah. Menurut Winoto (2005) faktor-faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian antara lain :

- a. Faktor kependudukan, yaitu peningkatan dan penyebaran penduduk di suatu wilayah. Pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan tanah. Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat juga turut berperan menciptakan tambahan permintaan lahan.
- b. Faktor ekonomi, yaitu tingginya land rent yang diperoleh aktifitas sektor non pertanian dibandingkan dengan sektor pertanian. Rendahnya insentif untuk bertani disebabkan tingginya biaya produksi, sementara harga hasil pertanian relatif rendah dan berfluktuasi. Selain itu karena faktor kebutuhan keluarga petani yang semakin mendesak menyebabkan terjadinya konversi lahan.
- c. Faktor sosial budaya, antara lain keberadaan hukum waris yang menyebabkan terfragmentasinya tanah pertanian, sehingga tidak

memenuhi batas minimum skala ekonomi usaha yang menguntungkan.

- d. Perilaku myopic, yaitu mencari keuntungan jangka pendek namun kurang memperhatikan jangka panjang dan kepentingan nasional secara keseluruhan. Hal ini tercermin dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang cenderung mendorong konversi tanah pertanian untuk penggunaan tanah non pertanian.
- e. Lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum dari peraturan yang ada.

**Gambar 2.1**  
**Hubungan Antara Land Rent dengan Kapasitas Penggunaan Lahan**



Kapasitas Penggunaan Lahan

Sumber: Fanny Anugrah K, 2005

Menurut penelitiannya Sutarti (dalam Fanny Anugrah K, 2005),



mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah di Kabupaten Serang dengan menggunakan analisis regresi diduga faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konversi lahan sawah yaitu pertumbuhan penduduk, kontribusi PDRB non tanaman pangan, produktivitas lahan sawah, jarak lokasi ke pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan industri. Melalui uji-t diperoleh bahwa pertumbuhan penduduk, kontribusi PDRB non tanaman pangan, jarak lokasi dari pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan industri berpengaruh nyata terhadap model, sedangkan produktivitas lahan sawah tidak berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 99%.

#### **G. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian**

Penyebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan terkonsentrasinya pembangunan perumahan dan industri di Pulau Sulawesi. Di satu sisi alih fungsi lahan ini menambah terbukanya lapangan kerja di sektor non – pertanian seperti jasa konstruksi dan industri, akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang kurang menguntungkan. Menurut Widjanarko et al (2006) dampak negatif akibat alih fungsi lahan, antara lain :

1. Berkurangnya luas lahan sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi, yang mengganggu tercapainya swasembada pangan.
2. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke non pertanian dimana

tenaga kerja lokal nantinya akan bersaing dengan pendatang. Dampak sosial ini akan berkembang dengan meningkatnya kecemburuan sosial masyarakat setempat terhadap pendatang yang nantinya akan berpotensi meningkatkan konflik sosial.

3. Investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan menjadi tidak optimal. Hal ini dikarenakan irigasi yang telah dibangun menjadi sia-sia karena sawah yang ada dialihfungsikan.
4. Kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan perumahan ataupun industri karena kesalahan perhitungan mengakibatkan lahan yang telah dialihfungsikan menjadi tidak termanfaatkan, karena tidak mungkin dikembalikan menjadi sawah kembali. Sehingga luas lahan tidur akan meningkat dan nantinya akan menimbulkan konflik sosial seperti penjarahan tanah.
5. Berkurangnya ekosistem sawah di Kabupaten Gowa dimana telah terbentuk selama berpuluh-puluh tahun, sedangkan pencetakan sawah baru di luar Wilayah Kabupaten Gowa tidak memuaskan hasilnya.

Dampak alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang sebenarnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat umum adalah terancamnya ketahanan pangan. Hal ini dikarenakan produk pertanian yang tadinya dapat dihasilkan sendiri oleh pertanian lokal menjadi berkurang akibat berkurangnya lahan pertanian. Pertumbuhan

penduduk yang terus bertambah tentu saja akan meningkatkan kebutuhan masyarakat akan pangan. Hal ini bertolak belakang dengan produksi pangan yang akan menurun jika alih fungsi terhadap lahan pertanian terus dilakukan. Jika hal ini tidak segera dikendalikan maka pemerintah harus mengimport pangan dari luar sehingga masyarakat akan semakin bergantung pada produk import.

Konversi lahan sawah dapat dipandang dari dua sisi. Pertama, dari fungsinya lahan sawah yang diperuntukan memproduksi padi. Dengan demikian adanya konversi lahan sawah ke fungsi lain akan menurunkan produksi padi nasional. Kedua, dari bentuknya perubahan lahan sawah ke bangunan permanen akan berimplikasi pada kerugian akibat sudah diinfestasikannya dana untuk mencetak sawah, membangun waduk, dan sistem irigasi.

Kegiatan alih fungsi lahan pertanian juga berpengaruh terhadap lingkungan. Perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Secara faktual alih fungsi lahan ini menyebabkan berkurangnya lahan terbuka hijau, mengganggu tata air tanah, serta ekosistem budidaya pertanian semakin sempit.

Dalam beberapa hal demikian, banyaknya lahan pertanian yang mulai berkurang memang menjadi perdebatan yang cukup bagus antara mereka yang pro terhadap hilangnya pertanian terutama di daerah wilayahnya sangat subur, beririgasi teknis. Mereka yang pro

mempunyai argument bahwa dapat diatasi dengan kemajuan teknologi atau ketersediaan lahan untuk pengembangan lahan pertanian baru sebagai substitusi lahan yang hilang. Kemajuan teknologi di bidang rekayasa pertanian menghasilkan produk yang lebih tinggi, lebih bertahan terhadap hama, sistem perakaran yang kuat dan waktu tumbuh yang singkat. Mereka yang kontra mempunyai pandangan lain, khususnya terkait ketersediaan lahan pertanian subur, produktif dan beririgasi teknis merupakan sumber daya yang sangat berharga. Hilangnya lahan pertanian yang terus menerus di semua WPU kota yang ada tanpa kendali di satu sisi dan makin bertambahnya kebutuhan perkotaan sebagai akibat penambahan penduduk namun pasti pada suatu saat yang akan datang akan mengakibatkan kesenjangan antar produksi dan konsumsi yang semakin lebar. Kemampuan berswasembada akan semakin jauh dari kata harapan. (Dr. Hadi Sabar Yunus, M.A. ; 2008)

#### **H. Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Kebijakan untuk melindungi Lahan pertanian pangan mulai ditetapkan pada tahun 2009. Kebijakan tersebut diikuti dengan kebijakan lain, agar Lahan pertanian pangan dapat berkelanjutan. Kebijakan- kebijakan tersebut meliputi:

1. Undang – undang No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang-undang ini menyatakan sebagai berikut:
2. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa perlindungan Lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan pangan berkelanjutan.
3. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku Lahan dan sebaran lokasi Lahan pertanian pangan berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang.
4. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa perencanaan usulan Lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan berdasarkan inventarisasi; identifikasi dan penelitian.
5. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa inventarisasi sebagaimana dimaksud Pasal 14 merupakan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.
6. Pasal 18 menyatakan bahwa perlindungan Lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:
  - a. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. Lahan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan;

- c. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan
7. Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa:
- a. Pasal 4 menyatakan bahwa penetapan Lahan pertanian berkelanjutan meliputi:
    - 1) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
    - 2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan
    - 3) Lahan Cadangan Pertanian Pangan berkelanjutan
  - b. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
  - c. Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka:
    - 1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, atau
    - 2) Terjadi bencana
8. Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- a. Pasal 2 menyatakan bahwa pemberian insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk:

- 1) Mendorong perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan
- 2) Meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- 3) Meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan bagi petani,
- 4) Memberikan kepastian hak atas tanah bagi petani, dan
- 5) Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan, pengembangan, dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan tata ruang.

b. Pasal 5 menyatakan bahwa Pemerintah memberikan insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada petani dengan jenis berupa:

- 1) Pengembangan infrastruktur pertanian,
- 2) Pembayaran penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul,
- 3) Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi,
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian
- 5) Jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- 6) Penghargaan bagi petani berprestasi tinggi

9. Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa:

a. Pasal 1 menyatakan bahwa Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

b. Pasal 2 menyatakan bahwa Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan pengendalian kawasan serta Lahan dan Lahan cadangan pertanian pangan bertujuan untuk:

1) Mewujudkan penyelenggaraan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara terpadu dan berkelanjutan, dan

2) Menghasilkan data dan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan yang digunakan sebagai dasar perencanaan, penetapan, pemanfaatan berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.



10. Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa:

- a. Pasal 2 menyatakan bahwa Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk menjamin ketersediaan pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pelaku usaha.
- b. Pasal 5 menyatakan bahwa kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dibiayai meliputi:
  - 1) Perencanaan dan penetapan,
  - 2) Pengembangan,
  - 3) Penelitian,
  - 4) Pemanfaatan,
  - 5) Pembinaan,
  - 6) Pengendalian,
  - 7) Pengawasan,
  - 8) Sistem informasi, dan
  - 9) Perlindungan dan pemberdayaan petani.

#### **I. Landasan Hukum Kebijakan Alih Fungsi Lahan**

Dasar kebijakan pertanahan pertanahan adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 45) pasal 33 ayat (3), yang menegaskan

bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari dasar kebijakan tersebut dibentuk suatu landasan hukum berupa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam penjelasan umumnya, dinyatakan bahwa tujuan diberlakukannya UUPA adalah:

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Landasan hukum dari kebijakan konversi lahan pertanian selain UUPA antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada pasal 50, yang menyebutkan bahwa segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum.
2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang terutama pada pasal 37, yang menyebutkan bahwa izin

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

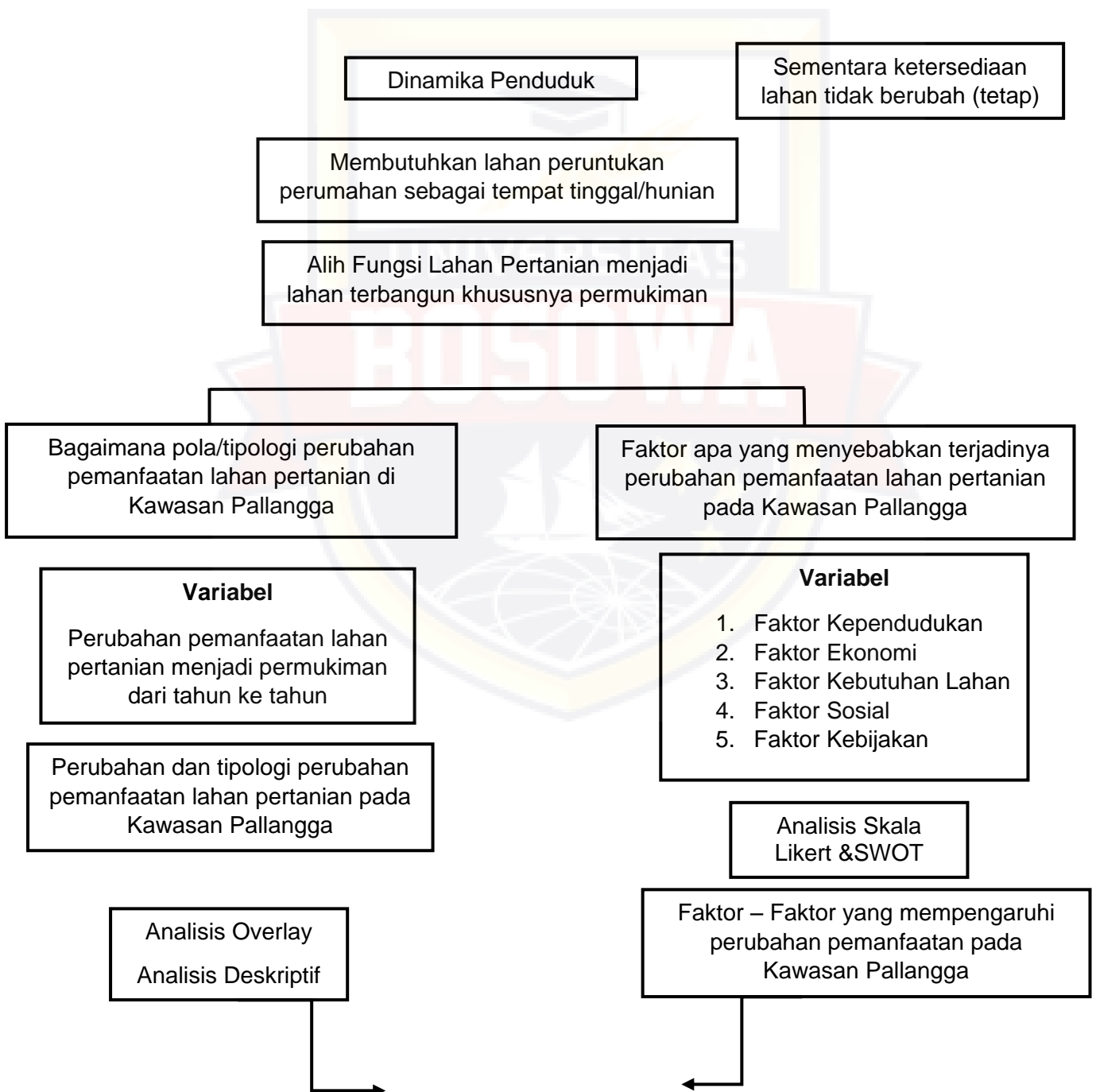
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang penatagunaan tanah terutama pasal 13, yang menjelaskan penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung atau kawasan budidaya harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1998 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, dimana pada pasal 11 dijelaskan tanah yang diperoleh dasar penggunaannya oleh orang perseorangan yang tidak menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keadaannya atau menurut sifat dan tujuan pemberian haknya, atau tidak memeliharanya dengan baik, atau tidak mengambil langkah-langkah pengelolaan bukan karena tidak mampu dari segi ekonomi, maka kepala kantor pertanahan mengusulkan kepada kepala kantor wilayah pemegang hak diberi peringatan agar dalam waktu tertentu sudah menggunakan tanahnya sesuai keadaan atau menurut sifat dan tujuan pemberian haknya.
5. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 tahun 1999 tentang izin lokasi penguasaan dan teknis tata guna tanah dimana pada

pasal 6 disebutkan izin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah.

Menurut Widjanarko *et al* (2006) ada tiga kebijakan nasional yang berpengaruh langsung terhadap alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian adalah:

1. Kebijakan privatisasi pembangunan kawasan industri sesuai Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 1989 yang telah memberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk melakukan investasi dalam pembangunan kawasan industri dan memilih lokasinya sesuai dengan mekanisme pasar.
2. Kebijakan pembangunan pemukiman skala besar dan kota baru. Kebijakan pemerintah ini sangat berpengaruh terhadap alih fungsi lahan, karena memunculkan spekulasi yang mendorong minat petani menjual lahannya.
3. Kebijakan deregulasi dalam hal penanaman modal dan perizinan sesuai Paket Kebijakan Oktober Nomor 23 Tahun 1993 memberikan kemudahan dan penyederhanaan dalam pemrosesan perizinan lokasi. Kebijakan tersebut menyebabkan peningkatan dalam permohonan izin lokasi untuk kawasan industri, pemukiman, maupun wisata.

## J. Kerangka Pikir



## Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian yaitu sifatnya deskriptif kuantitatif. Yaitu penelitian bertujuan untuk menggambarkan kondisi serta fenomena yang mengkaji tentang alih fungsi lahan. Metode penelitian survei

Kesimpulan /

merupakan penelitian yang mengambil sampel asal satu populasi serta menggunakan kuisisioner menjadi alat pengumpulan data yang utama (singarimbun, 1989). Data kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan *positivistic* (data konkrit), data penelitian berupa angka – angka yang akan diukur memakai statistik menjadi alat uji perhitungan, berkaitan dengan persoalan yg diteliti untuk menghasilkan suatu konklusi. (dari Sugiyono, 2018), filsafat *positivistic* digunakan pada populasi atau sampel eksklusif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini guna mengetahui sebagai bahan pembandingan maupun bahan rujukan yang dilakukan buat dalam menganalisis secara deskriptif.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penentuan atau penetapan lokasi penelitian ini dilakukan supaya mempermudah peneliti pada melakukan penelitian serta artinya tahap yang krusial pada melakukan suatu proses penelitian.



Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Pallangga yg adalah keliru satu Kecamatan dari 18 Kecamatan pada Kabupaten Gowa. Secara administrasi daerah Kecamatan Pallangga yang mempunyai luas 48,24 Km<sup>2</sup> dengan kondisi geografi yaitu bukan daerah Pantai melainkan sebagian besar berbentuk dataran. Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan lamanya yaitu mulai bulan September hingga November Agustus 2022

### **C. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Jenis data**

Jenis data terbagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif yang dianggap relevan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis data berupa kuantitatif.

- 1) Data kualitatif, yaitu jenis data yang berupa syarat objek pada ruang lingkup penelitian atau data yang tak mampu eksklusif dirancang dengan memakai perhitungan matematis namun dengan istilah-istilah atau narasi. Data kualitatif tak memakai model matematik, serta hanya terbatas di teknik pengolahan data seperti membaca grafik, tabel dan gambar, lalu dilakukanlah analisis.
- 2) Data Kuantitatif, yaitu jenis data numerik atau angka yang mampu diolah menggunakan memakai metode perhitungan matematik, melakukan pendekatan-pendekatan terhadap



kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisis dan menampilkan data dalam bentuk numerik (angka) daripada deskriptif, dari Robert Don moyer (dalam Norjanah:2014).

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan ada 2 meliputi data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer artinya data yang memperoleh berasal pengamatan langsung atau observasi di lapangan atau lokasi penelitian yang diteliti seperti syarat eksisting asal penggunaan huma, atau ialah sumber data penelitian yang diperoleh secara eksklusif dari sumber orisinil (tidak melalui media mediator) berdasarkan Nur Indrianto serta Bambang Supomo (2013:143).
- 2) Data Sekunder ialah asal data penelitian yg diperoleh peneliti secara tidak pribadi melalui media mediator (diperoleh dan dicatat sang pihak lain) menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2013:143).

## D. Metode Pengumpulan Data

Menurut Yusuf (2014:372) keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan penekanan penelitian. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti, bisa mengamati situasi sosial yang terjadi dalam konteks yang sesungguhnya. Peneliti tidak akan

mengakhiri fase pengumpulan data sebelum peneliti konfiden bahwa data yang terkumpul asal berbagai asal yang tidak sama serta terfokus di situasi sosial yang diteliti bisa menjawab rumusan problem berasal penelitian, sehingga ketepatan serta dapat dipercaya tidak diragukan oleh siapapun.

## **1. Pengumpulan Data Primer**

### **1) Observasi Lapangan**

Pengumpulan data dengan observasi eksklusif atau menggunakan pengamatan pribadi artinya cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standart lain buat keperluan tadi (Nasir, 1998), sedangkan dari Yusuf (2014:384) kunci keberhasilan asal observasi menjadi teknik dalam pengumpulan data sangat banyak dipengaruhi oleh peneliti itu sendiri, sebab peneliti melihat serta mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian peneliti menyimpulkan dari apa yang diamati. dan observasi eksklusif di penelitian ini yaitu:

Kondisi eksiting Kawasan pertanian di area Perkotaan, kondisi di area Kawasan Pedesaan dan kondisi eksisting Kawasan Pertanian di area KP2B.

## **2) Data Spasial**

Data Spasial adalah menjadi suatu data yg mengacu di posisi, objek dan hubungan diantaranya dalam ruang bumi (Irwansyah, 2013:14). Data spasial juga dianggap data geografis dan data geospasial. Seiring berkembangnya produksi data, jumlah data spasial bertambah sangat pesat.

Penelitian ini menggunakan data spasial tersebut ialah:

- a. Peta Administrasi
- b. Peta Topografi
- c. Peta Tematik, dll.
- d. Studi Dokumentasi

## **3) Kuisisioner**

Untuk penelitian ini yang bersifat kuantitatif kuisisioner juga dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan data. Hasil dari kuisisioner akan dinarasikan secara deskriptif. Kuisisioner ini dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dengan adanya perubahan akibat alih fungsi lahan.

## **2. Pengumpulan Data Sekunder**

Pengumpulan Data Sekunder Metode pengumpulan data sekunder yang dipergunakan pada penelitian ini adalah:

### **1) Survei Literatur**

Survei ini merupakan studi pustaka yang dilakukan

berkaitan menggunakan pengendalian pemanfaatan ruang. Kajian ini bisa dilakukan melalui buku – buku atau jurnal yg membahas perihal daerah, perubahan fungsi lahan, makalah atau jurnal-jurnal ilmiah.

## 2) Survei Institusional

Survei ini dilakukan dengan kunjungan buat memperoleh data tertulis yang ada pada tempat kerja / instansi atau badan yang terkait dengan penelitian seperti kantor Kecamatan, Badan pusat Statistik serta instansi lainnya.

## **E. Populasi dan Sampel**

### 1) Populasi

Populasi bisa didefinisikan menjadi holistik aspek eksklusif berasal ciri, kenyataan atau konsep yang sebagai sentra perhatian. Adapun yg menjadi populasi adalah warga yg bermukim di wilayah delineasi tempat Pallangga yaitu seluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah administrasi Kecamatan Pallangga, tempat yang termasuk pada wilayah adminstrasi Kecamatan Pallangga dan Desa Pallangga, Desa Panakukang, Kelurahan Julukanaya, Kelurahan Julubori, Desa Tetebatu, Desa Bungaejaya, Desa Taeng, Desa Bontoala, Desa Je'netallasa, Desa Bontoramba, Desa Kampili, Kelurahan Parangbanoa, Kelurahan Pangkabinanga, Desa Toddotoa, Kelurahan Mangalli, Desa Bontoramba serta Desa

Julupamai yang termasuk pada wilayah administrasi Kecamatan Palangga. Banyaknya populasi artinya sebanyak 127.837 Jiwa. (Kecamatan Pallangga dakam angka 2021).

## 2) Sampel

Sampel artinya jumlah anggota yang dipilih Sampel artinya jumlah anggota yang dipilih / diambil dari suatu populasi, yang diperlukan mampu mewakili atau mendeskripsikan ciri – karakteristik eksistensi populasi sebenarnya. Teknik penarikan sampel yg digunakan artinya penarikan sampel acak (secara acak sampling). dalam penarikan sampel, diupayakan sampel yang ditarik bisa merpresentasikan dari kondisi secara holistik, walaupun jumlah sampel yang ditarik cukup kecil dibandingkan populasi. buat memilih sampel yg akan digunakan pada penelitian.diambil dari suatu populasi, yang diperlukan mampu mewakili atau mendeskripsikan ciri – karakteristik eksistensi populasi sebenarnya. Teknik penarikan sampel yg digunakan artinya penarikan sampel acak (secara acak sampling). dalam penarikan sampel, diupayakan sampel yang ditarik bisa merepresentasikan dari kondisi secara holistik, walaupun jumlah sampel yang ditarik cukup kecil dibandingkan populasi. buat memilih sampel yg akan digunakan pada penelitian ini maka digunakan rumus sebagai berikut (Jauhari H,

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

2010 : 22) :

Gambar 3.1 Rumus Pengambilan Sampel

$n$  : Jumlah Sampel

$N$  : Jumlah Populasi

$e$  : Toleransi derajat kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang nilai antara 2% -15%

### 3) Variabel Penelitian

Variabel dapat diartikan ciri dari individu, objek, gejala, peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif (Sudjana, 1981). Variabel dipakai dalam penelitian yaitu, Perubahan pemanfaatan lahan dari waktu ke waktu (2019 & 2022). Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat (dependen variable) yaitu alih fungsi lahan pertanian dan variabel bebas (independen variabel) yang terdiri dari faktor kependudukan, faktor kebutuhan lahan, faktor ekonomi, faktor sosial budaya dan faktor kebijakan.

**Tabel 3.1**  
**Faktor-Faktor, Variabel dan Indikator Penyebab Perubahan**  
**Pemanfaatan Lahan Pertanian**

No	Faktor	Indikator
1	Faktor Kependudukan	Pertumbuhan penduduk
		Kepadatan penduduk
2	Faktor Kebutuhan Lahan	Nilai jual lahan
		Lokasi lahan
3	Faktor Ekonomi	Mata pencaharian penduduk
		Tingkat pendapatan penduduk
4	Faktor Sosial	Pengaruh tetangga
		Karakteristik Pemilik Lahan
5	Faktor Kebijakan	Perizinan Pemerintah

#### **F. Metode Analisis Data**

Alat Analisis Untuk Rumusan Masalah Pertama Untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah pertama yaitu bagaimana pengendalian pemanfaatan lahan pertanian di Kawasan Pallangga menggunakan metode atau pendekatan meliputi :

1. Analisis Super Impose (Overlay) Salah satu metode analisis keruangan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah proses tumpang susun atau overlay antara dua atau lebih layer tematik untuk mendapatkan tematik kombinasi baru sesuai dengan persamaan yang dipergunakan. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana perubahan pemanfaatan lahan. Dengan melakukan overlay peta maka diharapkan akan menghasilkan suatu gambaran yang jelas bagaimana kondisi spasial serta perubahan fungsi lahan di Kawasan Kecamatan Pallangga.

Tumpang susun data keruangan atau overlay adalah salah satu

prosedur analisis data spasial, dimana pada proses ini layer dimodifikasi sesuai dengan yang diperlukan. Proses overlay sendiri terdiri dari beberapa metode, yaitu *identity*, *intersect*, *union*, *update*, *erase*, dan *symmetrical difference*.

## 2. Analisis Untuk Rumusan Masalah Kedua

- a. Analisis Deskriptif Kuantitatif Metode yang digunakan berupa analisis deskriptif kuantitatif. Dengan melakukan pendekatan-pendekatan secara sistematis. Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan ciri atau karakteristik variabel yang ditetapkan. Untuk mendukung hal tersebut, maka penyebab perubahan pemanfaatan lahan dapat dilihat berdasarkan faktor – faktor penyebabnya.
- b. Tabulasi Silang (*Cross Tabulation*) Data yang terjaring melalui hasil kuisisioner, diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan tabulasi silang (*Cross Tabulation*). Data yang terkumpul dilakukan kategorisasi dengan skala likert, yaitu berpengaruh, kurang berpengaruh, dan tidak berpengaruh.
- c. Metode Analisis Skala Likert yang merupakan skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti (Likert R.,1932;1–55). Menentukan interval dapat digunakan rumus sebagai berikut:



**rumus interval :  $I = 100 / \text{Jumlah Skor (likert)}$**

Maka =  $100 / 3 = 33,33$

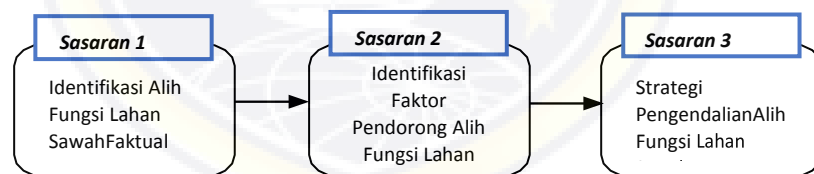
Hasil (I) = 33,33 (Ini adalah intervalnya jarak dari terendah 0% hingga tertinggi 100%) Berikut kriteria interpretasi skornya berdasarkan interval:

- 1) Angka 0,00% – 33,33 % = Tidak Berpengaruh
- 2) Angka 33,34% – 66,66% = Kurang Berpengaruh
- 3) Angka 66,67% – 100% = Berpengaruh

### 3. Analisis Untuk Rumusan Masalah yang Ketiga

Perumusan strategi pengendalian alih fungsi lahan dilakukan dengan menghimpun hasil dari analisis sebelumnya dalam upaya untuk melihat keterkaitan strategi untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

**Gambar 3.2 Alur Penelitian**



## G. Definisi Operasional

Pada penelitian ini menggunakan definisi operasional sebagai berikut:

1. RTRW, Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat

tersebut.

2. Evaluasi Lahan, adalah memprediksi segala konsekuensi yang mungkin terjadi bila ada perubahan penggunaan lahan.
3. Kesesuaian Lahan, Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini (kesesuaian lahan aktual) atau setelah diadakan perbaikan (kesesuaian lahan potensial).
4. Alih Fungsi Lahan disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang bisa berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.
5. Pengendalian lahan adalah proses pengawasan, perbandingan dan perbaikan kinerja. Sebagai langkah terakhir dari proses manajemen, pengendalian memberikan kaitannya kembali ke perencanaan. Jika manajer tidak mengendalikan, manajer tidak akan mengetahui apakah tujuannya telah tercapai.
6. Pemanfaatan lahan adalah proses, cara, perbuatan yang menjadikan lahan mendapat nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan lahan.
7. Penggunaan Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik merupakan bentukan maupun buatan manusia (Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Penatagunaan Tanah).

8. Pemilikan lahan adalah hubungan hukum antara perorang, kelompok orang, atau badan hukum yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan baik yang sudah terdaftar (sertifikat HAT) maupun yang belum terdaftar. (Juklak IP4T 2013)
9. Lahan sawah adalah Lahan pertanian yang secara fisik berpermukaan rata, dibatasi oleh pematang, serta dapat ditanami padi, palawija dan tanaman lainnya. Alih fungsi tanah adalah perubahan penggunaan lahan .
10. Alih fungsi lahan sawah adalah perubahan penggunaan dan pemanfaatan lahan sawah menjadi bukan lahan sawah baik secara tetap maupun sementara.
11. KP2B Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) yang dimaksudkan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B dari konversi lahan pertanian dan menyelamatkan lahan pertanian.
12. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Gowa

##### 1. Aspek Fisik Dasar

###### 1) Wilayah Administrasi

Kabupaten Gowa terletak di bagian Selatan dari provinsi Sulawesi Selatan, dimana ibukotanya adalah Kota Sungguminasa. Berdasarkan letak astronomi, Kabupaten Gowa berada pada  $12^{\circ}.33,19'$  -  $13^{\circ}.15,17'$  Bujur Timur dan  $50.5 - 50.34,7'$  Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah  $1.883,33 \text{ Km}^2$ .

Wilayah Kabupaten Gowa terletak pada ketinggian 0 – 2800 m diatas permukaan laut, berada pada jarak  $\pm 10 \text{ Km}$  dari Kota Makassar. Dari segi morfologis Kabupaten Gowa dibagi menjadi 3 wilayah yaitu : morfologi dataran rendah di bagian Barat, perbukitan di tengah dan pegunungan di bagian Timur– Selatan. Kabupaten Gowa beriklim cukup basah dan kering dengan curah hujan rata-rata 1.000 - 4.000 mm. Temperatur relatif tinggi sepanjang tahun, yaitu antara 220 – 260 pada daerah dataran rendah dan 180 – 210 pada daerah dataran tinggi. Batas administrasi dan batas fisik Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Manggala Kota Makassar dan Kabupaten Maros
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Bulukumba.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.

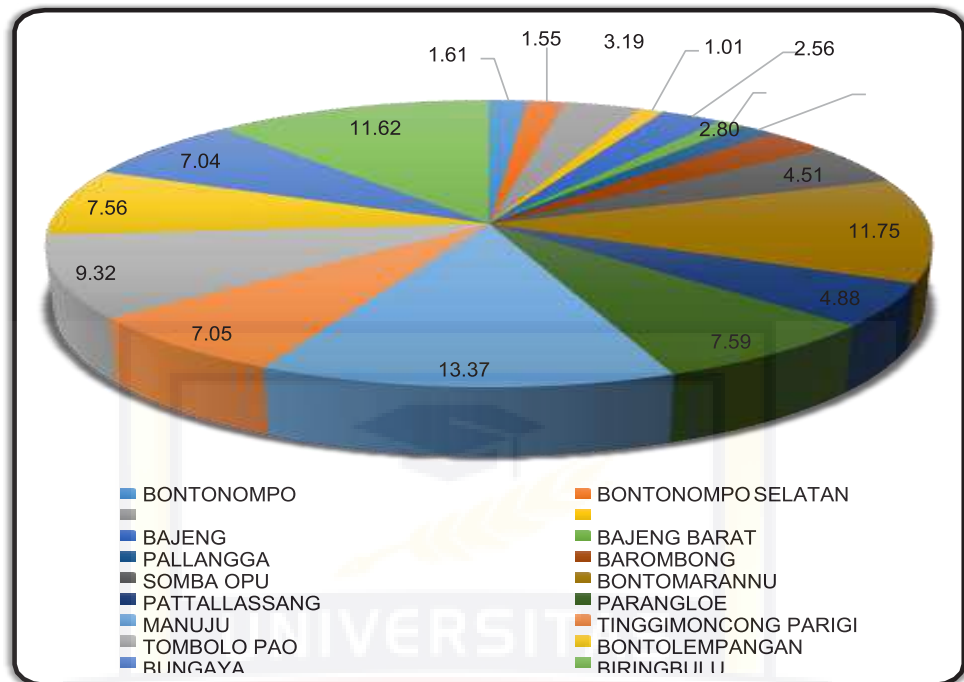
Secara Administratif Luas wilayah Kabupaten Gowa sebesar 1.883,33 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 18 (Delapan Belas) Kecamatan dan 167 Desa/ Kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1 peta administrasi dan tabel 4.1.



**Tabel 4.1**  
Luas Wilayah Kabupaten Gowa Dirinci Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	Bontonompo	30,39	1,61	14
2	Bontonompo Selatan	29,24	1,55	9
3	Bajeng	60,09	3,19	14
4	Bajeng Barat	19,04	1,01	7
5	Pallangga	48,24	2,56	16
6	Barombong	20,67	1,1	7
7	Somba Opu	28,09	1,49	14
8	Bontomarannu	52,63	2,8	9
9	Pattallassang	84,96	4,51	8
10	Parangloe	221,26	11,75	7
11	Manuju	91,9	4,88	7
12	Tinggimoncong	142,87	7,59	7
13	Tombolo Pao	251,82	13,37	9
14	Parigi	132,76	7,05	5
15	Bungaya	175,53	9,32	7
16	Bontolempangan	142,64	7,56	8
17	Tompobulu	132,54	7,04	8
18	Biringbulu	218,84	11,62	11
<b>Jumlah</b>		<b>1883,33</b>	<b>100</b>	<b>167</b>

*Sumber : Bps Kabupaten Gowa Dalam Angka Tahun 2022*



**Gambar 4.2 Luas Daerah Menurut Kecamatan (%)**

Sumber : Bps Kabupaten Gowa Dalam Angka Tahun 2022

## 2) Topografi

Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 %. Ada 8 wilayah Kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggi Moncong, Tombolo Pao, Bungaya, Bontolempangan, Tompo Bulu dan Biring Bulu. Kondisi topografi atau ketinggian tempat di Kabupaten Gowa cukup bervariasi antara 0 sampai 2800 meter dari permukaan laut (mdpl).

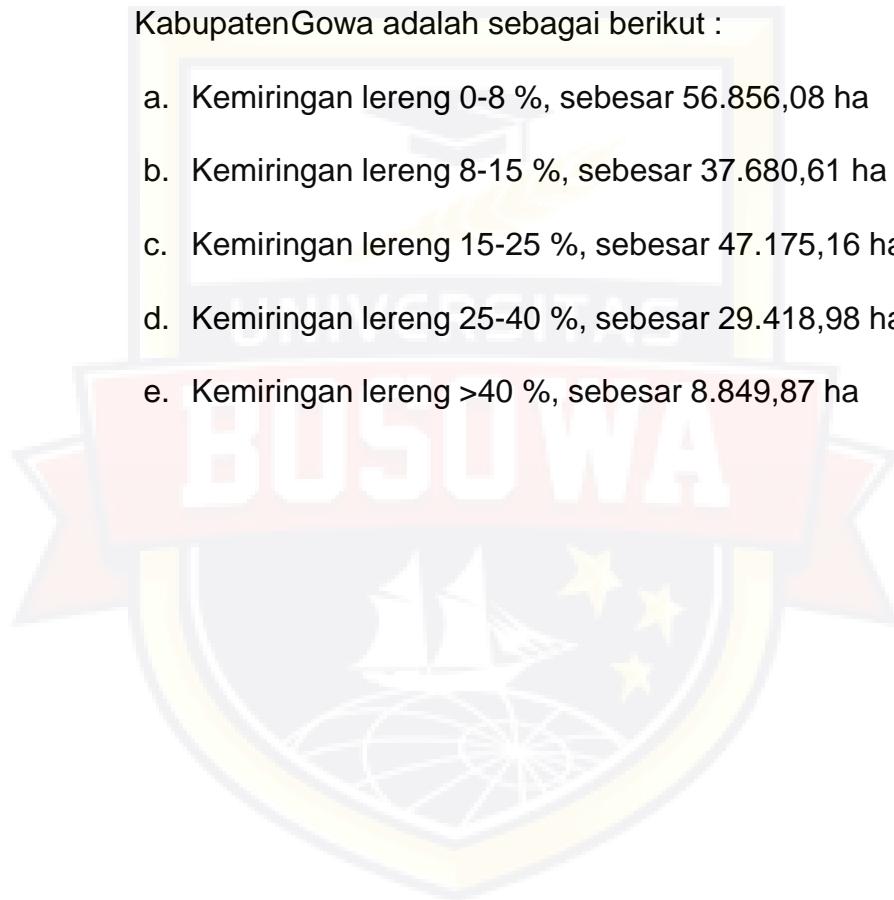
## 3) Kemiringan Lereng

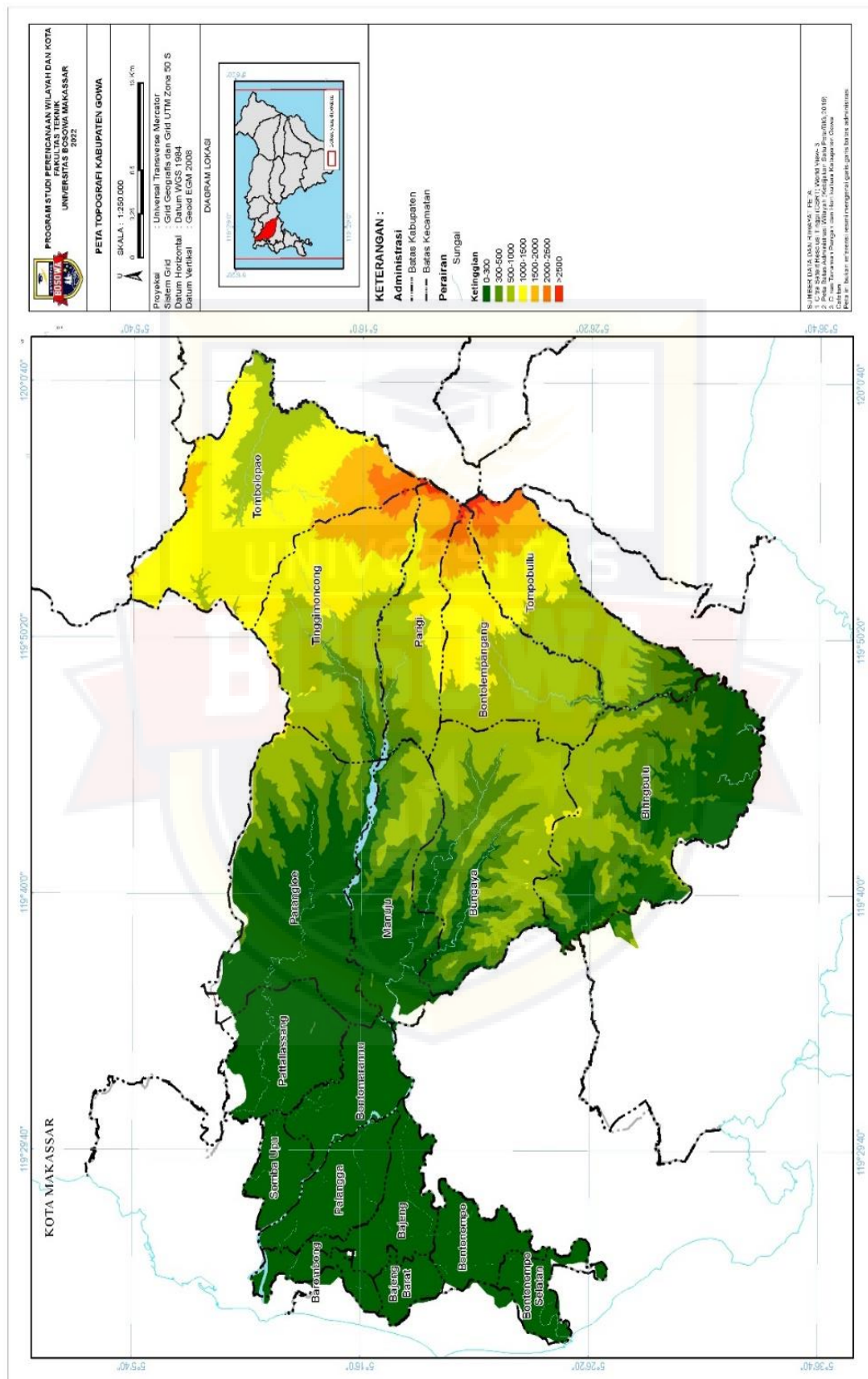
Kabupaten Gowa memiliki kemiringan lereng yang



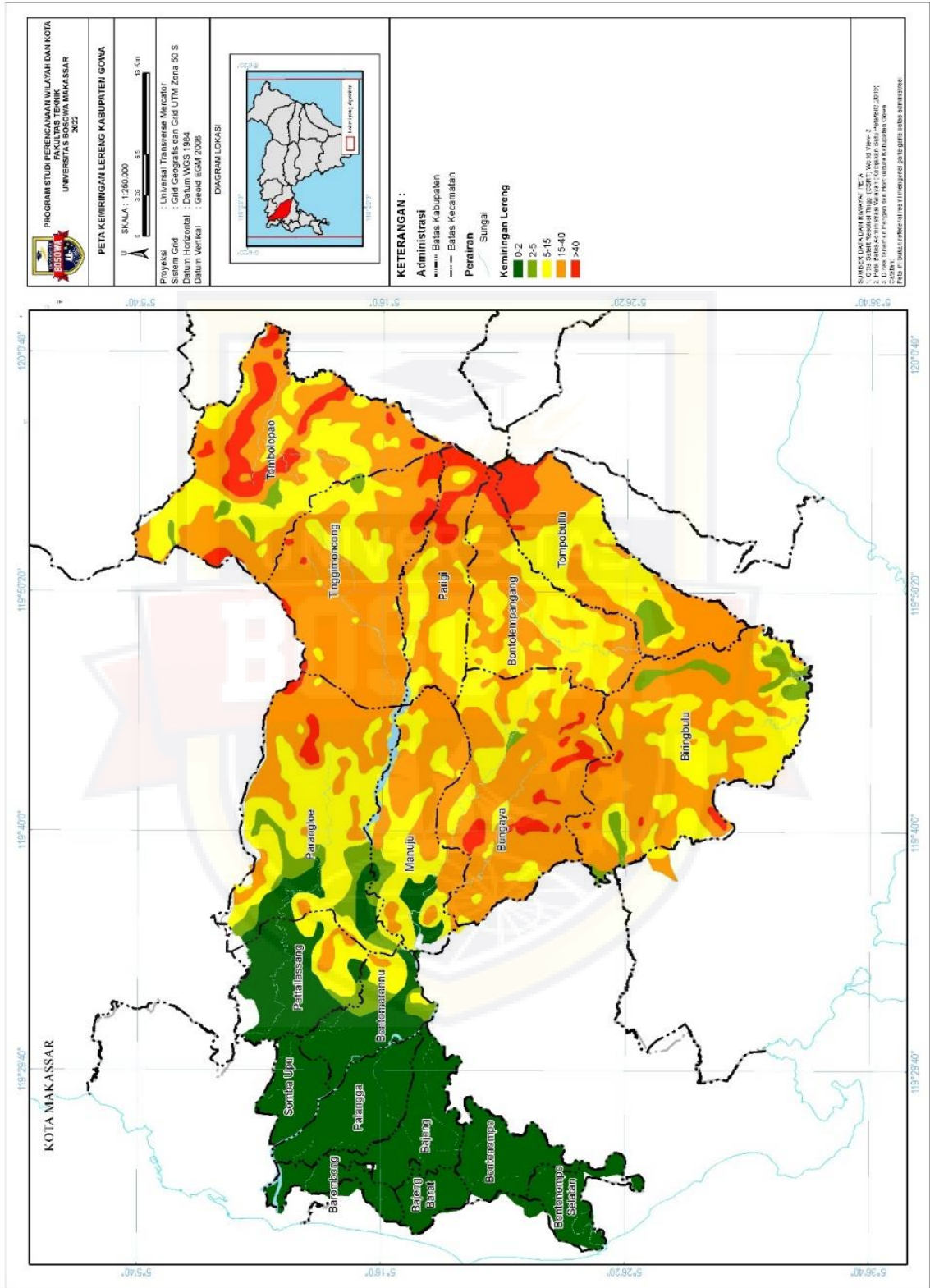
bervariatif mulai dari daerah landai bergelombang dan sangat curam. Beberapa Wilayah Kecamatan dengan kategori sangat curam adalah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Secara umum, tingkat kemiringan lereng di KabupatenGowa adalah sebagai berikut :

- a. Kemiringan lereng 0-8 %, sebesar 56.856,08 ha
- b. Kemiringan lereng 8-15 %, sebesar 37.680,61 ha
- c. Kemiringan lereng 15-25 %, sebesar 47.175,16 ha
- d. Kemiringan lereng 25-40 %, sebesar 29.418,98 ha
- e. Kemiringan lereng >40 %, sebesar 8.849,87 ha





Gambar 4.3 Peta Topografi



Gambar 4.4 Peta Kemiringan Lereng

#### 4) Jenis Tanah

Jenis tanah di kabupaten Gowa diklasifikasikan dalam: 4 (empat) tipe:

- a. Alluvial Muda merupakan endapan aluvium (endapan aluvial sungai, pantai dan rawa) yang berumur kuartar (resen) dan menempati daerah morfologi pedataran dengan ketinggian 0-60 m dengan sudut kemiringan lereng  $<3\%$ . Tekstur beraneka mulai dari ukuran lempung, lanau, pasir, lumpur, kerikil, hingga kerakal, dengan tingkat kesuburan yang tinggi.
- b. Regosol adalah tanah hasil lapukan dari batuan gunungapi dan menempati daerah perbukitan vulkanik, dengan ketinggian 110 - 1.540 m dengan sudut kemiringan lereng  $>15\%$ . Sifat-sifat fisiknya berwarna coklat hingga kemerahan, berukuran lempung lanauan – pasir lempungan, plastisitas sedang, agak padu, tebal 0,1-2,0 m.
- c. Litosol merupakan tanah mineral hasil pelapukan batuan induk, berupa batuan beku (intrusi) dan/atau batuan sedimen yang menempati daerah perbukitan intrusi dengan ketinggian 3-1.150 m dan sudut lereng  $<70\%$ . Kenampakan sifat fisik berwarna coklat kemerahan, berukuran lempung, lempung lanauan,

hingga pasirlempungan, plastisitas sedang-tinggi, agak padu, solum dangkal, tebal 0,2-4,5 m.

- d. Mediteran merupakan tanah yang berasal dari pelapukan batugamping yang menempati daerah perbukitan karst, dengan ketinggian 8-750 m dan sudut lereng > 70%. Kenampakan fisik yang terlihat berwarna coklat kehitaman, berukuran lempung pasiran, plastisitas sedang-tinggi, agak padu, permeabilitas sedang, rentan erosi, tebal 0,1-1,5 m.

## 5) Hidrologi

Keadaan Hidrologi di Kabupaten Gowa umumnya dipengaruhi oleh sumber air yang berasal dari Sungai Saddang dan anak sungai sertamata air dengan debit yang bervariasi. Hulu Sungai Saddang yang merupakan sungai terpanjang di Sulawesi Selatan merupakan satu daerah aliran sungai (DAS) Jeneberang berada di Kabupaten Gowa merupakan sumber air bersih dan pertanian di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar. Daerah aliran sungai (DAS) lain adalah Je'netallasa, Pa'bundukang, Malino, Cadika, Pallappakang. Anak sungai-sungai ini berlanjut ke sungai yang akhirnya bermuara ke Samudra Indonesia ataupun selat Makassar. Kondisi hidrologi Kabupaten Gowa secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Air tanah, air tanah pada umumnya terdapat pada kedalaman 40 - 100 meter.
- b. Air permukaan, air permukaan pada umumnya berupa sungai dan genangan – genangan. Potensi sumberdaya air di Kabupaten Gowa selain dipengaruhi oleh kondisi klimatologi wilayah, juga dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai yang melintas pada beberapa kawasan. Potensi sumberdaya air tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan sumber air baku untuk kebutuhan lainnya. Potensi sumberdaya air di wilayah Kabupaten Gowa yang telah dimanfaatkan oleh penduduk dalam kehidupan kesehariannya untuk berbagai keperluan bersumber dari air tanah dangkal (air permukaan dan air tanah dalam air tanah dangkal/permukaan dapat berupa air sungai, sumur, rawa-rawa, bendungan, mata air dan lain sebagainya, sedangkan potensi air tanah dalam dengan pemanfaatan air melalui pengeboran.

Penyediaan air minum merupakan suatu kebutuhan pokok penduduk di suatu daerah, terutama pada daerah-daerah yang potensi air tanahnya terbatas dan kualitasnya kurang memadai jika ditinjau dari aspek kesehatan. Meskipun demikian, pengadaan air minum

masih terbatas dan umumnya penduduk menggunakan sumur air tanah dangkal, dalam (*artesis*), air permukaan dan mata air yang bersumber dari pegunungan.

- c. Peruntukan Air, yakni sungai sebagai sumberdaya air yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan yakni kebutuhan air bersih dan kepentingan pertanian (irigasi), dengan keberadaan beberapa sungai menurut Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Gowa. Berdasarkan pada kajian potensi sumberdaya air maka daerah Kabupaten Gowa terdapat beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, masing-masing terdiri dari DAS Je'neberang, je'netalasa, Pa'bundukang, Malino, Candika dan Pallappakang. Di luar dari enam DAS ini terdapat juga beberapa DAS kecil lainnya yang umumnya hampir terdapat di seluruh wilayah pegunungan di pinggiran kawasan pantai. Air dari beberapa DAS kecil ini yang terletak di bagian Timur wilayah studi bermuara di laut Makassar.

- d. Sumberdaya Air Buatan

Sumberdaya air buatan di Kabupaten Gowa dimanfaatkan dengan membuat bendungan air yang antara lain berupa pembuatan 1 buah bendungan

yaitu bendungan Bili – Bili yang tercakup dalam wilayah kecamatan Bontomarannu. setelah itu dibangun pula beberapa bendungan / waduk Kecil sebagai aliran irigasi yang tersebar di beberapa kecamatan di area wilayah Kabupaten Gowa.

e. Daerah Resapan Air

Daerah resapan air yang ada di Wilayah Kabupaten Gowa terdapat pada beberapa wilayah kecamatan, seperti Kecamatan Parangloe, Sombaopu, Pallangga, Patallassang dan Bontomarannu. Daerah - daerah tersebut merupakan dataran rendah sehingga potensi resapan air pada wilayah tersebut cukup besar. Rawa dan Daerah Banjir

Wilayah Kabupaten Gowa yang terdiri dari wilayah dataran tinggi dan dataran rendah serta daerah pesisir memiliki daerah - daerah rawa dan daerah rawan banjir. Pada umumnya daerah tersebut berada pada wilayah kecamatan yang berada di dataran rendah, seperti Kecamatan Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, Pallangga, Barombong, Sombaopu, Bontomarannu, Patallassang dan Parangloe.

## 6) Klimatologi

Wilayah Indonesia pada umumnya mengenal dua



musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Lama dan bulan jatuhnya awal setiap musim sangat bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain. November sampai Maret angin bertiup sangat banyak mengandung uap air yang berasal dari Benua Asia dan Samudera Pasifik sehingga pada bulan – bulan tersebut terjadi musim hujan.

#### **7) Iklim, Suhu Udara dan Curah Hujan**

Kabupaten Gowa dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dimulai pada bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan Oktober-November.

Berdasarkan data curah hujan tertinggi yang di pantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan seperti stasiun Geofisika Gowa dan BPP Limbung terjadi pada bulan Januari yang mencapai rata- rata 470 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli-Agustus yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan. Keadaan yang mempengaruhi iklim suatu daerah adalah suhu, kelembaban, arah angin dan kondisi cuaca pada saat

tertentu.

Pada umumnya Kabupaten Gowa mempunyai iklim tropis basah. Curah hujan dan hari hujan menunjukkan curah hujan untuk daerah dataran rendah mempunyai variasi antara 500 - 1.000 mm/tahun sedangkan untuk daerah hulu (pegunungan) berkisar antara 1.000 - 2.000 mm/tahun.

Suhu Udara rata – rata tahunan di dataran rendah berkisar antara 25,50 C - 27,90 C, angka ini berkurang 0,60 C setiap kenaikan 100 meter. Curah Hujan dan hari hujan akan menentukan pula potensi air permukaan (air sungai) maupun ketersediaan air tanah (ground water) dapat digunakan sebagai data potensi air tanah dalam jika diperlukan untuk prasarana pengairan menggunakan sistem pompa air dalam.

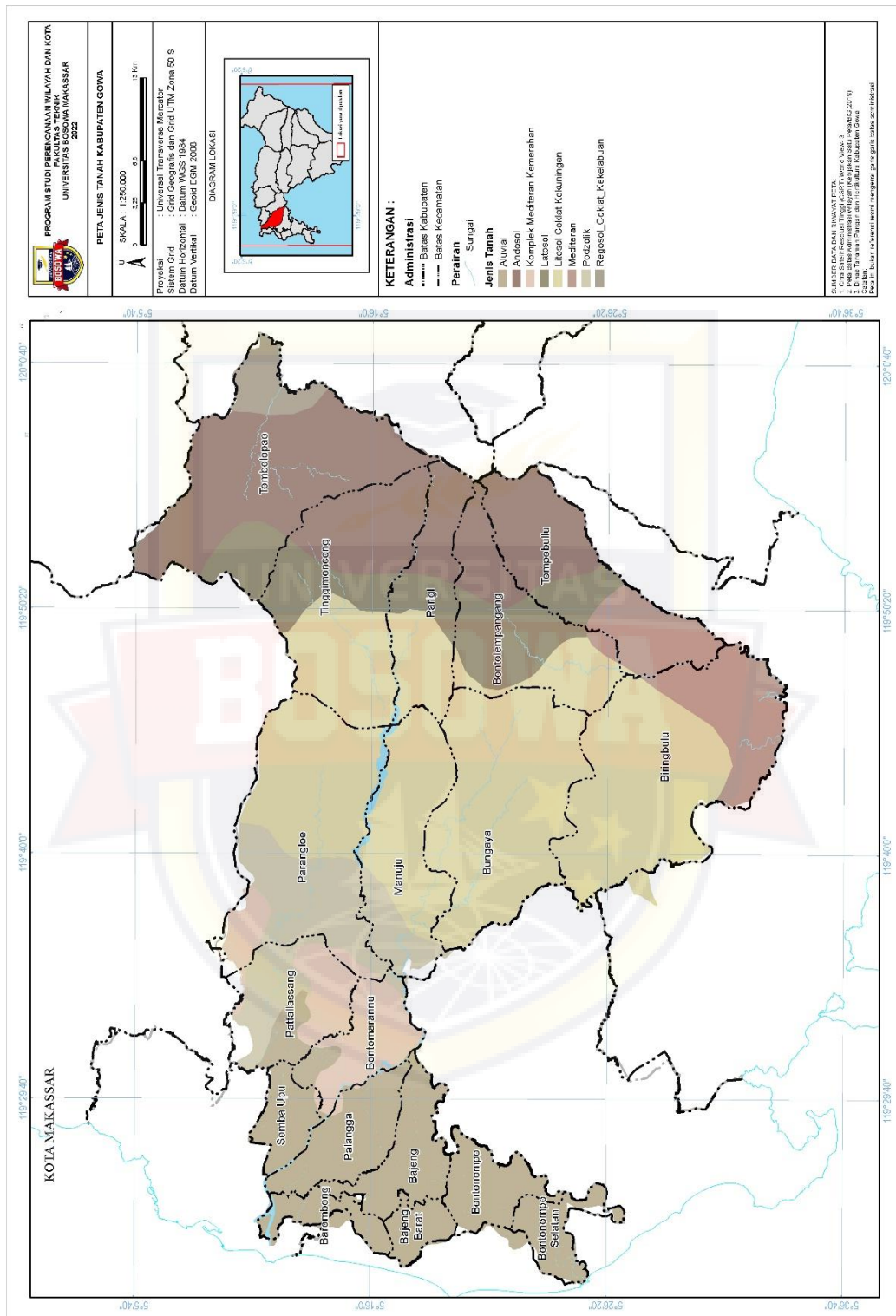
#### **8) Kelembapan**

Kelembaban udara dipengaruhi oleh keadaan ketinggian permukaan tanah, suhu udara dan kecepatan angin. Kelembaban udara di Kabupaten Gowa relatif bervariasi antara 78,8% sampai 85% tergantung dari lamanya penyinaran matahari yang bervariasi antara 5,2 sampai 8,5 jam/hari. Kelembaban udara berkisar antara 15 sampai

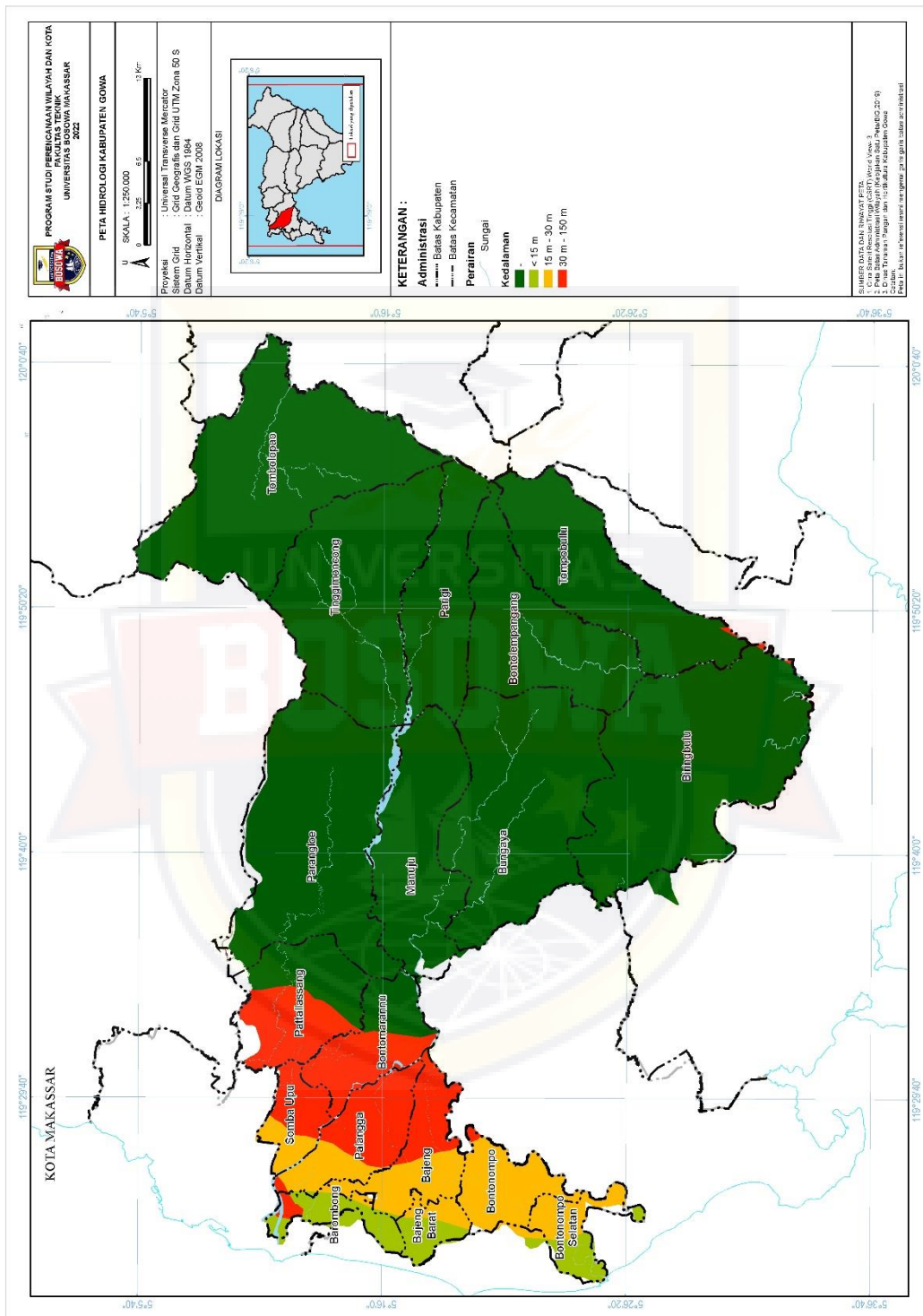
108 mmhg, kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Februari dengan jumlah hari hujan sebanyak 22 hari, sedangkan kelembaban terendah terjadi pada bulan Juli dan Agustus dengan jumlah hari hujan sebanyak 6 hari.

#### **9) Kecepatan dan Arah Angin**

Kecepatan angin berkisar antara 41,9 - 72 km/jam dalam keadaan normal. Angin bertiup dari laut ke daratan pada waktu pagi sampai sore hari dan pada malam hari angin darat mengarah ke laut. Cuaca di Kabupaten Gowa cepat berubah dari keadaan panas/kering menjadi mendung dan hujan. Kabupaten Gowa seakan – akan tidak mengenal musim kering yang berkepanjangan karena keadaan sehari-harinya sering terjadi hujan kiriman dan mendung secara mendadak dan hilang dengan cepat pula.



Gambar 4.5 Peta Jenis Tanah



**Gambar 4.6 Peta Hidrologi**

**Tabel 4.2 Kondisi Curah Hujan di Kabupaten Gowa Setiap Bulan**

No.	Bulan	Curah Hujan	Hari Hujan
1	Januari	839,9	30
2	Februari	397,0	20
3	Maret	626,3	23
4	April	294,0	11
5	Mei	78,1	11
6	Juni	87,0	14
7	Juli	77,3	9
8	Agustus	104,2	8
9	September	82,5	11
10	Oktober	245,4	17
11	Nopember	542,0	26
12	Desember	860,3	28
<b>Jumlah</b>		<b>4.234</b>	<b>208</b>

*Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka Tahun 2022*

## **B. Gambaran Umum Kawasan Penelitian**

### **1. Administrasi dan Letak Geografis**

Secara umum Luas wilayah Kecamatan Pallangga kurang lebih 48,24 Km<sup>2</sup> dan secara geografis berada di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Astronomis Kecamatan Pallangga yang merupakan bukan daerah pantai dari sebagian besar bentuk dataran. Dari topografi dataran rendah dengan rata-rata ketinggian 400-500 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Pallangga satu dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa. Batas Administrasi dapat berbatasan langsung dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan SombaOpu
- Sebelah Selatan : Kecamatan Bajeng
- Sebelah Barat : Kecamatan Barombong, dan
- Sebelah Timur : Kecamatan Bontomarannu

Berikut merupakan luas wilayah Kelurahan / Desa yang ada di Kecamatan Pallangga lebih jelasnya disajikan dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel 4.3 Luas Kelurahan / Desa dari Kecamatan Pallangga pada Tahun 2022**

No.	Kelurahan/Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )
1.	Jenetallasa	3,22
2.	Tetebatu	2,51
3.	Bungaejaya	3,02
4.	Pallangga	4,07
5.	Panakukang	1,69
6.	Julukanaya	3,08
7.	Julubori	4,37
8.	Julupamai	2,70
9.	Bontoramba	6,09
10.	Kampili	5,35
11.	Toddotoa	3,08
12.	Parangbanoa	2,15
13.	Pangkabinanga	1,89
14.	Bontoala	1,25
15.	Mangalli	1,50
16.	Taeng	2,27
<b>Luas Wilayah</b>		<b>48,24</b>

*Sumber : BPS Kecamatan Pallangga Tahun 2021*

Berdasarkan dari posisi dan letak geografis wilayah dan administrasi, Kecamatan Pallangga salah satu yang termasuk wilayah PKN dalam konteks Mamminasata dalam RTRW Prrovinsi Sulawesi Selatan dan Kecamatan Pallangga mempunyai 16 Kelurahan / Desa yang terluas berada di Kelurahan Bontoramba dengan luas wilayah 6.09 km<sup>2</sup>. Kemudian untuk Kelurahan / Desa yang luas wilayahnya terkecil berada di Desa Bontoala 1,25 km<sup>2</sup>. Ibukota Kecamatan Pallangga adalah Mangalli dan untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 4.9.

### **C. Kondisi Fisik Wilayah**

#### **1) Topografi**

Keadaan yang menggambarkan kemiringan lahan, atau kontur lahan, semakin besar kontur lahan berarti lahan tersebut memiliki kemiringan lereng yang semakin besar. Menurut Suparno dan Marlina Endy (2005:139). Serta Garis Kontur memiliki beberapa karekteristik, diantaranya yaitu :

- Garis kontur selalu bersifat horizontal, tidak bercabang dan tidak berpotongan.
- Garis kontur yang rapat menunjukkan kemiringan lereng curam, sedangkan kontur yang renggang menunjukkan kemiringan lereng landai.



- Garis kontur bertanda huruf U selalu menunjukkan punggung pegunungan atau gunung.
- Garis kontur yang bertanda huruf V selalu menandakan suatu lembah atau jurang.
- Garis kontur berbentuk kurva tertutup.

Secara topografi wilayah Kecamatan Pallangga merupakan wilayah pesisir pantai. Dengan tinggi tempat dari permukaan laut 10 meter diatas permukaan laut, kemiringan lereng relatif datar datar yaitu 0-3 (5 m) % – 5-8 (5-10 m) %. Berdasarkan dari kondisi topografi yang dimiliki oleh Kecamatan Pallangga tersebut, dapat diketahui kawasannya memiliki daya dukung lahan yang cukup baik, karena kurangnya penghambat sehingga sangat sesuai untuk lahan terbangun. Hal inilah yang menyebabkan tingginya pembangunan perumahan dan permukiman sehingga terjadi perubahan pemanfaatan lahan dari lahan pertanian menjadi permukiman.

## 2) Hidrologi

Potensi sumber daya air yang ada di Kecamatan Pallangga dapat dikelompokkan menjadi air tanah dan air permukaan. Air permukaan yang ada di Kecamatan Pallangga bersumber dari Sungai Jeneberang yang memiliki kecepatan arus sungai sebesar 0,3 m/s. Potensi sumber daya air yang besar di tunjang dengan

kondisi tanah yang baik sebenarnya sangat sesuai untuk pengembangan dan pemanfaatan lahan pertanian, namun disini lain potensi sumber daya air juga menjadi kebutuhan air bersih bagi masyarakat sehingga hal ini juga menjadi pemicu perubahan pemanfaatan lahan di Kecamatan Pallangga.

Apabila ditinjau dari tingkat kerawanan banjir, maka di Kecamatan Pallangga tidak ada wilayah yang termasuk dalam kategori daerah banjir, sehingga dapat dikatakan bahwa kawasan ini bebas dari hambatan dan pengaruh banjir. Namun yang menjadi masalah adalah semakin berkurangnya lahan pertanian dan daerah resapan air akibat pembangunan yang pesat dapat menjadi penyebab terjadinya banjir apabila curah hujan tinggi.

### **3) Klimatologi**

Kecamatan Pallangga mempunyai Jumlah bulan hujan selama 6 bulan. Pada setiap tahunnya musim kemarau terjadi dari mulai bulan Juni – September, sedangkan musim hujan dimulai pada bulan Desember- Maret. Data Curah Hujan di Kecamatan Pallangga disesuaikan berdasarkan dengan data Curah hujan yang ada di Kabupaten Gowa (data makro) karena alasan bahwa Kecamatan Pallangga merupakan bagian wilayah Kabupaten Gowa maka data curah hujan Kabupaten Gowa dijadikan juga sebagai patokan untuk data curah hujan Kecamatan Pallangga. Kondisi

curah hujan di Kabupaten Gowa oleh BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) Regional IV Sulawesi Selatan selama 10 tahun terakhir mencatat rata – rata perubahan curah hujan dengan rata-rata curah hujan di kisaran 150 – 300 mm/tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Pallangga memiliki curah hujan yang cukup merata di tiap tahunnya.

#### **D. Penggunaan Lahan Kawasan Penelitian**

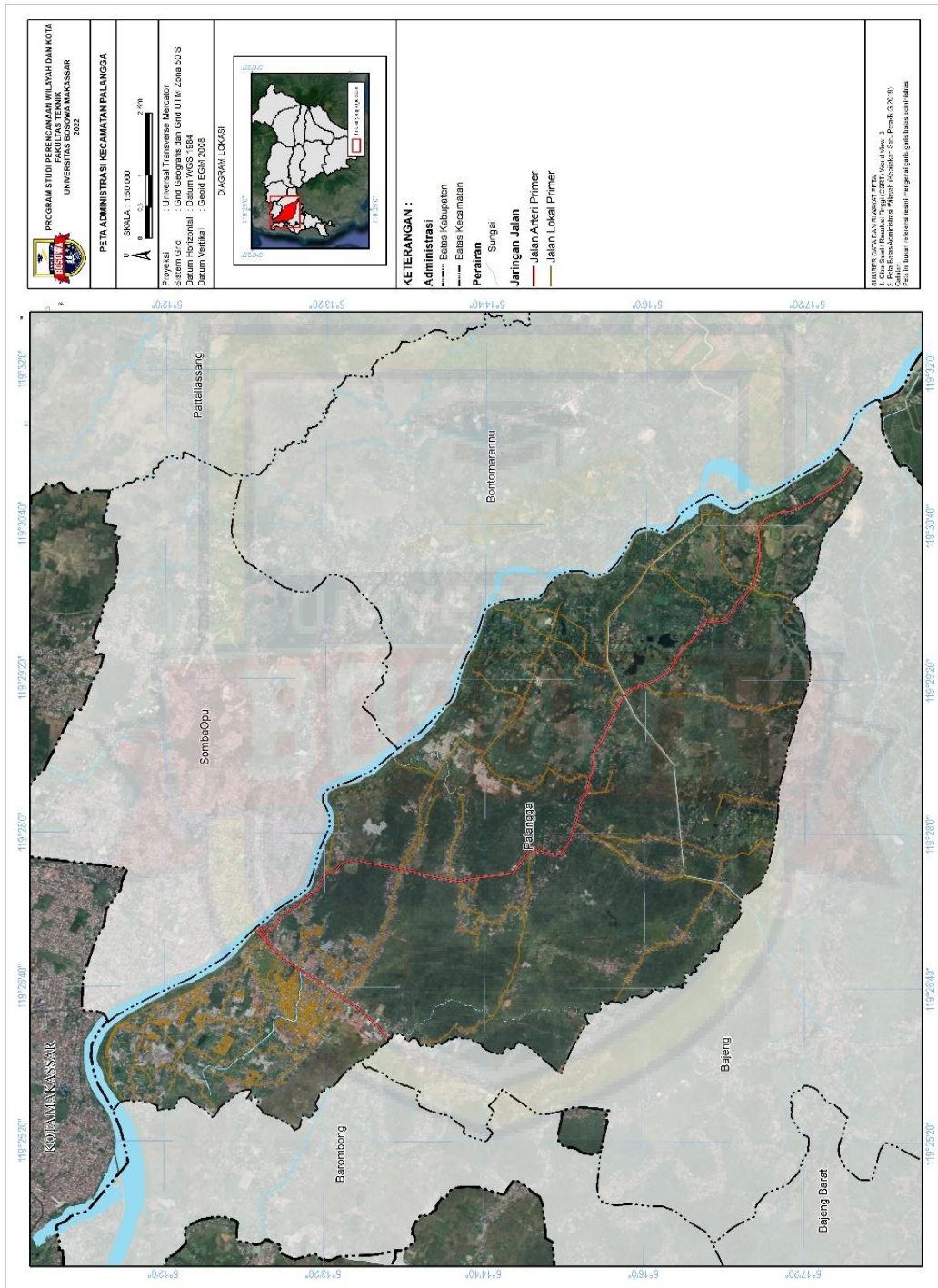
Penggunaan lahan yang meliputi persediaan, peruntukan dan penggunaan lahan serta pemeliharannya. Kecamatan Pallangga yang merupakan salah Kecamatan di Kabupaten Gowa. Dengan luas wilayahnya seluas 48,24 km<sup>2</sup>. Penggunaan lahan Kota juga akan terus mengalami perubahan seiringan dengan berkembangnya dan meningkatnya aktifitas manusia. Penggunaan lahan di Kecamatan dengan mulai meningkatnya oleh permukiman dan lahan persawahan mulai berkurang. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini

**Tabel 4.4**  
**Penggunaan Lahan di Kecamatan Pallangga**

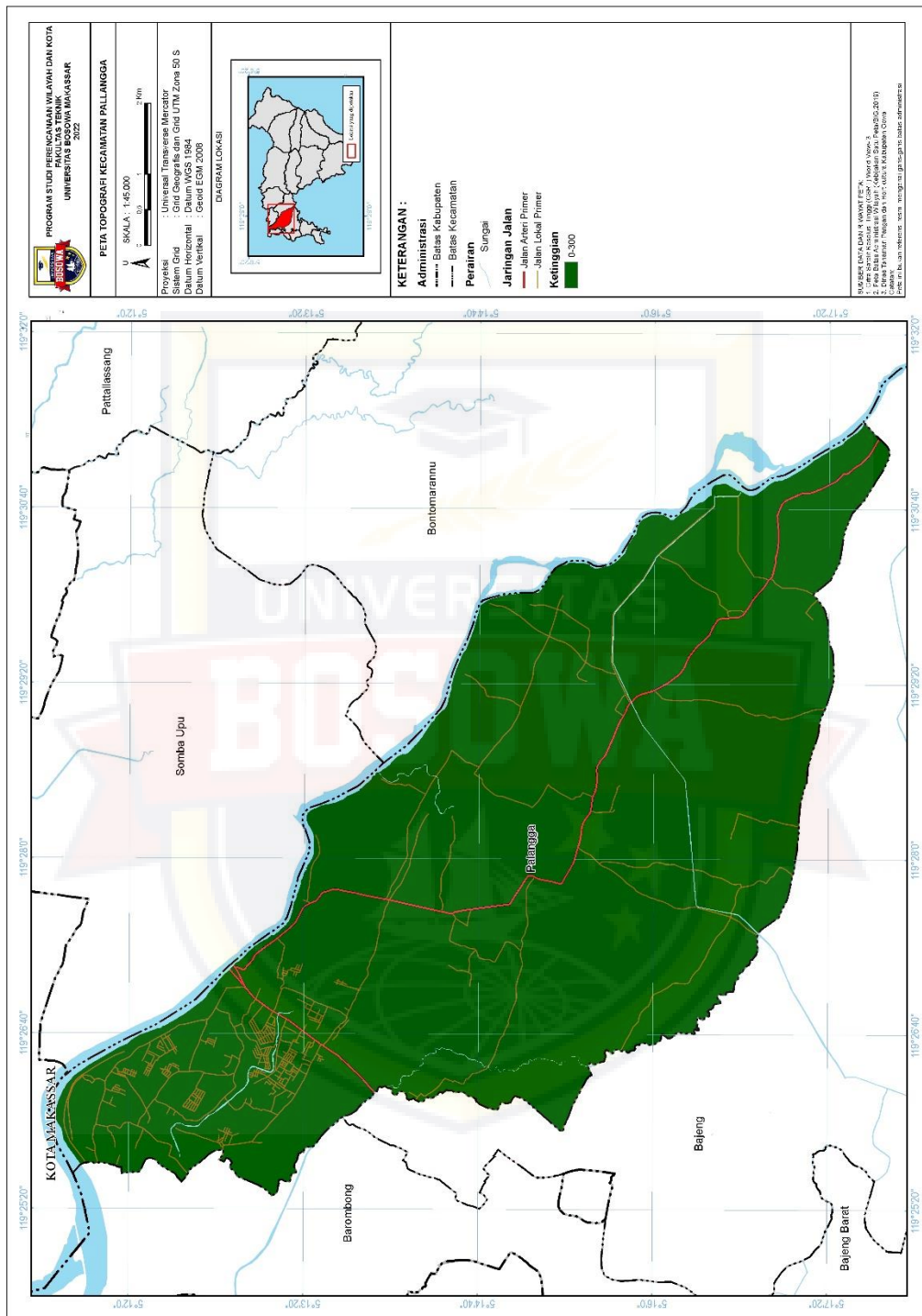
<b>N o.</b>	<b>Penggunaan Lahan</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Hutan	0,002	0,00%
2	Lahan kering (ladang/Tegal)	690,87 8	12,43%
3	Lahan Kosong	15,919	0,29%

4	Lapangan	3,574	0,06%
5	Pemakaman	0,204	0,00%
6	Perrmukiman	884,20 4	15,91%
7	Pertanian Lahan Kering	3737,9 40	67,26%
8	Rawa	61,117	1,10%
9	Semak Belukar	27,208	0,49%
10.	Sungai	136,41 4	2,45%
<b>Jumlah</b>		<b>5557,2 80</b>	<b>100%</b>

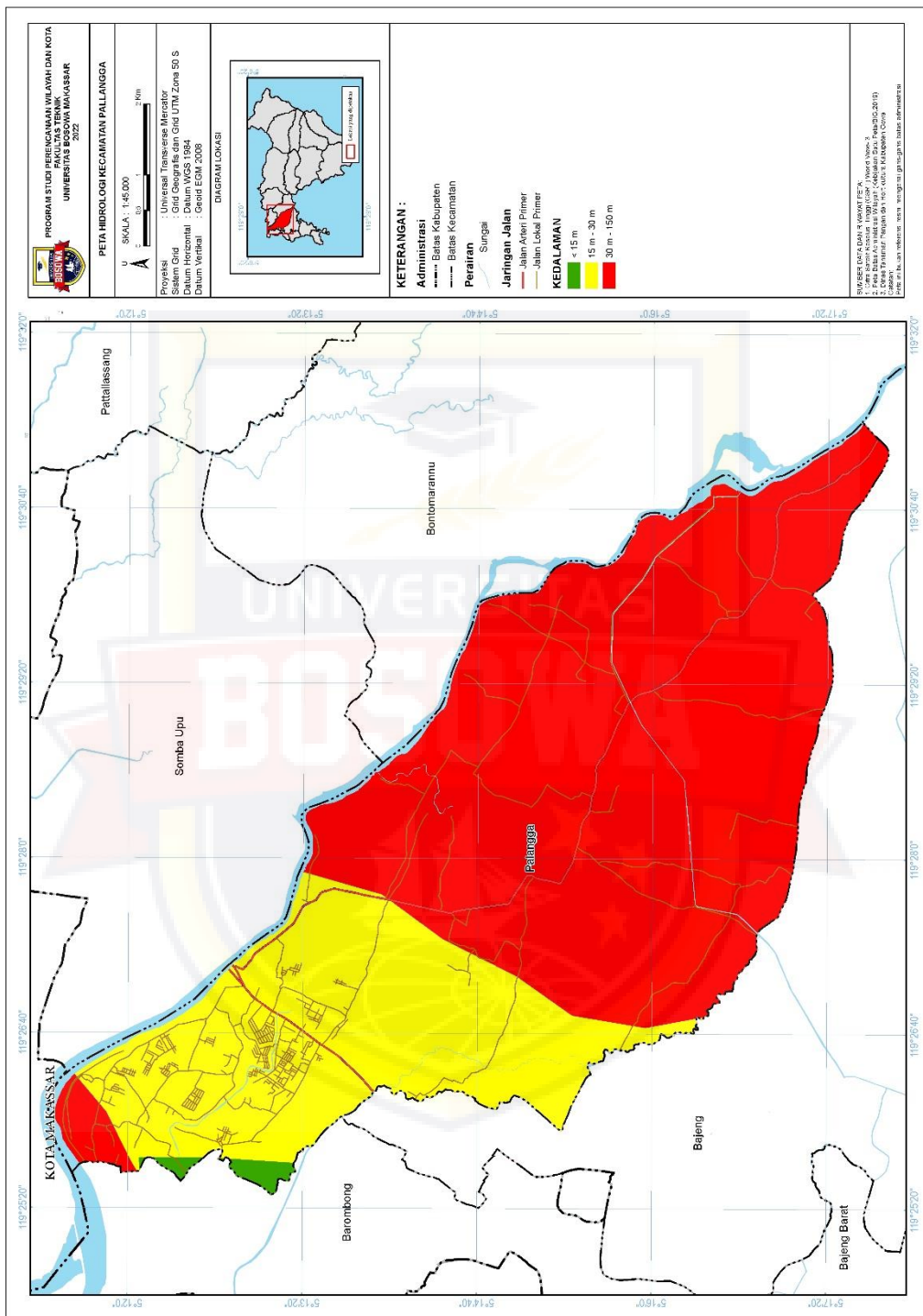
Berdasarkan dari data penggunaan lahan tersebut diketahui penggunaan lahan di Kecamatan Pallangga didominasi oleh lahan pertanian yaitu sawah lahan kering dengan luas 3737 Ha atau 67,26% dari luas keseluruhan dan untuk lahan kering seperti ladang/tegal 690 Ha atau 12,43%. Rawa memiliki luas 61 Ha atau 1% dan penggunaan lahan permukiman memiliki luas 884 Ha, semak belukar dengan luas 27,208 Ha atau 0,49%, lahan kosong dengan luas sebesar 15 Ha atau 0,29% , pemakaman memiliki luas 0,2 Ha atau 0,004%, sedangkan sungai luasnya 136 Ha atau 2,45% dan hutan yang memiliki luas paling kecil yaitu 0,2 Ha atau 0,1% dari luas keseluruhan.



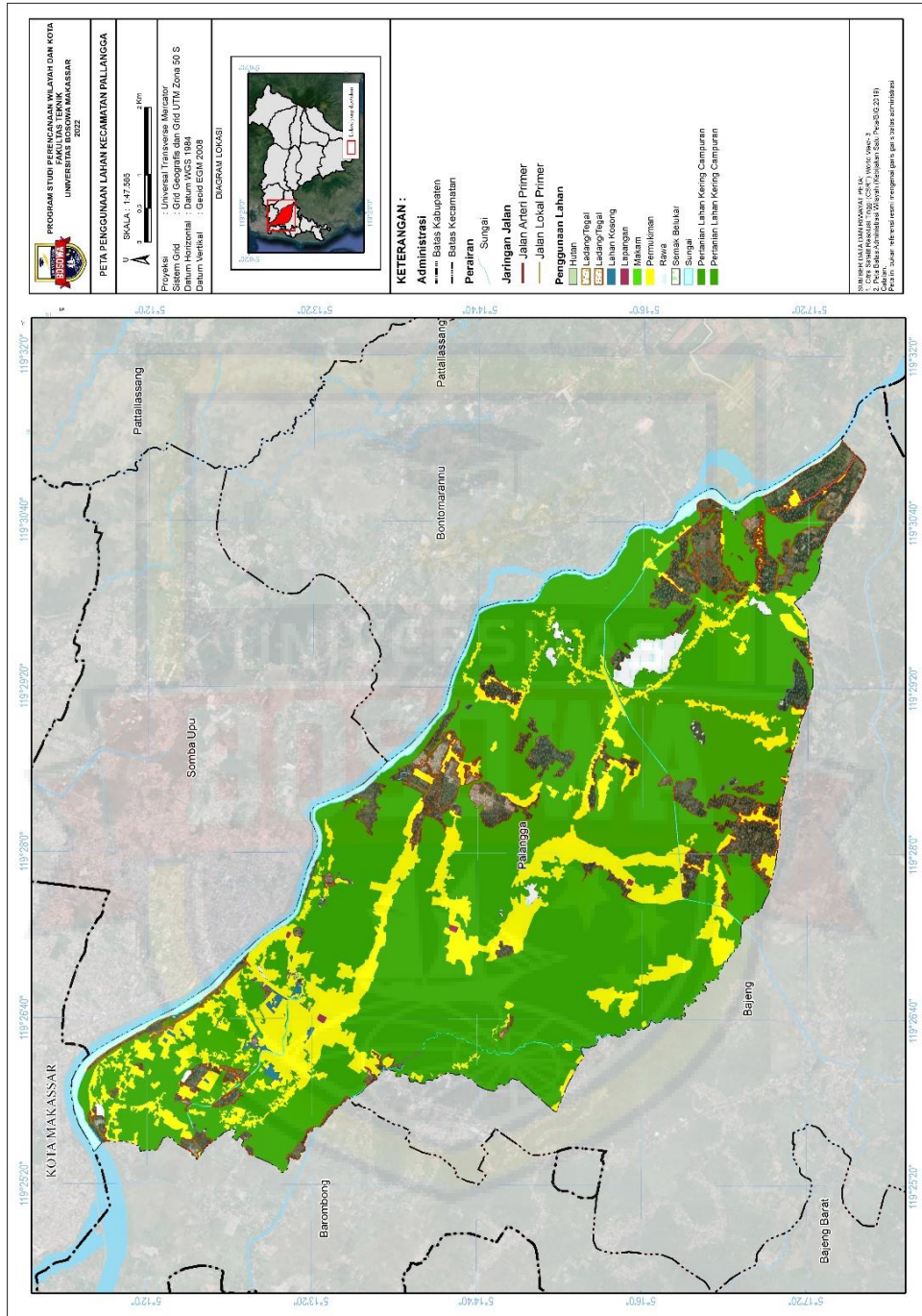
**Gambar 4.7 Peta Administrasi Kecamatan Pallangga**



Gambar 4.8 Peta Topografi



**Gambar 4.9 Peta Hidrologi**



**Gambar 4.10 Peta Penggunaan Lahan**



## E. Demografi

### 1. Jumlah dan Perkembangan Kependudukan

Perkembangan jumlah penduduk di Kecamatan Pallangga dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Kecamatan Pallangga hanya berjumlah 117.115 jiwa dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dan penurunan jumlah penduduk hingga 127.837 jiwa. Mengenai jumlah penduduk di Kecamatan Pallangga bisa dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini.

**Tabel 4.5 Laju Pertumbuhan dan Laju Penduduk Kecamatan Pallangga 2015 – 2020**

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Pertambahan
1.	2015	117.115	-
2.	2016	120.780	3.665
3.	2017	122.752	1.972
4.	2018	126.334	3.582
5.	2019	129.957	3.623
6.	2020	127.837	2.120

*Sumber : BPS Kecamatan Pallangga Tahun 2021*

Pertumbuhan penduduk yang ada di Kecamatan Pallangga yang paling tinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu dengan pertambahan hingga 3.665 jiwa. Bisa kita lihat pada grafik 4.1 di bawah ini.

**Grafik 4.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Pallangga pada tahun 2015 – 2020**



Pada grafik diatas yang menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Pallangga, Jumlah penduduk yang mengalami peningkatan pada tahun 2019 dengan jumlah 129.957 jiwa dan mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk 127.837 jiwa.

## **2. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Struktur penduduk menurut jenis kelamin merupakan perbandingan yang memperlihatkan selisih antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Berdasarkan sumber data yang diperoleh, dapat diuraikan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Pallangga pada tahun dari tahun 2015 – 2020 terdiri dari laki-laki sebanyak 368.517 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 376.831

jiwa, jadi total penduduk selama 5 tahun terakhir adalah 745.348 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, dapat dilihat bahwa penduduk untuk jenis kelamin perempuan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki – laki. Secara rinci penduduk menurut jenis kelamin diuraikan pada tabel 4.6 berikut.

**Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Pallangga Tahun 2015 – 2020**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah
	Laki – Laki	Perempuan	
2015	57.852	59.263	117.115
2016	59.694	61.086	120.780
2017	60.860	61.892	122.752
2018	62.507	63.827	126.334
2019	64.331	65.626	129.957
2020	63.517	64.320	127.837

Sumber : BPS Kecamatan Pallangga Dalam Angka Tahun 2011 – 2016

### 3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk yang ada di Kawasan Penelitian berdasarkan data dari BPS Kecamatan Pallangga dalam angka pada Tahun 2021, jumlah penduduk Kecamatan Pallangga pada Tahun 2020 sebanyak 127.837 jiwa, dan kepadatan penduduk yang tertinggi dari semua Kelurahan/ Desa yang ada di Kecamatan Pallangga yaitu Kelurahan dan kepadatan terendah berada di , dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.7 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan di  
Kecamatan Pallangga Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>Kelurahan/ Desa</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Luas Wilayah(Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km<sup>2</sup>)</b>
1	Jenetallasa	18.596	3,22	5.775
2	Tetebatu	6.788	2,51	2.704
3	Pallangga	6.695	3,02	1.645
4	Bungaejaya	3.462	4,07	1.146
5	Panakkukang	5.891	1,69	3.486
6	Julukanaya	5.150	3,08	1.672
7	Julubori	5.910	4,37	1.352
8	Julupamai	3.091	2,70	1.145
9	Bontoramba	4.903	6,09	805
10	Kampili	5.104	5,35	954
11	Toddotoa	3.596	3,08	1.168
12	Parangbanoa	4.139	2,15	1.925
13	Pangkabinanga	7.960	1,89	4.212
14	Bontoala	22.045	1,25	17.636
15	Mangalli	10.684	1,50	7.123
16	Taeng	13.823	2,27	6.089
<b>Jumlah</b>		<b>127.837</b>	<b>48,24</b>	<b>2.650</b>

*Sumber : BPS Kecamatan Pallangga Dalam Angka 2021*

#### **F. Aspek Sarana/Fasilitas**

- a. Fasilitas pemerintahan Fasilitas pemerintahan atau kantor pemerintahan yang ada di Kecamatan Pallangga antara lain kantor camat, kantor lurah, Kantor sektor kepolisian, kantor – kantor pemerintahan seperti, dinas pertanian, dinas PU, kantor peradilan negeri, dimana perkantoran tersebut melayani lingkup Kabupaten Maupun Kecamatan Pallangga.

b. Fasilitas perdagangan Fasilitas perdagangan merupakan tempat/wadah adanya terjadi negoisasi dalam rangka melangsungkan proses jual beli baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder penduduk. Adapun distribusi penyebaran fasilitas perdagangan yang ada di Kecamatan Pallangga terdiri dari pasar yang berada pada pusat kota pertokoan, kios dan warung kecil yang terletak di seluruh wilayah kelurahan.

**Tabel 4.8 Jumlah Sarana dan Prasana Perdagangan Menurut Per Kelurahan/ Desa di Kecamatan Pallangga Tahun 2020**

NO	Kelurahan / Desa	JENIS FASILITAS				
		Pasar dengan bangunan permanen	Pasar dengan bangunan semi permanen	Toko/ warung kelontong	Kedai / Warung Makan	Minimarket/ swalayan
1.	Jenetallasa	-	-	81	15	4
2.	Tetebatu	-	1	74	11	1
3.	Pallangga	-	1	56	12	-
4.	Bungaejaya	-	-	55	-	-
5.	Panakukang	-	-	52	26	-
6.	Julukanaya	-	-	25	42	-
7.	Julubori	-	1	25	15	-
8.	Julupamai	-	-	43	13	-
9.	Bontoramba	-	1	55	8	-
10.	Kampili	-	-	75	20	-
11.	Toddotoa	-	1	20	6	-
12.	Parangbanoa	-	-	15	4	-
13.	Pangkabinanga	-	-	51	5	-

NO	Kelurahan / Desa	JENIS FASILITAS				
		Pasar dengan bangunan permanen	Pasar dengan bangunan semi permanen	Toko/ warung kelontong	Kedai / Warung Makan	Minimarket/ swalayan
14.	Bontoala	-	-	600	13	4
15.	Mangalli	-	-	150	22	1
16.	Taeng	-	-	94	18	-
<b>Jumlah</b>		-	<b>5</b>	<b>1471</b>	<b>230</b>	<b>10</b>

Sumber : BPS Kecamatan Pallangga Dalam Angka 2021

c. Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan yang ada di Kecamatan Pallangga yaitu berupa Masjid dengan jumlah unit 155 unit, kemudian ada Musholla dengan 7 unit dibandingkan tempat ibadah lain hanya ada Masjid dan Musholla saja, dapat dilihat tabel di bawah ini.

**Tabel 4.9 Jumlah Sarana dan Prasana Peribadatan Menurut Per Kelurahan/ Desa di Kecamatan Pallangga Tahun 2020**

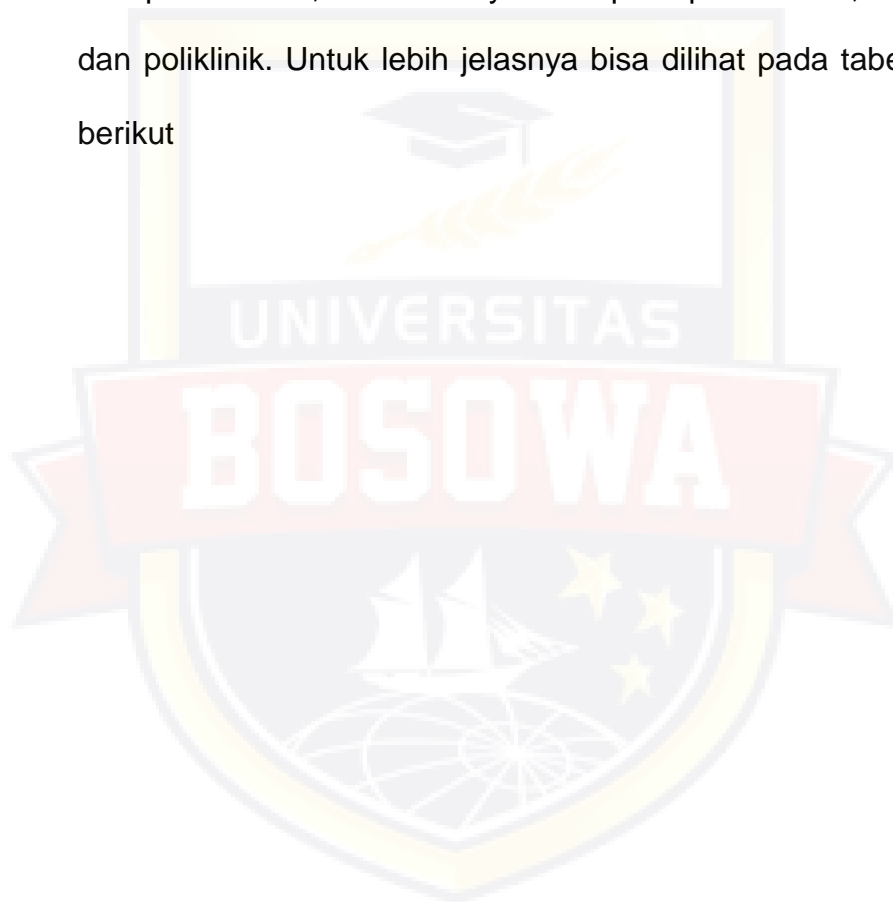
No.	Desa/Kelurahan	Mesjid	Surau/Mushollah	Gereja	Pura
1	Jenetallasa	21	2	-	-
2	Tetebatu	7	-	-	-
3	Pallangga	9	1	-	-
4	Bungaejaya	4	-	-	-
5	Panakkukang	9	1	-	-
6	Julukanaya	7	-	-	-
7	Julubori	8	-	-	-
8	Julupamai	7	-	-	-
9	Bontoramba	7	-	-	-
10	Kampili	8	-	-	-
11	Toddotoa	6	-	-	-
12	Parangbanoa	4	1	-	-
13	Pangkabinanga	9	-	-	-
14	Bontoala	28	-	-	-
15	Mangalli	11	-	-	-
16	Taeng	10	2	-	-

No.	Desa/Kelurahan	Mesjid	Surau/Mushollah	Gereja	Pura
<b>Jumlah</b>		<b>155</b>	<b>7</b>	-	-

Sumber : BPS Kecamatan Pallangga Dalam Angka 2021

d. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Pallangga cukup memadai, diantaranya terdapat puskesmas, Apotek, dan poliklinik. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 4.10 berikut



**Tabel 4.10 Jumlah Sarana dan Prasana Kesehatan Menurut Per Kelurahan/ Desa di Kecamatan Pallangga Tahun 2020**

<b>No.</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Rumah Bersalin</b>	<b>Puskesmas</b>	<b>Apotek</b>	<b>Poliklinik</b>
1	Jenetallasa	-	-	2	1
2	Tetebatu	-	-	2	-
3	Pallangga	-	-	-	-
4	Bungaejaya	-	-	-	-
5	Panakkukang	-	-	1	1
6	Julukanaya	-	-	-	-
7	Julubori	-	-	-	-
8	Julupamai	-	-	-	1
9	Bontoramba	-	-	-	-
10	Kampili	-	1	-	-
11	Toddotoa	-	-	-	-
12	Parangbanoa	-	-	-	-
13	Pangkabinanga	-	-	2	2
14	Bontoala	-	-	3	2
15	Mangalli	-	1	4	-
16	Taeng	-	-	1	-
	<b>Jumlah</b>	-	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>9</b>

*Sumber : BPS Kecamatan Pallangga Dalam Angka 2021*

e. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Pallangga terdiri dari TK, SD/Madrasah Ibtidayyah, SMP/Madrasah tsanawiyah, SMA/SMK/ Madrasah Aliyah, dan. Adapun jumlah fasilitas pendidikan SD/tsanawiyah lebih banyak dibandingkan jenjang pendidikan lainnya yaitu 38 unit SD dan 6 Madrasah Ibtidayyah. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada tabel 4.10 jumlah fasilitas pendidikan di Kecamatan Pallangga berikut.



**Tabel 4.11 Jumlah Sarana dan Prasana Pendidikan Menurut Per Kelurahan/ Desa di Kecamatan Pallangga Tahun 2020**

No.	Desa/Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA/SMK	Madrasah Ibtidayah	Madrasah Tsanawiah	Madrasah Aliyah
1	Jenetallasa	9	4	1	-	-	-	-
2	Tetebatu	4	1	-	-	-	-	-
3	Pallangga	2	3	-	-	1	1	1
4	Bungaejaya	2	1	-	-	-	-	-
5	Panakkukang	2	2	1	-	1	1	-
6	Julukanaya	4	2	-	-	1	1	-
7	Julubori	-	1	1	1	-	-	-
8	Julupamai	-	3	-	-	-	-	-
9	Bontoramba	-	3	1	-	-	1	-
10	Kampili	1	3	-	-	-	-	-
11	Toddotoa	-	2	-	-	-	-	-
12	Parangbanoa	2	2	-	-	-	-	-
13	Pangkabinanga	3	1	-	-	1	1	1
14	Bontoala	7	2	-	-	-	1	-
15	Mangalli	6	4	2	1	-	-	-
16	Taeng	4	4	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>46</b>	<b>38</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>

- Sumber : BPS Kecamatan Pallangga Dalam Angka 2021

f. Jaringan Jalan

Jaringan jalan yang ada di Kecamatan Pallangga merupakan salah satu jaringan jalan kolektor primer yang salah satu jaringan jalan provinsi di Kabupaten Gowa, saat ini kondisinya sudah terbilang baik, namun masih ada jaringan jalan yang kondisinya kurang bagus yaitu beberapa jalan yang menghubungkan antar ataupun ke desa atau kelurahan. Jadi, di Kecamatan Pallangga masih perlu adanya perbaikan atau peningkatan kualitas kondisi jaringan jalan dan jalur transportasi guna memperlancar laju pertumbuhan wilayah/kota

sehingga mendukung pertumbuhan ke wilayah sekitarnya

g. Jaringan Drainase

Prinsip dasar pembuangan/pengairan air hujan merupakan (permukaan) adalah bahwa air harus secepat mungkin dibuang dan secara terus menerus (Continue), serta dilakukan seekonomis mungkin. Dengan demikian, penyediaan saluran pembuangan merupakan usaha untuk mengatasi masalah banjir atau genangan air pada suatu kawasan. Jaringan drainase yang ada di Kecamatan Pallangga menggunakan saluran drainase terbuka yang mengikuti ruas jalan yang ada. kondisi jaringan drainase sudah baik tetapi masih ada beberapa jaringan drainase yang perlu diperbaiki guna mengantisipasi terjadinya air tersumbat ketika musim hujan.

h. Jaringan Air Bersih

Prasarana dan sarana air bersih merupakan suatu kebutuhan yang harus dikembangkan secara berkelanjutan untuk dapat melayani kebutuhan penduduk akan air minum yang merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Pelayanan air bersih saat ini masih belum optimal dalam artian belum semua jaringan jalan yang ada terdapat saluran air bersih, demikian pula belum semua rumah tangga dapat memanfaatkan air bersih yang pelayanannya dilakukan

oleh PDAM.

i. Jaringan Listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan primer, karena dengan listrik penduduk dapat meningkatkan produktivitasnya, misalnya dengan adanya penerangan lampu listrik penduduk dapat belajar di waktu malam hari, ronda/ siskamling malam hari termasuk perjalanan di malam hari, dengan adanya listrik penduduk juga dapat beraktivitas dengan baik dan dapat mengefisiensikan pekerjaan kantor dengan penggunaan komputernisasi dan peralatan lainnya yang menggunakan listrik.

**G. Persebaran Perubahan Pemanfaatan Lahan**

**1. Pola Perubahan Persebaran Pemanfaatan Lahan Pertanian Tahun 2019 dan 2022**

Variabel yang akan digunakan sistem superimpose peta eksisting pada penggunaan lahan di tahun 2019 dan 2022 untuk melihat perubahan pemanfaatan lahan yang menjadi kawasan permukiman dan perhitungan presentase luas perubahan pemanfaatan lahan pertanian. Berdasarkan dari hasil teknik superimpose pada Kawasan penelitian telah terjadi adanya perubahan pemanfaatan lahan pertanian dari tahun 2019 – 2022 sebesar Ha. Sehingga adanya perubahan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dari tahun 2019 – 2022 sebesar Ha. Bisa

dilihat dari luasan perubahan fungsi lahan pertanian pada tabel 4.12 di bawah ini.

**Tabel 4.12 Perubahan Luasan Pemanfaatan Lahan Pertanian dan Lahan Permukiman Pada Tahun 2019 – 2022**

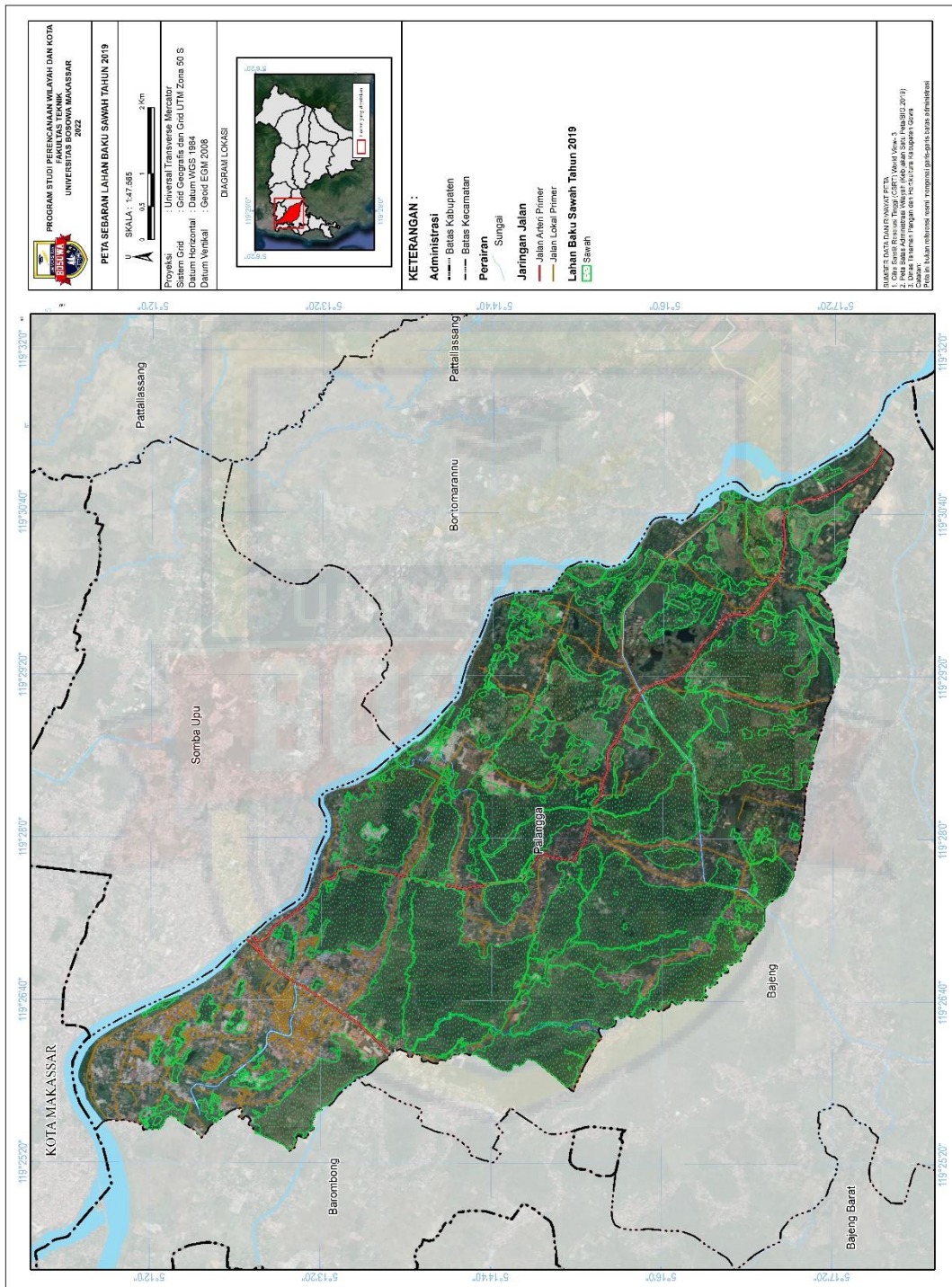
No	Pemanfaatan	Tahun 2019	Tahun 2022	Perubahan
		Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)
1	Lahan Pertanian	2.874,52	2.640,69	33,84
Jumlah				

*Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022*

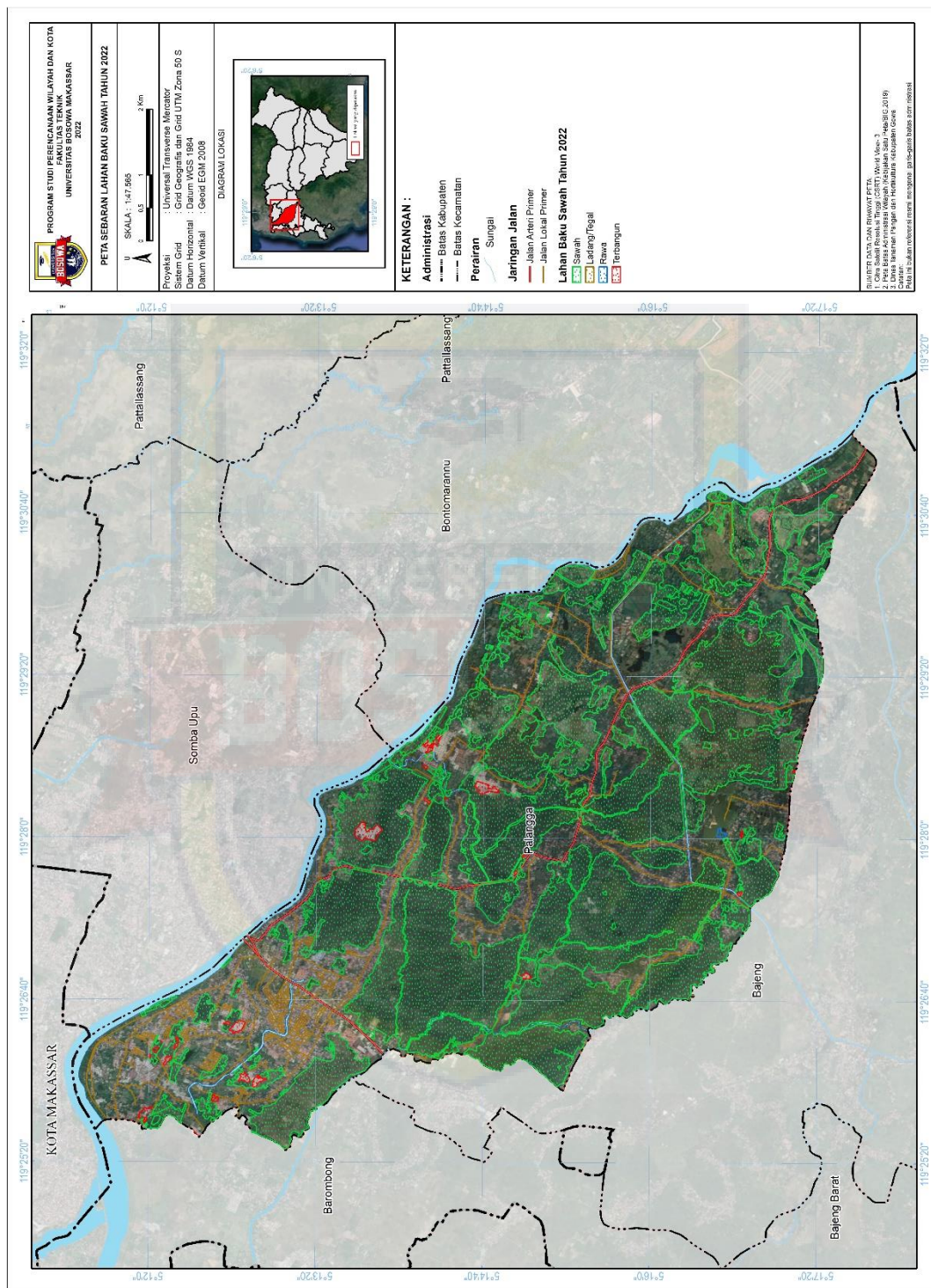
Berdasarkan dari hasil analisis superimpose (overlay) peta eksisting Penggunaan Lahan tahun 2019 dan 2022 di Kecamatan Pallangga, diperoleh dari hasil evaluasi perubahan pemanfaatan lahan sebagai berikut:

## **2. Pemanfaatan Lahan Pertanian**

Untuk penggunaan lahan pertanian dari hasil analisis menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan luasan lahan pertanian, dimana pada tahun 2019 luas lahan pertanian di Kawasan Kecamatan Pallangga sebesar 2.874,52 Ha sedangkan pada tahun 2020 luas lahan pertanian sebesar 2.840,68 Ha artinya pemanfaatan lahan pertanian di Kecamatan Pallangga mengalami penurunan sebesar 33,84 Ha. Sehingga luas lahan pertanian yang mengalami perubahan dari tahun 2019 – 2022 pada Kecamatan Pallangga sebesar 33,84 Ha. Untuk melihat kondisi perubahan fungsi dari lahan menjadi lahan terbangun di Kecamatan Pallangga dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 4.11 Peta Kondisi Lahan Pertanian Pada Tahun 2019**



**Gambar 4.12 Peta Kondisi Lahan Pertanian Pada Tahun 2022**

## **H. Pola Perubahan Pemanfaatan Lahan**

Dilihat kondisi pada perubahan fungsi lahan pertanian, yang menunjukkan adanya perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian makin bertambah setiap tahunnya. Dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk pada Kawasan Pallangga dan sekitarnya yang semakin meningkat setiap tahunnya pula sehingga membutuhkan lahan untuk kawasan permukiman sebagai tempat tinggal. Adapun pola dari perubahan fungsi lahan yang terjadi pada kawasan Pallangga adalah pola Konversi *Adaptasi Demografi (Population growth driven land conversion)*, yaitu dimana pola konversi yang terjadi dikarenakan kebutuhan tempat tinggal atau pemukiman akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk.

## **I. Analisis Perubahan Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan di Kecamatan Pallangga pada tahun 2022 yang terdiri atas perumahan dan pekarangan, fasilitas umum, perkantoran, perdagangan dan areal persawahan, jalan dan penggunaan lahan lainnya. Perubahan penggunaan lahan yang paling dominan di Kecamatan Pallangga dari tahun 2019 hingga tahun 2022 yaitu lahan pertanian sebesar 605 ha (13,00 %). Areal lahan kering dan persawahan merupakan lahan yang terbesar yang berubah fungsi menjadi lahan permukiman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 4.13 Perkembangan Penggunaan Lahan di Kecamatan Pallangga Tahun 2019 – 2022**

No	Jenis Penggunaan Lahan	Tahun 2019		Tahun 2022		Perubahan Luas (ha)
		Luas (ha)	Persentase (%)	Luas (ha)	Persentase (%)	
1	Lahan pertanian (sawah)	2874	54,49	2640	41,95	-234
2	Lahan Kering (Ladang/Tegal dan rawa)	1346	27,90	1325	27,46	-21
3	Permukiman	704	14,59	1338	27,73	+638
4	Semak belukar	25,8	0,53	23,8	0,49	-2
5	Lahan kosong	15	0,31	9	0,18	-16
6	Pemakaman	0,2	0,004	0,2	0,004	0
7	Lainnya	104	2,15	104	2,15	0
<b>Jumlah</b>		<b>4824</b>	<b>100</b>	<b>4824</b>	<b>100</b>	

*Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022*

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diatas, perkembangan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Pallangga pada tahun 2019 masih didominasi oleh kegiatan lahan pertanian dan lahan kering dengan persentase masing-masing 54,49% dan 27,90% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan, dimana penggunaan lahan pertanian dan lahan kering berubah menjadi 41,95% dan 27,46%. Sedangkan untuk lahan permukiman mengalami peningkatan. Untuk dapat mengontrol perubahan penggunaan lahan ini diperlukan adanya suatu pola penggunaan lahan yang diharapkan dapat menjadi pedoman penggunaan lahan. Adanya pedoman tersebut diharapkan dapat meningkatkan efesiensi perubahan penggunaan lahan sehingga memberikan hasil yang optimal dan berdaya guna terhadap perubahan yang terjadi. Agar nantinya tidak terjadi kesemrawutan kota dalam artian pedoman



tersebut berisikan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang kemudian disepakati aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang kemudian disepakati oleh masyarakat, sehingga apabila perubahan yang terjadi tidak sesuai dengan pedoman rencana yang telah dibuat, dapat diberlakukan pemberian sanksi kepada yang melanggarnya. Peraturan dibuat dengan maksud masyarakat mengetahui bahwa perubahan yang tidak sesuai rencana akibatnya dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan baru seperti kemacetan lalu lintas dan banjir.

#### **J. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perubahan Pemanfaatan Lahan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan terjadinya pemanfaatan lahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.14 Faktor – Faktor yang Menyebabkan Perubahan Pemanfaatan lahan**

<b>No</b>	<b>Faktor</b>	<b>Indikator</b>
1	Faktor Kependudukan	Pertumbuhan penduduk
		Kepadatan penduduk
2	Faktor Kebutuhan Lahan	Nilai jual lahan
		Lokasi lahan
3	Faktor Ekonomi	Mata pencaharian penduduk
		Tingkat pendapatan penduduk
4	Faktor Sosial	Tingkat pendidikan
		Karakteristik Pemilik Lahan
5	Faktor Kebijakan	Perizinan Pemerintah

Berdasarkan dari tabel diatas menunjukkan ada 5 (lima) faktor dan mempunyai beberapa indikator didalamnya yang menyebabkan terjadinya perubahan pemanfaatan lahan di Kecamatan Pallangga.

## 1. Faktor Kependudukan

### 1) Pertumbuhan Penduduk

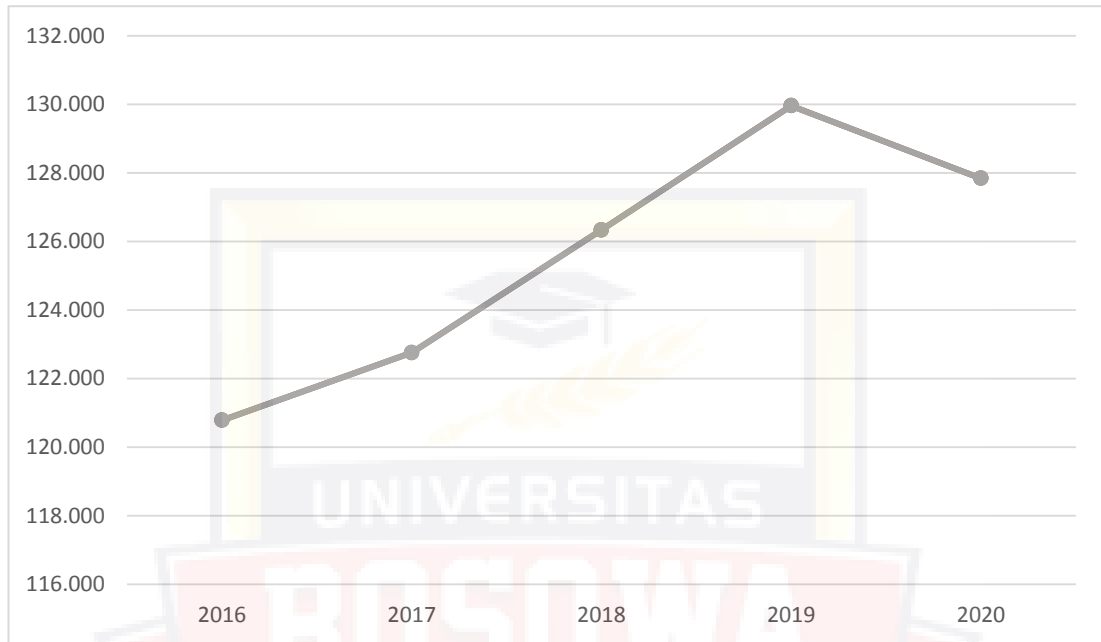
Penduduk di Kecamatan Pallangga yang mengalami pertumbuhan terbilang cukup menurun pada 2020, bisa kita lihat pada tabel 4.15 yaitu perkembangan pertumbuhan jumlah penduduk dalam 5 tahun terakhir.

**Tabel 4.15 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Pada Kawasan Penelitian 5 Tahun Terakhir**

No	Kelurahan/ Desa	Jumlah Penduduk				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jenetallasa	18.719	19.226	19.581	20.141	18.596
2	Tetebatu	6.752	6.935	7.062	7.264	6788
3	Pallangga	5.936	6.097	6.209	6.387	6695
4	Bungaejaya	3.556	3.652	3.720	3.826	3462
5	Panakkukang	5.916	6.076	6.188	6.365	3891
6	Julukanaya	5.352	5.497	5.598	3.759	5150
7	Julubori	5.981	6.143	6.257	6.436	5910
8	Julupamai	3.332	3.422	3.485	3.586	3091
9	Bontoramba	5.267	5.410	5.509	5.668	4903
10	Kampili	5.023	5.159	5.254	5.405	5104
11	Toddotoa	3.720	3.820	3.891	4.002	3596
12	Parangbanoa	3.124	3.208	3.266	3.362	4139
13	Pangkabinanga	6.666	6.846	6.971	7.173	7960
14	Bontoala	21.607	22.192	22.601	23.249	22.045
15	Mangalli	11.497	11.809	12.026	12.369	10.684
16	Taeng	8.332	8.557	8.716	8.965	13.823
<b>Jumlah</b>		<b>120.780</b>	<b>122.752</b>	<b>126.334</b>	<b>129.957</b>	<b>127.837</b>

Sumber : BPS Kecamatan Pallangga Dalam Angka 2021

**Grafik 4.2**  
**Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Pallangga 5**  
**Tahun Terakhir**



Dilihat dari tabel diatas yaitu tabel 4.15 dan grafik 4.2, memperlihatkan pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020, yang dimana jumlah penduduk di Kecamatan Pallangga mengalami berkurangnya dengan jumlah 2.120, namun tetap membutuhkan lahan lebih banyak untuk kawasan permukiman.

## 2) Kepadatan Penduduk

**Tabel 4.16 Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Pallangga**

No	Kelurahan/ Desa	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah(Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km <sup>2</sup> )
1	Jenetallasa	18.596	3,22	5.775
2	Tetebatu	6.788	2,51	2.704
3	Pallangga	6.695	3,02	1.645
4	Bungaejaya	3.462	4,07	1.146
5	Panakkukang	5.891	1,69	3.486
6	Julukanaya	5.150	3,08	1.672
7	Julubori	5.910	4,37	1.352
8	Julupamai	3.091	2,70	1.145
9	Bontoramba	4.903	6,09	805
10	Kampili	5.104	5,35	954
11	Toddotoa	3.596	3,08	1.168
12	Parangbanoa	4.139	2,15	1.925
13	Pangkabinanga	7.960	1,89	4.212
14	Bontoala	22.045	1,25	17.636
15	Mangalli	10.684	1,50	7.123
16	Taeng	13.823	2,27	6.089
<b>Jumlah</b>		<b>127.837</b>	<b>48,24</b>	<b>2.650</b>

Sumber : BPS Kecamatan Pallangga Dalam Angka 2021

## 2. Faktor Kebutuhan Lahan

### 1) Nilai Jual Lahan

Nilai jual lahan pada Kecamatan Pallangga berkisar antara Rp.700.000 sampai > Rp.7.000.0000 per meternya dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, nilai jual lahan yang semakin tinggi mendorong penduduk yang memiliki lahan

pertanian khususnya sawah cenderung menjual lahan mereka.

**Tabel 4.17 Nilai Jual lahan Terhadap Perubahan Pemanfaatan Lahan**

No	Desa/ Kelurahan	Harga lahan		
		Rp. 700.000 - Rp 2.000.000	Rp. 3.000.000 - Rp. 7.000.000	> Rp. 7.000.000
1	Jenetallasa	1	3	6
2	Tetebatu	1	1	2
3	Pallangga	1	2	7
4	Bungaejaya	2	2	3
5	Panakkukang	1	2	2
6	Julukanaya	1	1	1
7	Julubori	1	2	2
8	Julupamai	1	1	2
9	Bontoramba	1	2	7
10	Kampili	3	2	4
11	Toddotoa	2	2	2
12	Parangbanoa	1	2	1
13	Pangkabinanga	1	1	3
14	Bontoala	2	2	4
15	Mangalli	1	2	3
16	Taeng	2	1	3
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>	<b>28</b>	<b>50</b>

Sumber : Hasil Responden Tahun 2022

Berdasarkan Hasil dari penilaian para responden tentang harga nilai lahan, dapat diketahui masyarakat yang menyatakan harga lahan Rp.700.000 – Rp.2.000.000/m<sup>2</sup> sebanyak 22 orang, yang menyatakan harga Rp.3.000.000 – Rp.7.000.000/m<sup>2</sup> sebanyak 28 orang, dan 50 orang yang menyatakan harga lahan > Rp.7.000.000/m<sup>2</sup>. Masyarakat menyatakan, harga lahan pada Kawasan Kecamatan Pallangga terus meningkat setiap tahunnya, selain itu ada juga yang mematok harga sendiri sesuai kondisi dan letak lahannya. Adapun perhitungan skor akhir indikator nilai

jual lahan, dapat dilihat pada tabel 4.18:

**Tabel 4.18 Perhitungan Skor Akhir**

Skala Jawaban	Skala Jawaban * Nilai Skala	Hasil
<b>TB</b>	1*22	22
<b>KB</b>	3*28	84
<b>B</b>	5*60	250
<b>Jumlah Skor</b>		<b>356</b>
		<b><math>356 / 500 = 0.712</math> <math>= 71 \%</math></b>

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022

## 2) Lokasi Lahan

Lokasi lahan sangat pengaruh yang cukup signifikan terhadap adanya perubahan pemanfaatan lahan pada suatu wilayah, semakin strategis lokasi lahan tersebut maka sangat berpotensi akan adanya terjadi perubahan fungsi. Lokasi lahan Pada Kecamatan Pallangga yang cukup strategis, selain itu berdekatan dengan Kawasan Perkotaan Sungguminasa (Ibukota Kabupaten Gowa), di Kecamatan Pallangga juga terdapat beberapa fasilitas pendukung lainnya.

**Tabel 4.19 Lokasi Lahan Terhadap Perubahan Pemanfaatan Lahan**

No	Desa/ Kelurahan	Lokasi Lahan		
		Tidak Berpengaruh	Kurang Berpengaruh	Berpengaruh
1	Jenetallasa	0	0	5
2	Tetebatu	0	1	7
3	Pallangga	0	1	3
4	Bungaejaya	0	1	4
5	Panakkukang	1	2	1

No	Desa/ Kelurahan	Lokasi Lahan		
		Tidak Berpengaruh	Kurang Berpengaruh	Berpengaruh
6	Julukanaya	2	1	1
7	Julubori	0	2	2
8	Julupamai	0	1	5
9	Bontoramba	0	2	2
10	Kampili	0	1	3
11	Toddotoa	0	0	5
12	Parangbanoa	0	1	2
13	Pangkabinanga	0	2	2
14	Bontoala	0	1	5
15	Mangalli	0	2	4
16	Taeng	1	2	1
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>34</b>	<b>55</b>

Sumber : Hasil Responden Tahun 2022

Berdasarkan dari hasil penilaian para responden tentang lokasi lahan, yang menyatakan ada pengaruh sebanyak 11 orang, 34 orang menyatakan kurang berpengaruh dan 55 orang menyatakan bahwa perubahan fungsi lahan dipengaruhi oleh lokasi lahan tersebut, semakin strategis tempatnya maka semakin tinggi juga potensi lahan adanya perubahan fungsi. Adapun perhitungan skor indikator lokasi lahan, dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

**Tabel 4.20 Perhitungan Skor Akhir Tentang Lokasi Lahan**

Skala Jawaban	Skala Jawaban * Nilai Skala	Hasil
<b>TB</b>	1*11	11
<b>KB</b>	3*34	102
<b>B</b>	5*55	275
<b>Jumlah Skor</b>		<b>388</b>
		<b>388 / 500 = 0.776</b> <b>= 78 %</b>

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022

### 3. Faktor Ekonomi

#### 1) Mata Pencaharian Penduduk

Salah satu faktor ekonomi yang sangat berkaitan dengan pemanfaatan lahan. Adapaun itu mata pencaharian penduduk di Kecamatan Pallangga terdiri dari petani, ASN/Pegawai Pemerintahan, wiraswasta dan pedagang. Sedangkan untuk para petani yang menggarap lahan pertanian di Kecamatan Pallangga ada sebagian milik lahan sendiri adapun juga yang menggunakan jasa petani penggarap. Berdasarkan dari hasil responden mata pencaharian di Kecamatan Pallangga itu bermata pencaharian wiraswasta. Dapat dilihat tabel di bawah ini.

**Tabel 4.21 Penilaian Responden Berdasarkan Mata Pencaharian di Kecamatan Pallangga**

No.	Desa/Kelurahan	Mata Pencaharian		
		Wiraswasta	Petani	ASN/Pegawai
1	Jenetallasa	5	3	3
2	Tetebatu	3	1	1
3	Pallangga	6	1	5
4	Bungaejaya	3	2	1
5	Panakkukang	3	1	2
6	Julukanaya	2	2	-
7	Julubori	2	2	1
8	Julupamai	2	2	1
9	Bontoramba	3	3	2
10	Kampili	3	1	1
11	Toddotoa	2	2	1
12	Parangbanoa	2	1	1
13	Pangkabinanga	3	2	1
14	Bontoala	3	2	2
15	Mangalli	2	2	1



No.	Desa/Kelurahan	Mata Pencaharian		
		Wiraswasta	Petani	ASN/Pegawai
16	Taeng	3	2	1
<b>Jumlah</b>		<b>47</b>	<b>29</b>	<b>24</b>

*Sumber : Hasil Responden Tahun 2022*

Dapat dilihat dari Tabel diatas menunjukkan bahwa yang mendominasi yaitu wiraswasta dengan jumlah 47 orang lalu petani dengan jumlah 29 orang dan wiraswasta dengan jumlah 24 orang. Para petani juga mempunyai mata pencaharian lain seperti menjadi buruh bangunan dan tukang ojek online. Dikarenakan profesi petani bersifat musiman, adapun dilihat dari perhitungan skor akhir di indikator mata pencaharian, dilihat di tabel di bawah ini

**Tabel 4.22 Perhitungan Skor Akhir Menurut Mata Pencaharian**

Skala Jawaban	Skala Jawaban * Nilai Skala	Hasil
<b>TB</b>	1*47	47
<b>KB</b>	3*29	87
<b>B</b>	5*24	120
<b>Jumlah Skor</b>		<b>254</b>
		<b>254 / 500 = 0.508</b> <b>=51%</b>

*Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022*

## 2) Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan disesuaikan dengan standar pendapatan UMR pekerja di Kecamatan Pallangga tergantung dari jenis pekerjaan masyarakatnya seperti, ASN/PNS, Petani, wiraswasta dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil survey

melalui responden warganya dari 100 orang responden diketahui bahwa pendapatan penduduk Rp2.250.000 sebanyak 72 orang responden, sedangkan pendapatan Rp2.000.000 sebanyak 14 orang responden, dan pendapatan Rp 1.600.000 sebanyak 14 orang responden. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.23 Penilaian Tentang Tingkat Pendapatan Penduduk di Kecamatan Pallangga**

No.	Desa/Kelurahan	Pendapatan (Rp)		
		>Rp. 2.000.000	Rp.1.000.000 Rp.2.000.000	<1.500.000
1.	Jenetallasa	7	3	3
2.	Tetebatu	3	1	-
3.	Pallangga	5	1	2
4.	Bungaejaya	2	1	1
5.	Panakkukang	3	1	1
6.	Julukanaya	3	2	1
7.	Julubori	2	1	-
8.	Julupamai	4	1	1
9.	Bontoramba	3	1	1
10	Kampili	3	2	2
11	Toddotoa	4	-	1
12	Parangbanoa	4	2	3
13	Pangkabinanga	4	2	2
14	Bontoala	5	1	1
15	Mangalli	3	1	-
16	Taeng	4	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>59</b>	<b>21</b>	<b>20</b>

*Sumber : Hasil Responden Tahun 2022*

Dilihat dari hasil penilaian responden tentang pendapatan mereka, 20 orang menyatakan mereka mempunyai pendapatan < Rp.1.500.000 per bulannya, yang umumnya berprofesi

sebagai petani dan pedagang, lalu yang memiliki pendapatan kisaran Rp.1.500.000 – Rp.2.000.000 sebanyak 21 orang dan 59 orang yang mempunyai pendapatan sehingga >Rp.2.000.000 pada umumnya adalah mereka yang berprofesi sebagai wiraswasta/pedagang dan ASN/PNS. Adapun perhitungan skor akhir di bawah ini.

**Tabel 4.24 Perhitungan Skor Akhir Tingkat Pendapatan**

Skala Jawaban	Skala Jawaban * Nilai Skala	Hasil
TB	1*59	59
KB	3*21	63
B	5*20	100
<b>Jumlah Skor</b>		<b>122</b>
		<b>122 / 500 = 0.244</b> <b>= 24%</b>

*Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022*

#### 4. Faktor Sosial

##### 1) Pengaruh Tetangga

Fenomena perubahan fungsi lahan pada Kawasan Pallangga diperkirakan akan terus bertambah pada tahun-tahun mendatang. Sangat memungkinkan bahwa pesatnya perkembangan perubahan fungsi lahan disebabkan karena pengaruh tetangga yang telah mengkonversikan lahan mereka. Melihat jumlah orang yang mengkonversikan lahannya semakin banyak, tidak menutup kemungkinan, yang lain akan ikut mengkonversi atau menjual juga lahan yang dimilikinya.

**Tabel 4.25 Penilaian Responden Tentang Pengaruh Perubahan Pemanfaatan Lahan**

No	Desa/ Kelurahan	Pengaruh Tetangga		
		Tidak Ada Pengaruh	Kurang Berpengaruh	Ada Pengaruh
1	Jenetallasa	2	4	4
2	Tetebatu	3	4	2
3	Pallangga	3	9	3
4	Bungaejaya	2	3	2
5	Panakkukang	2	2	2
6	Julukanaya	2	2	2
7	Julubori	1	1	-
8	Julupamai	2	3	2
9	Bontoramba	1	1	1
10	Kampili	2	2	2
11	Toddotoa	1	2	1
12	Parangbanoa	2	1	2
13	Pangkabinanga	1	2	1
14	Bontoala	3	2	1
15	Mangalli	1	3	2
16	Taeng	1	2	1
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>43</b>	<b>28</b>

*Sumber : Hasil Responden Tahun 2022*

Berdasarkan hasil penilaian masyarakat tentang adanya pengaruh tetangga menyebabkan perubahan fungsi lahan, 29 orang menyatakan tidak ada pengaruh, dalam artian mereka yang memiliki lahan pertanian tetap mempertahankan lahan miliknya dari perubahan fungsi, sedangkan 43 orang menyatakan kurang berpengaruh dan 28 orang menyatakan

berpengaruh, mereka yang menyatakan berpengaruh beranggapan, tetangga mereka memiliki kehidupan yang lebih baik setelah lahannya terjual untuk dialih fungsikan menjadi lahan terbangun, sehingga mereka juga mengambil keputusan untuk segera menjual lahannya untuk dialihfungsikan. Adapun perhitungan skor akhir indikator pengaruh tetangga, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.26**  
**Perhitungan Skor Akhir**

Skala Jawaban	Skala Jawaban * Nilai Skala	Hasil
TB	1*29	29
KB	3*43	129
B	5*28	140
<b>Jumlah Skor</b>		<b>298</b>
		<b>298 / 500 =</b> <b>0.596</b> <b>= 60%</b>

*Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022*

## 2) Karakteristik Kepemilikan Lahan

Karakteristik pemilik lahan merupakan salah satu faktor sosial budaya yang juga berkaitan dengan pemanfaatan lahan. Karakteristik pemilik lahan merupakan alasan pemilik lahan untuk melepas lahan yang dimilikinya.

**Tabel 4.27**  
**Penilaian Responden Tentang Karakteristik Kepemilikan Lahan**

No	Desa/ Kelurahan	Karakteristik Pemilik Lahan	
		Lahan Tidak Produktif	Harga Lahan Meningkat
1	Jenetallasa	1	5
2	Tetebatu	1	8
3	Pallangga	3	4
4	Bungaejaya	1	5
5	Panakkukang	1	4
6	Julukanaya	1	3
7	Julubori	2	4
8	Julupamai	3	6
9	Bontoramba	1	4
10	Kampili	2	3
11	Toddotoa	2	4
12	Parangbanoa	2	5
13	Pangkabinanga	1	4
14	Bontoala	2	5
15	Mangalli	3	6
16	Taeng	1	4
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	<b>74</b>

*Sumber : Hasil Responden Tahun 2022*

Berdasarkan hasil penilaian responden tentang karakteristik pemilik lahan, 26 orang menyatakan alasan pemilik lahan melepas lahannya dikarenakan tidak lagi produktif, dan 74 orang menyatakan melepas lahannya untuk dialih fungsikan karena harga lahan yang terus meningkat setiap tahunnya. Adapun perhitungan skor akhir di tabel bawah ini.

**Tabel 4.28 Perhitungan Skor Akhir**

Skala Jawaban	Skala Jawaban * Nilai Skala	Hasil
TB	1*26	26
B	5*74	370
<b>Jumlah Skor</b>		<b>396</b>
		<b>396 / 500 = 0.792</b> <b>= 79%</b>

*Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022*

## 5. Faktor Kebijakan

### 1) Perizinan Pemerintah

Perubahan pemanfaatan lahan yang terjadi pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa, berdasarkan penilaian responden dalam lingkup pemerintah setempat dan dinas terkait. Pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4. 29 Penilaian Tentang kebijakan Pemerintah**

No	Pemerintah	Perizinan Pemerintah		
		Memberi Izin	Tidak Memberi Izin	Tergantung Pemilik Lahan
1	BPN Gowa	1	-	-
2	Dinas PU Gowa	1	-	-
3	Kantor Desa/ Kelurahan	-	-	3
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

*Sumber : Hasil Responden Tahun 2022*

Pihak Kelurahan/Desa menyatakan bahwa adanya perubahan lahan tergantung dari pemilik lahan itu sendiri, sedangkan pihak pemerintah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa maupun Dinas Pekerjaan Umum bidang Tata Ruang tidak mengizinkan

ketika pembangunan tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Gowa. Adapun penilaian masyarakat tentang pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perubahan fungsi lahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.30 Penilaian Responden Tentang Kebijakan Pemerintah**

No	Desa/ Kelurahan	Kebijakan Pemerintah		
		Tidak Ada Pengaruh	Kurang Berpengaruh	Ada Pengaruh
1	Jenetallasa	1	3	1
2	Tetebatu	2	4	2
3	Pallangga	2	1	1
4	Bungaejaya	1	2	2
5	Panakkukang	2	2	0
6	Julukanaya	1	2	1
7	Julubori	2	1	1
8	Julupamai	2	3	1
9	Bontoramba	2	1	1
10	Kampili	1	2	1
11	Toddotoa	2	2	1
12	Parangbanoa	1	1	2
13	Pangkabinanga	0	3	2
14	Bontoala	4	2	0
15	Mangalli	1	1	4
16	Taeng	1	2	1
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>43</b>	<b>25</b>

*Sumber : Hasil Responden Tahun 2022*

Berdasarkan hasil penilaian responden, 29 orang menyatakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selama ini tidak ada pengaruhnya terhadap perubahan pemanfaatan lahan yang terjadi, 43 orang menyatakan kurang berpengaruh dan 28 orang menyatakan kebijakan pemerintah ada pengaruhnya, mereka beranggapan perubahan pemanfaatan lahan yang terjadi selama ini telah sesuai dengan kebijakan yang



ditetapkan oleh pemerintah.

Perhitungan skor akhir variabel kebijakan pemerintah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.31 Perhitungan Skor Akhir**

Skala Jawaban	Skala Jawaban * Nilai Skala	Hasil
TB	1 * 32	32
KB	3 * 43	129
B	5 * 25	125
<b>Jumlah Skor</b>		<b>286</b>
		<b>286 / 500 = 0.572</b> <b>= 57 %</b>

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022

Setelah melakukan perhitungan pada skor akhir pada masing – masing indikator setiap variabel, maka langkah selanjutnya adalah melakukan rekapitulasi untuk melihat faktor – faktor yang menyebabkan perubahan fungsi lahan. Bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.32**  
**Rekapitulasi Hasil Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perubahan Lahan**

No	Faktor-faktor Penyebab Perubahan Pemanfaatan Lahan	Indikator	Nilai Hasil Akhir (%)	Standar Nilai Pengaruh (%)	Kesimpulan
1	Faktor Kebutuhan Lahan	Nilai jual lahan	71%	66,67 – 100	Berpengaruh
		Lokasi lahan	78%	66,67 – 100	Berpengaruh
2	Faktor Ekonomi	Mata pencaharian penduduk	51%	33,34 – 66,66	Kurang Berpengaruh

No	Faktor-faktor Penyebab Perubahan Pemanfaatan Lahan	Indikator	Nilai Hasil Akhir (%)	Standar Nilai Pengaruh (%)	Kesimpulan
		Tingkat pendapatan penduduk	24%	00,00 – 33,34	Tidak Berpengaruh
3	Faktor Sosial	Pengaruh Tetangga	60%	33,34 – 66,66	Kurang Berpengaruh
		Karakteristik Pemilik Lahan	79%	66,67 – 100	Berpengaruh
4	Faktor Kebijakan	Perizinan / Kebijakan Pemerintah	57 %	33,34 – 66,66	Kurang Berpengaruh

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022

Hasil analisis dan hasil rekapitulasi faktor – faktor penyebab terjadinya perubahan fungsi lahan, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adanya alih fungsi lahan di Kecamatan Pallangga adalah:

- (1) **Faktor kependudukan**, dengan indikator pertumbuhan dan kepadatan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk yang signifikan telah meningkatkan permintaan lahan untuk perumahan, jasa, industri, dan fasilitas umum lainnya. Pada Kawasan penelitian, laju perkembangan penduduk bertambah setiap tahunnya, jumlah penduduk yang terus bertambah tentunya membutuhkan lahan baru, khususnya peruntukan permukiman sebagai tempat tinggal.

### a) **Pertumbuhan Penduduk**

Seperti yang telah diungkapkan oleh Colby, 1933 dalam (Yunus, 2012: 177-178) bahwa, perkembangan suatu kota bersifat dinamis, termasuk dalam konteks penggunaan lahannya. Colby lebih lanjut mengungkapkan beberapa kekuatan yang mempengaruhi dinamika perkembangan ini, termasuk perubahan jumlah penduduk, perubahan tuntutan masyarakat, penambahan dan pengurangan bangunan, perubahan nilai-nilai kehidupan, serta aspek-aspek kehidupan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh, pertumbuhan jumlah penduduk di Kecamatan Pallangga dalam beberapa tahun terakhir (2015-2020) telah secara kontinyu mengalami peningkatan, baik yang diakibatkan oleh tingkat kelahiran maupun migrasi. di tahun 2015, jumlah penduduk mencapai 127.837 orang, dengan tingkat kepadatan mencapai 2.650 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Pallangga tergolong tinggi. Detail pertumbuhan penduduk ini bisa dilihat pada Tabel 4.33

**Tabel 4.33**  
**Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Pallangga**

	Kelurahan/ Desa	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah(Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km <sup>2</sup> )
1	Jenetallasa	18.596	3,22	5.775
2	Tetebatu	6.788	2,51	2.704
3	Pallangga	6.695	3,02	1.645
4	Bungaejaya	3.462	4,07	1.146
5	Panakkukang	5.891	1,69	3.486
6	Julukanaya	5.150	3,08	1.672
7	Julubori	5.910	4,37	1.352
8	Julupamai	3.091	2,70	1.145
9	Bontoramba	4.903	6,09	805
10	Kampili	5.104	5,35	954
11	Toddotoa	3.596	3,08	1.168
12	Parangbanoa	4.139	2,15	1.925
13	Pangkabinanga	7.960	1,89	4.212
14	Bontoala	22.045	1,25	17.636
15	Mangalli	10.684	1,50	7.123
16	Taeng	13.823	2,27	6.089
<b>Jumlah</b>		<b>127.837</b>	<b>48,24</b>	<b>2.650</b>

*Sumber : BPS Kecamatan Pallangga Dalam Angka 2021*

Semakin tingginya laju pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kebutuhan terhadap ruang atau lahan, baik yang didedikasikan guna memwadhahi kepentingan akan tempat tinggal, kegiatan komersial, industri, pelayanan publik, infrastruktur fisik, serta kegiatan terkait interaksi sosial di masyarakat. Kondisi ini akan secara langsung berimplikasi terhadap perluasan kawasan terbangun, di beberapa lokasi yang dipandang strategis dan tepat untuk kepentingan-kepentingan tersebut. Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Pallangga yang relatif tinggi, seperti yang

telah dijelaskan di atas, selain telah mengakibatkan perluasan kawasan terbangun juga telah memicu terjadinya penumpukan kegiatan pada beberapa wilayah yang menjadi pusat aktivitas.

(2) **Faktor kebutuhan lahan**, dengan indikator nilai jual lahan dan lokasi lahan. Kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian antara lain pembangunan real estate, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan jasa – jasa lainnya yang memerlukan lahan yang luas, sebagian diantaranya berasal dari lahan pertanian termasuk sawah. Hal ini dapat dimengerti, mengingat lokasi yang dipilih sehingga dekat dengan pengguna jasa yang berkonsentrasi di perkotaan dan wilayah di sekitarnya. Di Kawasan Penelitian, nilai jual lahan yang terus meningkat setiap tahun membuat masyarakat sekitar semakin berminat menjual lahannya untuk dialihfungsikan. Selain itu, Kecamatan Pallangga yang merupakan salah satu Wilayah di Kabupaten Gowa yang termasuk dalam PKN Perkotaan Mamminasata dan berdekatan pula dengan Perkotaan Sungguminasa mendorong minat para pengembang untuk melakukan pembangunan sehingga membuat lahan – lahan pertanian di Pallangga itu terus berkurang.

**a) Nilai Jual Lahan**

Semakin berkurangnya lahan pertanian di Kecamatan Pallangga oleh adanya pembangunan ruang – ruang yang ada disekitarnya, selain itu secara fisik lahan pertanian yang ada di Kawasan berada site dengan topografi yang relatif datar. Lahan semacam ini menjadi incaran para pengembang/developer untuk dijadikan kompleks permukiman dll sehingga nilai jual lahan yang menjadi naik dengan pesat.

**b) Lokasi Lahan**

Kecamatan Pallangga yang dimana salah satu wilayah termasuk PKN di dalam RTRW Kabupaten Gowa, sebagai akibatnya telah terjadi pemanfaatan lahan yang semakin padat yang membawa dampak pada alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun, dimana harga ekonomis lahan yang berada tidak jauh dari pusat perkotaan sungguminasa lebih tinggi jika dibandingkan dengan lahan yang berlokasi di pinggiran kota.

**(3) Faktor ekonomi,** dengan indikator tingkat pendapatan.

Pada lokasi penelitian, masyarakat yang dominan menjual lahannya adalah mereka yang berprofesi sebagai petani. Faktor kebutuhan keluarga yang terdesak oleh kebutuhan modal usaha atau keperluan keluarga lainnya (pendidikan atau lainnya) sementara tingkat pendapatan yang tergolong

minim, seringkali membuat masyarakat (umumnya petani) tidak mempunyai pilihan selain menjual sebagian lahannya.

#### **a) Tingkat Pendapatan**

Semakin tingginya biaya hidup, dan tumbuhnya budaya konsumtif, budaya instant, cepat, serta menguntungkan secara ekonomis finansial, telah menjadi pemicu keinginan pemilik lahan untuk mengalihfungsikan lahan pertanian yang dimilikinya. Tekanan ekonomi akan sangat dirasakan ketika terjadi ketimpangan pendapatan yang diperoleh dari hasil panen dengan pengeluaran yang semakin membung. Peningkatan kebutuhan finansial untuk menutupi biaya pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, menambah keterdesakan ekonomi yang dialami para petani. Kondisi ini memotivasi munculnya pemikiran petani mengalihfungsikan lahan pertanian ke sektor non-pertanian, atau menjual lahan tersebut kepada pengembang/developer. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Fadholi (1991: 59) bahwa petani mengalami kesulitan dan permasalahan yang akan menyebabkan semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian.

#### **b) Mata Pencarian**

Peningkatan harga lahan di kawasan perkotaan telah mendorong pemilik lahan pertanian untuk menjual atau mengalihfungsikan pemanfaatannya, dari fungsi pertanian menjadi non-pertanian. Secara ekonomis keputusan ini diambil, karena sebagian besar mata pencaharian petani yang kurang pendapatan sehingga ini dipandang akan memberi kontribusi finansial yang lebih tinggi. Dengan kata lain pemanfaatan lahan untuk kegiatan agraris mulai kurang kompetitif, jika dibandingkan dengan lahan yang sama dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan non-agraris. Ini terjadi khususnya untuk lahan-lahan yang secara geografis terletak pada lokasi yang berada dalam radius pusat kota. Di dalam penelitian ini, semakin dekat lokasi sebidang lahan dengan pusat kota

- (4) **Faktor sosial**, dengan indikator karakteristik pemilik lahan (alasan: harga lahan meningkat). Pada lokasi penelitian, lahan yang dianggap kurang memberi kontribusi terhadap keuangan keluarga menyebabkan lahan tersebut dijual apalagi harga lahan yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadi alasan utama sehingga lahan tersebut dijual untuk mendapatkan perekonomian yang lebih baik. Selanjutnya lahan yang telah terjual mengalami



perkembangan fisik yang pada umumnya menjadi permukiman

#### **a) Karakteristik Pemilik Lahan**

Yang menjadi pemicu terjadinya alih fungsi lahan pertanian dalam konteks ini, adalah keberadaan pembagian hak waris yang berlaku di masyarakat seperti diketahui bersama, lahan pertanian merupakan salah satu harta warisan yang memiliki nilai strategis, ketika lahan (nilai ekonomisnya/pemanfaatannya) harus dibagi – bagi antara para pewaris menjadi bagian lebih kecil. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mufaganti, 1999 dalam (Pambudi, 2008: 51), yang menyatakan bahwa sistem pembagian waris akan cenderung mengakibatkan semakin kecilnya penguasaan terhadap lahan pertanian, dan akan mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Kondisi ini sangat lumrah terjadi di Kecamatan Pallangga. Kegiatan alih fungsi lahan pertanian sebagian besar diakibatkan oleh adanya masyarakat yang menjual hak warisnya atas lahan kepada pihak pembeli maupun pihak pengembang/developer.

#### **b) Pengaruh Tetangga**

Penurunan minat masyarakat untuk memertahankan di sektor pertanian ini adalah rendahnya tingkat upah yang diterima jika bekerja di sektor pertanian, dibandingkan dengan upah yang diperoleh dari bekerja di sektor non-pertanian. Sehingga mereka berpengaruh satu sama lain dimana kondisi tersebut mengubah pandangan masyarakat yang menjual lahan pribadi mereka ke pengembang dengan menawarkan akan kontribusi ekonomis.

#### **(5) Faktor Kebijakan**

##### **a) Kebijakan Pemerintah**

Yang dimaksud disini adalah kumpulan faktor-faktor yang berkaitan dengan peraturan penataan ruang baik yang melingkupi tatanan regulasi terkait perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian pemanfaatan ruang yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Pallangga. Serta pentingnya sosialisasi peraturan sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat memiliki pengetahuan terkait peraturan tata ruang. Sosialisasi berfungsi sebagai sarana untuk memberikan arahan dan pengertian kepada masyarakat, sehingga maksud dan tujuan dari peraturan penataan ruang bisa tercapai. Berdasarkan hasil wawancara dan

observasi lapangan, hampir keseluruhan narasumber terutama masyarakat, mengakui tidak mengetahui dan kurang paham terhadap peraturan tata ruang yang berlaku. Salah satu akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan tata ruang, adalah terjadinya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, salah satunya alih fungsi lahan pertanian.

#### **K. Arahannya /Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian**

##### **Kecamatan Pallangga**

Dalam rangka perlindungan dan pengendalian lahan pertanian secara menyeluruh dapat ditempuh melalui 3 (tiga) strategi yaitu :

#### **1. Memperkecil peluang terjadinya alih fungsi**

Dalam rangka memperkecil peluang terjadinya alih fungsi lahan pertanian dilihat dari dua sisi yaitu sisi penawaran dan sisi perminta. Dari sisi penawaran dapat berupa insentif kepada pemilik sawah yang berpotensi untuk diubah, dari sisi permintaan pengendalian sawah dapat ditempuh melalui :

- a) Mengembangkan pajak tanah yang progresif
- b) Meningkatkan efisiensi kebutuhan lahan untuk non-pertanian sehingga tidak ada tanah terlantar
- c) Mengembangkan prinsip gemat lahan untuk industri, perumahan dan perdagangan misalnya pembangunan

rumah susun.

## **2. Mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan**

- a) Membatasi konservasi lahan sawah yang memiliki produktivitas tinggi, menyerap tenaga kerja pertanian tinggi, dan mempunyai fungsi lingkungan tinggi.
- b) Mengarahkan kegiatan konversi lahan pertanian untuk pembangunan kawasan industri, perdagangan, dan perumahan pada kawasan yang kurang produktif.
- c) Membatasi luas lahan yang dapat dikonversi di setiap kabupaten/ kota yang mengacu pada kemampuan pengadaan pangan mandiri.
- d) Menetapkan Kawasan Pangan Abadi yang tidak boleh dikonversi, dengan pemberian insentif bagi pemilik lahan dan pemerintah daerah setempat.

## **3. Instrumen pengendalian alih fungsi lahan**

Instrumen yang dapat digunakan untuk perlindungan dan pengendalian lahan sawah adalah melalui instrumen yuridis dan non – yuridis yaitu :

- a) Instrumen yuridis berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat (apabila memungkinkan setingkat undang-undang) dengan ketentuan sanksi yang memadai.
- b) Instrumen insentif dan disinsentif bagi pemilik lahan sawah dan pemerintah daerah setempat.

- c) Pengalokasian dana dekonsentrasi untuk mendorong pemerintah daerah dalam mengendalikan konversi lahan pertanian terutama sawah
- d) Instrumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan perizinan lokasi.

Sehubungan dengan itu, kebijakan prioritas yang diusulkan dalam rangka pengendalian konversi lahan pertanian adalah sebagai berikut:

1. Menyusun peraturan perundang-undangan tentang ketentuan perlindungan lahan pertanian produktif, baik dalam bentuk Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah maupun Undang-Undang.
2. Menetapkan zonasi (lokasi) lahan-lahan pertanian yang dilindungi, misalnya: Sawah Perlindungan Abadi, Sawah Konversi Terbatas dan Sawah Konversi, dalam bentuk Keputusan Presiden.
3. Menetapkan bentuk insentif dan disinsentif terhadap pemilik tanah dan pemerintah daerah setempat.
4. Mengintegrasikan ketiga ketentuan tersebut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
5. Membentuk Komisi Pengendali Konversi Lahan Sawah baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/ kota,

dengan keputusan kepala daerah yang bersangkutan.

Keseluruhan kebijakan prioritas di atas hendaknya dapat diaplikasikan secara terkoordinasi antar instansi terkait. Dalam rangka pemberian perizinan, seperti Izin Lokasi, IMB dan perizinan lainnya, serta dalam rangka penyelesaian administrasi pertanahan, ketentuan pengendalian konversi ini haruslah menjadi acuan prioritas. Demikian pula mekanisme insentif perlu dikembangkan untuk mendorong petani mempertahankan lahan pertaniannya, misalnya dalam bentuk keringanan PBB, bantuan atau subsidi saprodi, dan perkreditan lunak, peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi, dan kegiatan lainnya yang menunjang. Tidak kalah penting, peranan dinas pertanian setempat untuk memantau dan menganalisa kondisi lahan pertanian di wilayahnya, sebagai masukan yang sangat berharga bagi pemerintah daerah setempat dalam penyusunan dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah yang memberikan prioritas terhadap perlindungan tanah pertanian.

## .BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah maupun tujuan penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada Kawasan Pallangga terjadi perubahan pemanfaatan lahan pertanian menjadi Kawasan permukiman. Perubahan lahan menjadi permukiman didominasi oleh para pengembang yang membangun perumahan-perumahan baru sebagai kebutuhan tempat tinggal dengan menyediakan aksesibilitas sebagai penunjang perumahan tersebut. Adanya perumahan-perumahan baru tersebut kemudian diikuti pembangunan rumah-rumah penduduk disekitarnya. Pembangunan perumahan yang terus dilakukan membuat lahan-lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai pertanian terus berkurang, apalagi lahan pertanian tersebut merupakan lahan produktif, kondisi ini tentunya berpengaruh besar terhadap produktivitas hasil pertanian pada Kecamatan Pallangga.
2. Adapun penyebab terjadinya perubahan pemanfaatan lahan pertanian di Kecamatan Pallangga adalah:
  - a. *Faktor Kependudukan.* kepadatan dan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun,tentunya

mempunyai kebutuhan lahan, sehingga faktor kependudukan berpengaruh terhadap perubahan fungsi lahan.

b. *Faktor Kebutuhan lahan*, yang berpengaruh terhadap alih fungsi lahan pertanian meliputi Nilai Jual Lahan dan Lokasi Lahan.

c. *Faktor Ekonomi*. tingkat pendapatan masih kurang berpengaruh dalam alih fungsi lahan.

d. *Faktor sosial*. Penaruh tetangga dan karakteristik pemilikan lahan berpengaruh terhadap alihfungsi lahan.

3. Arahan/ Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan yaitu Dalam rangka perlindungan dan pengendalian lahan pertanian secara menyeluruh dapat ditempuh melalui 3 (tiga) strategi yaitu :

- a. Memperkecil terjadinya alih fungsi
- b. Mengendalikan kegiatan alih fungsi
- c. Instrumen pengendalian alih fungsi lahan

## **B. Saran**

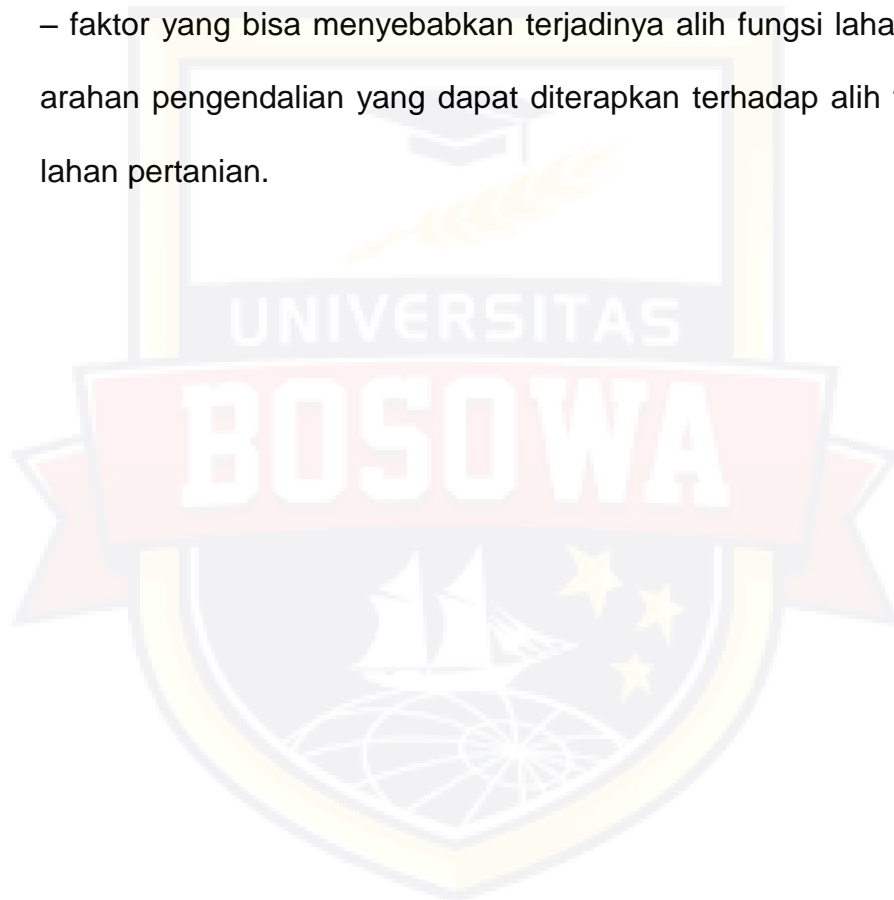
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasa yang telah dibahas, ada beberapa saran untuk sebagai bahan pertimbangan selanjutnya, sebagai berikut :

1. Pemerintah harus meninjau kembali dan mempertegas kebijakan yang telah dibuat guna meminimalisirkan alih fungsi lahan di daerah sekitaranlahan pertanian dan ditinjau kembali kebijakan rencana tata ruang wilayah agar dapat mengendalikan



alih fungsi lahan.

2. Untuk peneliti selanjutnya dikarenakan penelitian ini masih banyak mempunyai kekurangan, maka disarankan pada penelitian selanjutnya untuk melakukan pengambilan data yang lebih akurat dan memperdalam kembali mengenai apa saja faktor – faktor yang bisa menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan dan arahan pengendalian yang dapat diterapkan terhadap alih fungsi lahan pertanian.



## DAFTAR PUSTAKA

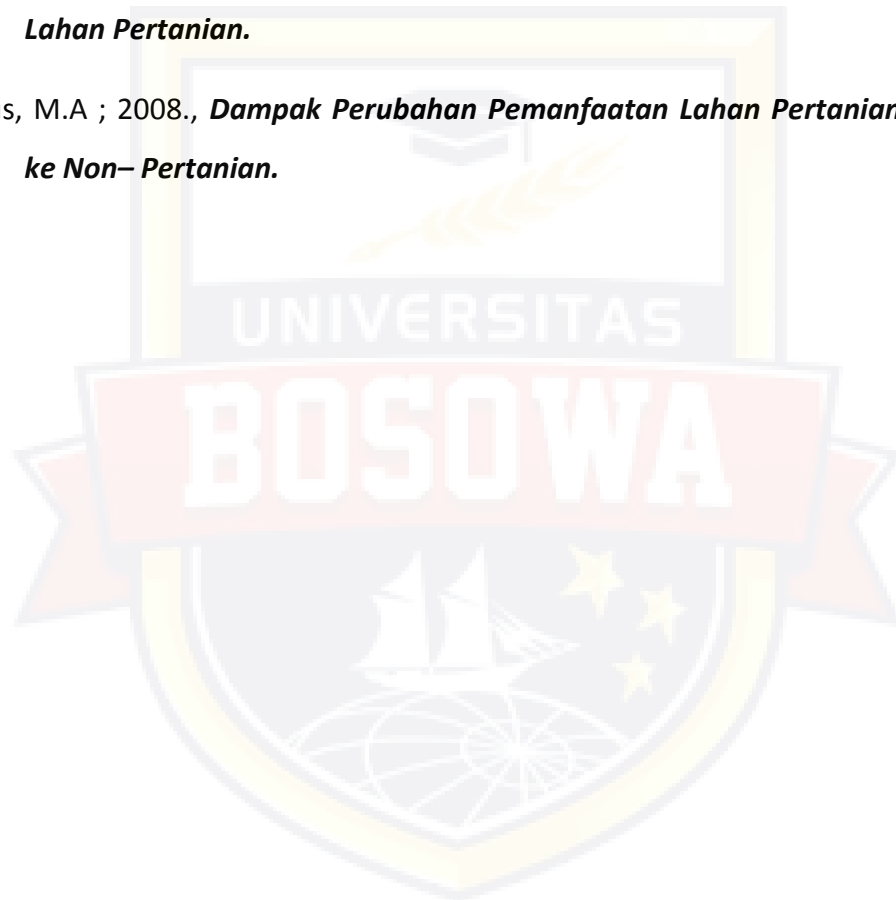
- Alqadri,, 1999, ***Tiga Pilar pengembangan Wilayah***. Direktorat Kebijakan Teknologi untuk Pengembangan Wilayah.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2022, ***Kabupaten Gowa Dalam Angka Tahun 2022***.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2022, ***Kecamatan Pallangga Dalam Angka Tahun 2016***.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2022, ***Kecamatan Pallangga Dalam Angka Tahun 2017***.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2022, ***Kecamatan Pallangga Dalam Angka Tahun 2018***.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2022, ***Kecamatan Pallangga Dalam Angka Tahun 2019***.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2022, ***Kecamatan Pallangga Dalam Angka Tahun 2020***.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2022, ***Kecamatan Pallangga Dalam Angka Tahun 2021***.
- Kustiawan A., 1997, ***Konversi Lahan Pertanian Di Pantai Utara Jawa***. Prisma No1 Tahun XXVII Januari 1197. LP3ES, Jakarta.
- Lampiran Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 Tentang Kriteria Umum Kawasan Perkotaan
- Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012 - 2032 Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang RUTR Kecamatan Pallangga
- Situmeang M., 1998, ***Pola Hubungan Antara Perubahan Penggunaan Lahan Dengan Transformasi Struktur Ekonomi***. Skripsi. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Sumaryanto dan Tahlim S., 2005, ***Pemahaman Dampak Negatif Konversi Lahan Sawah Sebagai Landasan Perumusan Strategi Pengendaliannya***. Prosiding seminar penanganan konversi lahan dan pencapaian pertanian abadi. Satyawan *Et al.* Pusat studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan LPPM Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Supardi.I, 1994. ***Pembangunan Yang Memanfaatkan Sumber Daya***. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Soemarwoto 1994:212., ***Konsep Pola Pemanfaatan Lahan.***

Sumaryanto, 2001, Widjanarko, 2006, Firman 2005, Ruswandi 2007, Furi 2007,  
Soegiyono 2005,214., ***Koefisien Tingkat Korelasi Variabel Yang  
Berpengaruh.*** Syahyuti 2005, Wirardi 1984, Planck 1990, Sihaloho 2004,  
Rusli,1995., ***Penguasaan Lahan.***

UUD Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3)., ***Tentang Perubahan Penggunaan  
Lahan Pertanian.***

Yunus, M.A ; 2008., ***Dampak Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian  
ke Non– Pertanian.***



LAMPIRAN 1

**VISUALISASI PELAKSANAAN OBSERVASI LAPANGAN DI KECAMATAN  
PALLANGGA KABUPATEN GOWA TAHUN 2022**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**ANDI ALIEF MUHAMMAD**, Lahir di Makassar Pada tanggal 13 april 2000, anak pertama dari 3 bersaudara, buah kasih pasangan dari Ayahanda “Umar Congge” dan Ibunda “Hatifah Talibin”. Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 5 tahun dan selesai pada tahun 2005 di TK Ummu

Aiman, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SD Inpres Hartaco Indah dan selesai pada tahun 2012, dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 27 Makassar, tamat pada tahun 2015, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Man 2 Model Makassar dan tamat pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi swasta Jurusan S1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa Makassar.

Selama masa perkuliahan penulis aktif mengikuti kegiatan – kegiatan kampus maupun yang diluar kampus. Penulis pernah aktif menjadi pengurus Ikatan Mahasiswa Perencana Indonesia Kordinator Wilayah Indonesia Timur (IMPI KORWIL IT) Periode 2019 – 2020 sebagai Anggota Pengembangan Sumber Daya Manusia dan pengurus Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota (HMPWK) Universitas Bosowa Makassar periode 2021 – 2022 sebagai Sekretaris Umum.